



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019



PROGRAM KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2019



PROGRAM KERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

2019

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019



psma.kemdikbud.go.id



Direktorat PSMA



@dit_psma



[direktorat.pdma](https://www.instagram.com/direktorat.pdma)



DITPSMA KEMDIKBUD



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019



GEDUNG A
DITJEN DIKDASMEN

PROGRAM KERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2019



psma.kemdikbud.go.id



[direktorat.pasma](https://www.facebook.com/direktorat.pasma)



[direktorat.pasma](https://twitter.com/direktorat.pasma)



[direktorat.pasma](https://www.instagram.com/direktorat.pasma)



[direktorat.pasma](https://www.youtube.com/direktorat.pasma)

TIM PENYUSUN

**PROGRAM KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2019**

Diterbitkan

**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pengarah

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Penanggung Jawab

Suhadi, S.Pd, MT

Koordinator dan Editor

Suharlan, SH, MM
Dra. Hastuti Mustikaningsih, MM
Dr. Juandanilsyah
Dr. Rakhmat Rakhmawan S, S.Pd, M.M

Tim Penyusun

1. Dra. Augustin Wardhani
2. Drs. Agus Salim
3. Jim Bar Pen, SH
4. Nurul Mahfudi, ST
5. Wiwiet Heriyanto, SP, MT
6. Uce Veriyanti, SE
7. Tin Suryani, S.Kom, ME
8. Muhammad Adji SN, ME

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyajikan Buku

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2019 buku ini memuat berbagai kebijakan, rencana strategis, organisasi dan tata kerja, serta program dan anggaran yang dikelola di lingkungan Direktorat

Pembinaan SMA.

Visi dan Misi Direktorat Pendidikan SMA diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan SMA, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi siswa kurang beruntung untuk mendapat layanan pendidikan bermutu. Usaha dan kerja keras tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan bertahap melalui peningkatan kualitas layanan sekolah yang akan ditempuh, antara lain: (1) penyediaan prasarana pembelajaran melalui Unit Sekolah Baru (USB), serta meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA dan meningkatkan kualitas sarana mutu melalui Peralatan TIK, Program Indonesia Pintar (PIP), Sekolah Terbuka yang mendapatkan Bantuan Operasional dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pengembangan kurikulum; (3) pengembangan karakter dan kreatifitas siswa melalui kompetisi keilmuan nasional-internasional, serta kompetisi olahraga dan seni.

Buku Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2019 ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan kerja pelaksanaan program-program SMA, sekaligus menjadi salah satu bahan masukan bagi mitra kerja kami diantaranya LPMP, Dinas

pendidikan provinsi, sekolah, dan instansi lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan SMA. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Buku Program Kerja dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Januari 2019

Direktur,



Purwadi Sutanto

NIP. 19610404 198503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI	4
D. ORGANISASI PELAKSANA	6
1. SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI	7
2. SUBDIT KURIKULUM	8
3. SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA.....	8
4. SUBDIT PESERTA DIDIK.....	9
5. SUB BAGIAN TATA USAHA.....	10
E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	10
F. ISU ISU STRATEGIS	12
BAB II	15
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2015-2019.....	15
BAB III.....	33
BAB IV	40
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2019.....	40
A. RENCANA DAN ANGGARAN SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI.....	40
1. STRUKTUR ORGANISASI.....	40
2. PROFIL ANGGARAN TAHUN 2019	40
B. RENCANA DAN ANGGARAN SUBDIT KURIKULUM	74
1. STRUKTUR ORGANISASI.....	74
2. PROFIL ANGGARAN TAHUN 2019	74
3. RENCANA KERJA SUBDIREKTORAT KURIKULUM TAHUN 2019.....	75
C. RENCANA DAN ANGGARAN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	91
1. STRUKTUR ORGANISASI.....	91
2. PROFIL ANGGARAN TAHUN 2019	91
1. UNIT SEKOLAH BARU YANG DIBANGUN (5627.002).....	93
2. SEKOLAH YANG DIRENOVASI (5627.007).....	98
3. SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) (5627.018).....	105

4. SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PERALATAN PENDIDIKAN (5627.020).....	110
5. SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PROGRAM UKS (5627.022).....	113
6. SEKOLAH TERBUKA YANG MENDAPATKAN BANTUAN OPERASIONAL (5627.025).....	115
D. RENCANA DAN ANGGARAN SUBDIT PESERTA DIDIK.....	117
1. STRUKTUR ORGANISASI.....	117
2. PROFIL ANGGARAN TAHUN 2019	117
E. RENCANA DAN ANGGARAN SUBBAG TATA USAHA	142
1. STRUKTUR ORGANISASI.....	142
2. PROFIL ANGGARAN TAHUN 2018	142
3. RENCANA KERJA SUBBAG TATA USAHA TAHUN 2019	142
BAB IV	158
PENUTUP.....	158



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Mengacu pada Visi Pendidikan Nasional 2025, yaitu "Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif" atau Insan Kamil/Paripurna, maka tema pembangunan pendidikan periode 2015-2019 difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif di tingkat regional.

Strategi dan kebijakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diwujudkan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis kondisi pendidikan nasional telah ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong"

Berdasarkan Visi Kemdikbud tersebut, maka disusun Indikator Kegiatan Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019, Target Kinerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2010-2014. Dalam pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan pendidikan SMA, Direktorat Pembinaan SMA selalu mengacu pada usaha untuk mencapai Target Kinerja Pembangunan Pendidikan SMA dan meningkatkan kinerja melalui pencapaian target IKK Direktorat Pembinaan SMA.

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2019 memberikan gambaran tentang deskripsi program-program pembangunan pendidikan SMA dalam usaha untuk mencapai Target Kinerja Pembangunan Pendidikan SMA dan target IKK Direktorat Pembinaan SMA.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Buku Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 22 Maret 2018, Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2006, Tentang Pembinaan Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Cerdas;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008, Tentang Pembinaan Kesiswaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Renstra Kemdikbud Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara Atau Lembaga.

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019, Tentang Penguatan Karakter Disatuan Pendidikan.
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
25. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019;
26. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas tahun 2015-2019;
27. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA nomor SP DIPA-023.03.1.419514/2018 tanggal 5 Desember 2018.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka mencapai target program prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara umum, tugas dari Direktorat Pembinaan SMA adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

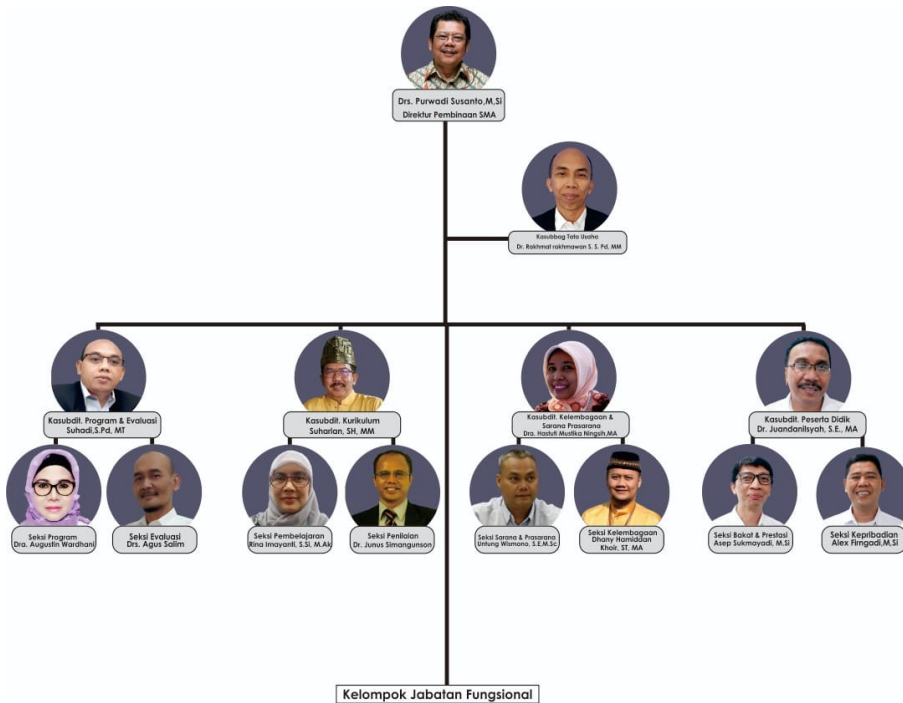
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan
2. di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
3. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
4. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
5. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah atas;
6. Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
7. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah atas;
8. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
9. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;

10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas; dan
11. Pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan SMA.

D. ORGANISASI PELAKSANA

Secara organisasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas 4 (empat) sub direktorat, 8 (delapan) seksi dan dan 1 (satu) sub bagian. Rincian detail organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA

1. Subdit Program dan Evaluasi

Subdit program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran

serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat. Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. **Seksi Program** mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas.
- b. **Seksi Evaluasi** mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas, penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas, dan penyusunan laporan Direktorat.

2. Subdit Kurikulum

Subdit Kurikulum mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum sekolah menengah atas. Sub Direktorat Kurikulum terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. **Seksi Pembelajaran** mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran sekolah menengah atas.
- b. **Seksi Penilaian** mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang penilaian sekolah menengah atas.

3. Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana dan prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas. Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. **Seksi Kelembagaan** mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola sekolah menengah atas.
- b. **Seksi Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana menengah atas.

4. Subdit Peserta Didik

Subdit Peserta Didik mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi dibidang peserta didik sekolah menengah atas. Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik sekolah menengah atas.

b. Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepribadian peserta didik sekolah menengah atas.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Direktorat Pembinaan SMA mempunyai 18 Indikator Kinerja (IKK). Dari 16 Indikator kinerja, 1 Indikator Kinerja yang tidak dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA yaitu IKK Jumlah siswa SMA penerima BOS SM, karena sudah langsung transfer ke daerah dari kementerian Keuangan Kepada 34 Provinsi melalui DAK non fisik. Sedangkan 16 IKK dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan 34 Provinsi melalui dana Dekonsentrasi. Capaian IKK yang telah dilaksanakan adalah 10 indikator kinerja yang telah melampaui target, 7 indikator kinerja yang tercapai 100%. Tabel di bawah ini menunjukkan Pencapaian Target IKK Dit. PSMA tahun 2018.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja 2018			
		Target Kinerja		Realisasi	%
SK 3.5627.1	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota				
IKK 3.5627.2	Jumlah RKB SMA yang dibangun	Ruang	1,624	1,728	105,79%
IKK 3.5627.3	Jumlah unit SMA baru yang dibangun	Unit	18	20	111,1%
IKK 3.5627.4	Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA	Unit	1,756	1,804	102,7%
IKK 3. 5627.5	Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA	Paket	3,741	3,749	100,2%
IKK 3.5627.6	Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA	Paket	2,432	2,432	100,0%
IKK 3.5627.7	Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah	Sekolah	8,012	8,012	100%
IKK 3.5627.8	Jumlah bahan ajar SMA yang disusun	Modul	19	25	132%
IKK 3. 5627.9	Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaian pendidikan	Sekolah	13.353	13.775	103.2%
IKK 3. 10	Jumlah SMA Rujukan	Sekolah	650	650	100,0%

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja 2018			
		Target Kinerja		Realisasi	%
IKK 3. 11	Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan	Sekolah	204	204	100,0%
IKK 3. 12	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	Bidang	3,346	3,346	111.70%
IKK 3. 13	Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa	Siswa	3,078	3,089	100,4%
IKK 3. 14	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan pendidikan karakter	Sekolah	5,000	5,000	100,0%
IKK 3.5627.15	Jumlah SMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	3,337	3,602	107,9%
IKK 3.5627.16	Program UKS dan Sanitasi sekolah (Jumlah sekolah yang melaksanakan UK dan sanitasi sekolah)	Sekolah	285	285	100 %
SK 3.5627.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin				
IKK 3.5627.2.1	Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP	Sekolah	1,367,559	1,561,7021	110,9%
SK 3.5627.3	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Direktorat SMA				
IKK 3.5627.3.1	Jumlah Satker yang Mendapat Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis SMA	Satker	35	35	100,0%

Hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor penunjang ataupun pendukung keberhasilan yang berperan dalam ketercapaian program. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

- a. Penjadwalan pogram kerja (proker) yang akan dilaksanakan di tahun 2018 sebagai acuan subdit-subdit dalam pelaksanaan kegiatan. Meskipun terdapat perubahan alokasi dipa dipertengahan tahun, Direktorat PSMA segera melaksanakan

evaluasi dan melaksanakan penjadwalan revisi agar tidak mengganggu kinerja.

- b. Penyusunan Lokus bantuan sosial dan bantuan pemerintah, yang bersumber dari Dapodikmen dan Pemangku Kepentingan yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMA.
- c. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program 2018 selalu berkoordinasi secara berkala baik dengan satker-satker pusat maupun satker provinsi, serta melakukan supervisi dan monitoring terhadap program yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan dan perbaikan program-program Direktorat Pembinaan SMA di tahun yang akan datang.

F. ISU ISU STRATEGIS

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2019 menunjukkan keberhasilan yang nyata, namun masih terdapat banyak permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015- 2019. Analisis lingkungan strategis dibutuhkan untuk menggambarkan berbagai isu isu strategis di lingkungan pendidikan SMA yang patut diperhatikan sebagai acuan dalam pembangunan pendidikan SMA, Yaitu :

1. Akses daya Tampung;
2. Kerusakan sarana belajar;
3. Kekurangan peralatan pendidikan;
4. Biaya pendidikan tinggi;
5. Mutu pembelajaran belum maksimal dan merata, bahan ajar dan guru;
6. Pendidikan SMA belum bias bersaing secara global;
7. Disparitas pendidikan antar daerah;
8. Peningkatan karakter/pencegahan kekerasan
9. Pemerataan kualitas pendidikan melalui sistem pendidikan zonasi

10. Penguatan sistem perbukuan dan penguatan literasi



BAB II

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2015-2019

Pembangunan pendidikan saat ini dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Paripurna), Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Untuk mewujudkan fokus pembangunan pendidikan tersebut, maka didalam RPJMN Periode ke III Tahun 2015-2019 telah ditetapkan prioritas dan program aksi pembangunan pendidikan nasional, yakni: Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya

keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Dengan mengacu kepada Nawa Cita, memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 - 2019 adalah :

**“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan
Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong
Royong”**

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2015 - 2019, maka ditetapkan 5 (lima) Misi yang merupakan rumusan umum dari upaya-upaya pencapaiannya. Misi tersebut adalah:

- M1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
- M2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
- M3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
- M4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
- M5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan

siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;

2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; serta d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk di antaranya budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah,

mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional serta mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien. Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Penerapannya terintegrasi pada pengelolaan pendidikan yang mencakup tujuh jalan revolusi mental, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani wargasekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Sejalan dengan semangat integrasi antara unit kerja di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Pembinaan SMA.

A. SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Direktorat Pembinaan SMA menyusun arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan pencapaian sasaran strategis Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:
 - a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5).
 - b. Peningkatan ketersediaan SMA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap.
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:
 - a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - b. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:
 - a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5), melalui:
 - 1) Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan SMA yang berkualitas.
 - 2) Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.

- 3) Penguatan kompetensi keahlian di SMA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
- b. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan (Nawacita 5) melalui:
- 1) Penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah.
 - 2) Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta.
- c. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya (Nawacita 5) melalui:
- 1) Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
 - 2) Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - 3) Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - 4) Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - 5) Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - 6) Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;

- 7) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - 8) Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - 9) Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender;
 - 10) Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
- d. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel (Nawacita.5) melalui:
- 1) Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - 2) Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - 3) Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - 4) Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - 5) Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;

- 6) Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; serta Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.
- e. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah (Nawacita 8) untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen), melalui:
- 1) Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), Bahasa Indonesia;
 - 2) Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran,
 - 3) Peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
 - 4) pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;
 - 5) penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

- f. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi (Nawacita 8), melalui:
- 1) Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (excessive consumption) tidak baik;
 - 2) Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi dengan sebutan populer Do It Yourself (DIY).
- g. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi (Nawacita 8) melalui:
- 1) Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
 - 2) Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap kejadian (randomness nature of event) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (calculated risk) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi.
 - 3) Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.
- h. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan SMA dicirikan dengan: Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita 5), melalui:

- 1) Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler.
- g. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan SMA dicirikan dengan: Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita 5), melalui:
- 1) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.
 - 2) Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang.
- h. Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan akuntabilitas tata kelola pendidikan SMA dicirikan dengan:
- 1) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5), melalui:
 - a) Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/ madrasah baru.
 - b) Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah.

- 2) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan (Nawacita 5), melalui: Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
- i. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, (Nawacita 5), melalui:
 - 1) Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
 - 2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau multisubject teaching;
- j. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Nawacita 2), melalui Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi.

B. INDIKATOR KINERJA

Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan misi tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA menetapkan pentahapan untuk mencapai misi tersebut melalui target kinerja. Berikut ini adalah target kinerja Direktorat Pembinaan SMA yang Mendukung Target Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah secara lebih rinci:

Tabel 2.1. Target IKP Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2015 –2019

IKP	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan					

IKP		TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
IKP 1	APK SMA/SMK/SMLB (%)	75.82	76.68	79.08	80.51	82.18
IKP 2	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah	76.6	82.5	88.3	94.2	100.0
Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan						
IKP 3	Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	1.367.559	1.367.559	1.367.559	1.367.559	1.367.559
IKP 4	Angka siswa putus sekolah SMA (%)	1.2%	1.1%	1.0%	0.9%	0.8%
Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan						
IKP 5	SMA memenuhi akreditasi minimal B	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0
IKP 6	Persentase Kabupaten/Kota memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	29.4	49.9	70.5	90.0	100.0
IKP 7	Rata-rata nilai sikap siswa SMA/SMLB minimal baik (pendidikan karakter)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
IKP 8	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan menengah	70	74	76	80	84
Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan						
IKP 9	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan						
IKP 10	Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA dan SMK (%)	81.5	82.0	84.0	86.0	88.0
Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan akuntabilitas tata kelola pendidikan						
IKP 11	Data pendidikan SMA akurat, berkelanjutan, dan terbaru	85.0	87.0	89.0	92.0	95.0

1. Indikator kinerja kegiatan

Untuk mengukur ketercapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini ditujukan untuk mengukur ketercapaian dari Target Kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Berikut ini adalah IKK Direktorat Pembinaan SMA secara lebih rinci.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2015-2019

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Sasaran	Target 2015 -2019				
			2015	2016	2017	2018	2019
SK 3.5627.1	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota						
IKK 3.5627.1.1	Jumlah siswa SMA penerima BOS SM	Siswa	4.312.407	4.459.072	4.563.345	4.592.928	4.714.841
IKK 3.5627.1.2	Jumlah RKB SMA yang dibangun	Ruang	1.514	3.028	3.028	3.028	3.028
IKK 3.5627.1.3	Jumlah unit SMA baru yang dibangun	Sekolah	60	103	103	103	103
IKK 3.5627.1.4	Pembangunan prasarana pembelajaran SMA	Sekolah	66	2.557	2.061	1.547	1.032
IKK 3.5627.1.5	Rehabilitasi ruang pembelajaran SMA	Paket	131	1.600	5.271	2.958	2.958
IKK 3.5627.1.6	Pengadaan sarana pembelajaran SMA	Paket	200	1.051	3.099	7.302	8.570
IKK 3.5627.1.7	Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Sekolah	12.704	13.459	13.494	13.597	13.700
IKK 3.5627.1.8	Jumlah bahan ajar SMA yang disusun	Bahan ajar	16	17	18	19	21
IKK 3.5627.1.9	Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaian pendidikan	Sekolah	2.251	4.852	9.652	13.353	13.700
IKK 3.5627.1.10	Jumlah SMA rujukan	Sekolah	121	614	614	614	614
IKK 3.5627.1.11	Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan	Sekolah	-	204	204	204	204
IKK 3.5627.1.12	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat,dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	siswa	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094
IKK 3.5627.1.13	Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa	Siswa	10.757	2.942	2.942	2.942	2.942
IKK 3.5627.1.14	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan pendidikan karakter	Sekolah	12.704	13.459	13.494	13.597	13.700
IKK 3.5627.1.15	Jumlah SMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	2.251	4.852	8.012	13.597	13.700

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Sasaran	Target 2015 -2019				
			2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.5627.1.16	Program UKS dan Sanitasi Sekolah (jumlah sekolah yang melaksanakan UK dan Sanitasi Sekolah)	sekolah	-	-	-	285	285
SK .3.5627.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin						
IKK.3.5627.2.1	Jumlah siswa SMA penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Siswa	1.367.559	1.367.559	1.367.559	1.367.559	1.367.559
SK .3.5627.3	Menguatnya Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di SMA						
IKK.3.5627.3.1	Jumlah Satker yang Mendapat Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis SMA	Layanan	35	35	35	35	35

C. Strategi Pembiayaan

Alokasi anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.169.011.490.000, Dari total alokasi anggaran tersebut, dialokasikan anggaran untuk dana dekonsentrasi SMA sebesar Rp.92,062,165,000, Dana dekonsentrasi dikelola oleh Dinas Pendidikan di 34 Provinsi. Struktur anggaran Direktorat Pembinaan SMA cukup banyak terkonsentrasi pada pemberian bantuan ke sekolah. Bantuan yang diberikan terdiri dari akun Belanja Sosial dan Belanja Barang dalam bentuk Bantuan Pemerintah. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai struktur anggaran Direktorat Pembinaan SMA pada Tahun 2019 secara lebih rinci.

Tabel 3.1. Alokasi Anggaran 2019 Per Kegiatan

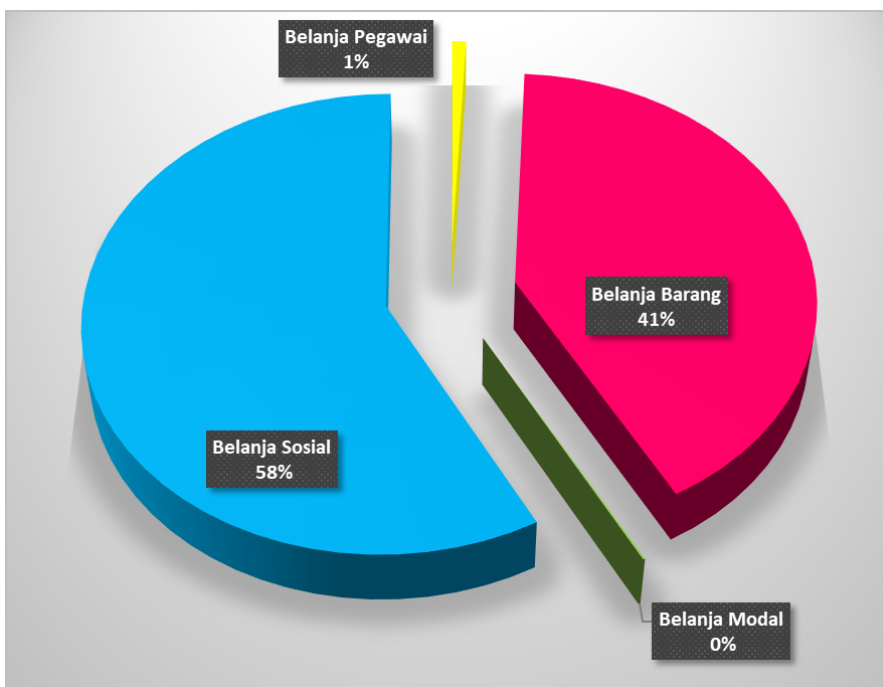
NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SASARAN		ALOKASI
		VOL	SAT	
	Pusat			2.169.011.490.000
5627.013	Sekolah yang mendapatkan pembinaan	650	Sekolah	74,582,665,000
5627.018	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	13,570	Sekolah	11,916,938,000
5627.019	Sekolah yang menerapkan kurikulum dan model pembelajaran yang berlaku	13,570	Sekolah	47,073,623,000
5627.023	Sekolah Yang Mendapatkan Program Keterampilan/Kewirausahaan	204	Sekolah	27,421,282,000
5627.002	Unit Sekolah Baru yang dibangun	8	Unit	38,861,054,000
5627.007	Sekolah yang direnovasi	100	Paket	54,350,824,000
5627.020	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	2,152	Paket	437,319,124,000
5627.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3	Layanan	50,156,269,000
5627.001	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	1,367,559	Siswa	1,196,154,909,000
5627.014	Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	5,272	Siswa	23,798,365,000
5627.015	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	3,078	Siswa	10,928,040,000
5627.016	Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	3344	Siswa	47,999,539,000
5627.022	Sekolah yang melaksanakan Program UKS	400	Sekolah	5,799,881,000
5627.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	3,947,360,000
5627.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	22,236,659,000
	Dekonsentrasi			92,062,165,000
5627	PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS			2,169,011,490,000

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran 2019 Per Jenis Belanja

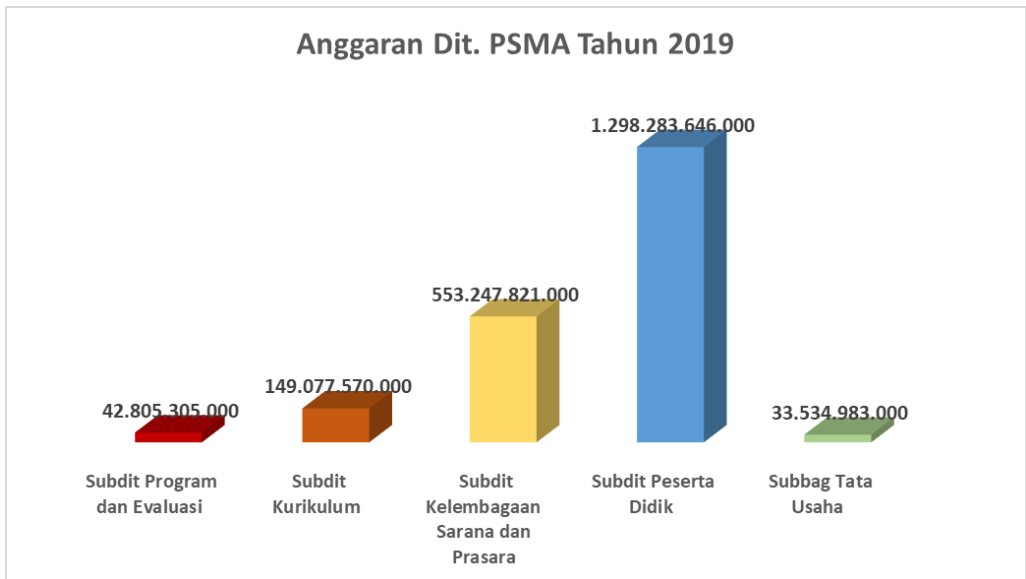
No	Jenis Belanja	Alokasi (000)
	Pusat	2,076,949,325
1	Belanja Pegawai	16,899,611
2	Belanja Barang	854,856,449
3	Belanja Modal	2,119,765
4	Belanja Sosial	1,203,073,500

Dekonsentrasi		92,062,165
1	Belanja Barang	92,062,165
Total Anggaran		2,169,011,490

Grafik 3.1 Persentase Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja



**Grafik 3.3 Distribusi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA
Tahun 2019**





**Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMA
2019**

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2019

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015—2019, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbud pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015—2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud 2015—2019 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2015—2019, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kemendikbud memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Kemendikbud, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga dituangkan dalam kerangka regulasi Kemendikbud 2015—2019. Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai

sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kemendikbud 2015—2019 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

A. SASARAN PRIORITAS NASIONAL

1. Rencana Kerja Direktorat Pembinaan SMA

Secara umum, tugas dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dalam memenuhi sasaran prioritas nasional adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang Sekolah Menengah Atas. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan SMA telah menyusun program pembangunan pendidikan SMA yang ditujukan untuk dapat mencapai target IKK Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 Direktorat Pembinaan SMA telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2,169,011,490,000,- yang terdiri dari alokasi pusat sebesar Rp. 2,076,949,325,000,- dan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 92,062,165,000,-. Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk dapat mendukung program Direktorat Pembinaan SMA dalam mencapai target IKK Tahun 2019. Berdasarkan alokasi anggaran yang dikelola secara langsung oleh Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp. 2,169,011,490,000,- maka disusunlah rencana tindak (*action plan*) dalam pelaksanaan program Tahun 2019. Berikut ini adalah struktur anggaran dan rencana penyerapan anggaran Direktorat Pembinaan SMA secara lebih detail yang telah tertuang dalam Penetapan Kinerja 2019.

**D. Tabel 4.1 Penetapan Kinerja Direktorat Pembinaan SMA
Tahun 2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja 2019	
SK 3.1	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota			
	IKK 3.3	Jumlah unit SMA baru yang dibangun	8	Unit
	IKK 3.5	Sekolah yang di Renovasi	100	Paket
	IKK 3.6	Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA	2,152	Paket
	IKK 3.7	Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah	13,570	Sekolah
	IKK 3.8	Jumlah bahan ajar SMA yang disusun	19	Modul
	IKK 3.9	Jumlah SMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	13,570	Sekolah
	IKK 3.10	Jumlah SMA Rujukan	650	Sekolah
	IKK 3.11	Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan	204	Sekolah
	IKK 3.12	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	3,344	Siswa
	IKK 3.13	Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa	3,078	Siswa
	IKK 3.14	Jumlah Siswa SMA yang menerapkan pendidikan karakter	5,272	Siswa
SK 3.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin			
	IKK 3.15	Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP	1,367,559	Siswa
SK 3.3	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Direktorat SMA			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja 2019	
	IKK 3.16	Jumlah Satker yang Mendapat Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis SMA	35	Satker

2.Sasaran Prioritas Kementerian/Lembaga

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kemdikbud melalui Direktorat Pembinaan SMA bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran prioritas Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Arah pembangunan dalam RPJMN 2015—2019 ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Perekonomian Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas iptek yang relatif rendah menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh manusia yang berkualitas, dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan tingkat pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional ke depan. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam lima tahun ke depan

dan kondisi lingkungan strategis. Permasalahan pokok bangsa yang mendasar dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lunturnya budaya menghormati keragaman memupuk munculnya sikap-sikap permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan di masyarakat yang diperburuk dengan tergerusnya karakter bangsa akibat kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan dunia tanpa batas yang merupakan ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Adapun tantangan utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam ke depan ialah:

(i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah;

(ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif. Tantangan dalam peningkatan kualitas insan Indonesia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

1. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan;

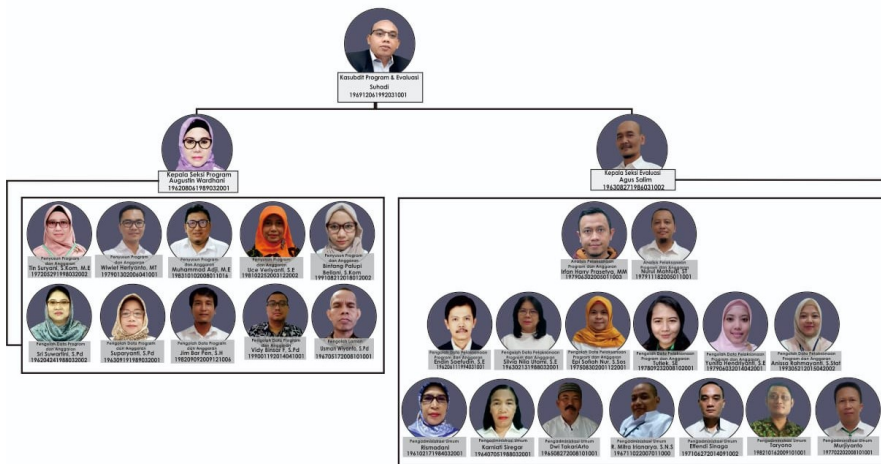
2. Tantangan dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antardaerah dan diplomasi budaya antarnegara; serta meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN
SMA TAHUN 2019

Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran dan program Direktorat Pembinaan SMA tersebut dilaksanakan oleh setiap Subdit dan Subbag sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Berikut ini adalah deskripsi program-program Direktorat Pembinaan SMA per Subdit maupun per Subbag secara lebih rinci.

A. RENCANA DAN ANGGARANSUBDIT PROGRAM DANEVALUASI

1. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Subdit Program dan Evaluasi

2. Profil Anggaran Tahun 2019

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat.

Anggaran di Subdit Program dan Evaluasi di tahun 2019 sebesar Rp 42.805.305.000. Proses perencanaan program Pendidikan Sekolah Menengah Atas berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan melibatkan instansi/Kementerian lainnya dalam proses perencanaan program. Beberapa instansi tersebut adalah Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Alur proses perencanaan itu sendiri ditentukan dan diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan DPR dan pemerintah. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan program/kegiatan pembinaan SMA untuk tahun anggaran tahun 2019 baik di pusat maupun anggaran di provinsi.



3. Rencana Kerja Subdit Program dan Evaluasi tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) tugas pokok yang akan dilaksanakan oleh Subdirektorat Program dan Evaluasi yaitu diantaranya:

1. melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Layanan Manajemen Satker (5627.970).



Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a) Penajaman Renstra Direktorat PSMA

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Renstra 2015-2019. Untuk mengetahui ketercapaian terhadap Sasaran Strategis, IKU dan IKK pada periode ini (2015-2019) dibutuhkan review ketercapaian yang akan menjadi acuan dalam Program dan kegiatan Dit. PSMA pada periode renstra 2020-2024. Kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor dengan melibatkan pegawai Dit. PSMA dan berbagai pihak yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan tujuan diadakannya kegiatan ini. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 30 Orang. Kegiatan akan dilakukan sebanyak 2 tahap. Pada tahap pertama, akan dilakukan analisis terhadap pencapaian renstra 2015 – 2019. Selain itu akan diidentifikasi berbagai kendala dan masalah yang menghambat pencapaian renstra 2015-2019. Hasil analisis yang diperoleh akan dijadikan bahan materi pada kegiatan tahap kedua. Pada kegiatan tahap kedua, akan disusun draft renstra 2019-2024. Penyusunan draft renstra tersebut akan menyesuaikan dengan renstra Kemendikbud 2020 – 2024.

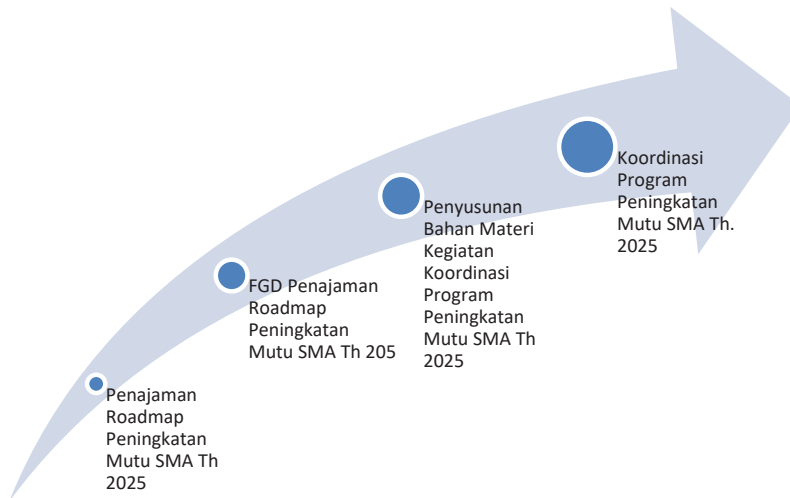
b) Penajaman Roadmap Peningkatan Mutu SMA Tahun 2025

Roadmap Peningkatan Mutu SMA Tahun 2025 merupakan dokumen yang dikembangkan dari renstra Direktorat Pembinaan SMA. Roadmap berisi capaian teknis dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan di dalam renstra Direktorat Pembinaan SMA maupun renstra Kemendikbud. Roadmap Dit. PSMA berisi kondisi baseline yang dijadikan dasar penetapan program, target yang akan dicapai pada tahun 2025, dan berbagai program terkait pemerataan akses, peningkatan mutu, dan tata kelola SMA. Roadmap ini menjadi panduan bagi penyusun kebijakan baik

pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan program setiap tahunnya. Roadmap peningkatan mutu SMA Tahun 2025 merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penajaman terhadap dokumen roadmap yang telah disusun pada tahun 2019, persiapan bahan koordinasi roadmap dengan dinas pendidikan provinsi, dan koordinasi roadmap dengan pihak provinsi.

Penajaman roadmap akan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis hasil penyusunan draft roadmap yang telah dilakukan oleh provinsi pada tahun 2018. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai bahan untuk merevisi dokumen roadmap yang telah disusun. Dokumen roadmap yang telah direvisi kemudian digunakan sebagai bahan dalam FGD yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Melalui FGD ini, Direktorat Pembinaan SMA mengundang berbagai unsur yang terlibat mulai dari PDSPK, Setditjen Dikdasmen, Perguruan Tinggi, dan Biro PKLN. Output yang ingin dicapai adalah Direktorat Pembinaan SMA memperoleh masukan dari seluruh peserta yang hadir sehingga kualitas dan kesesuaian dokumen roadmap dapat ditingkatkan. Dokumen roadmap yang telah melalui proses revisi dan FGD tersebut kemudian menjadi salah satu bahan materi yang dibawa petugas Direktorat Pembinaan SMA ke Dinas Pendidikan Provinsi. Langkah selanjutnya adalah penyusunan bahan materi yang akan disampaikan oleh petugas pada saat koordinasi roadmap peningkatan mutu SMA di seluruh provinsi. Para petugas tersebut akan menjelaskan dan berdiskusi dengan seluruh pihak di provinsi terkait roadmap ini. Pada saat koordinasi dengan pihak provinsi, terdapat beberapa buku yang akan diberikan sebagai salah satu bahan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan roadmap. Terdapat empat judul buku yang akan dibagikan saat koordinasi peningkatan mutu SMA Th 2025 dengan provinsi yakni buku

identifitas SMA tahun 2019, buku saku data pendidikan SMA tahun 2019, buku statistik Dit. PSMA tahun 2019, dan buku cerita bacaan. Secara umum gambaran rangkaian pelaksanaan roadmap sebagai berikut:



c) Pelaksanaan penyusunan action plan program dekonsentrasi SMA

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau (action plan) program dekonsentrasi SMA Tahun 2019. Hal ini untuk dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara action plan pusat dan dinas pendidikan provinsi. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sasaran kegiatan/program tahun 2019 yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara baik, sinkron, dan *komprehensif* sehingga mencapai hasil yang diharapkan dan sesuai dengan program kerja Direktorat Pembinaan SMA. Kegiatan ini akan mengundang PPK, BPP, dan Staf teknis Dekonsentrasi di masing-masing Provinsi. Total peserta pada kegiatan ini adalah

102 peserta dari provinsi, dan sejumlah narasumber serta panitia dari Direktorat Pembinaan SMA. Hasil dari kegiatan ini akan diolah dan dianalisis sehingga mengeluarkan informasi dan rekomendasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat.

d) Penyusunan Program Kerja Dit. PSMA

Penyusunan Program Kerja bertujuan untuk melakukan finalisasi dokumen yang berisi informasi program dan anggaran Dit. PSMA pada tahun 2019 dan menyusun draft program kerja Direktorat Pembinaan SMA tahun 2020. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah bagi Dit. PSMA untuk memberikan akses bagi para *stakeholder* untuk mengetahui berbagai program yang telah dikembangkan Dit. PSMA. Melalui keterbukaan akses tersebut, diharapkan sinkronisasi dengan semua *stakeholder* dapat dilakukan. Hasil dari finalisasi program kerja tahun 2019, berupa buku program kerja yang akan digandakan untuk dibagikan kepada seluruh stakeholder Direktorat Pembinaan SMA. Kegiatan akan dilaksanakan di luar kantor dan diikuti oleh pegawai di lingkungan Dit. PSMA.

Strategi pelaksanaan penyusunan program kerja dibagi menjadi dua tahap yakni finalisasi program kerja Dit. PSMA Tahun 2019 dan draft program kerja Dit. PSMA Tahun 2020. Masing-masing tahap akan terdiri dari 30 peserta yang terdiri dari perwakilan masing-masing subdit dan subbag di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.

Terkait finalisasi program kerja Dit. PSMA Tahun 2019, terdapat dokumen pendukung berupa action plan atau rencana tindak pada tingkat pusat. Action plan ini berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing subdit dan subbag di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. Penyusunan action plan ini melibatkan seluruh subdit dan subbag sehingga memerlukan koordinasi tersendiri. Berikut ini adalah strategi pelaksanaan penyusunan program kerja Direktorat Pembinaan SMA.

e) **Reviu rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) Program SMA Tahun 2020 (Pusat dan Dekonsentrasi)**

Pada tahun 2019, Direktorat Pembinaan SMA akan menyusun perencanaan program dan anggaran SMA untuk tahun 2020 baik pada tingkat pusat maupun dekonsentrasi. Hasil kegiatan tersebut berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) SMA Tahun 2020. RKA tersebut akan direviu kembali oleh pelaksana anggaran yang dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan SMA dan pengelola dekonsentrasi di tingkat provinsi serta inspektorat jenderal. Kegiatan reviu tersebut diperlukan agar dokumen rencana yang sudah disusun dapat sesuai dengan berbagai kebijakan dan program prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, kegiatan reviu ini akan melihat capaian kegiatan yang telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Terdapat 140 orang pada kegiatan ini yang terdiri dari peserta, narasumber, narasumber pembahas, moderator, dan panitia. Mekanisme kegiatan dimulai dari penyusunan bahan materi kegiatan dengan menyiapkan berbagai materi dan instrumen yang akan digunakan pada saat kegiatan. Selain itu, kegiatan tersebut dijadikan wadah koordinasi Direktorat Pembinaan SMA dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan Reviu RKA Tahun 2020. Hasil dari kegiatan reviu kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.

f) **Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020**

Kegiatan penyusunan program dan anggaran 2020 dilakukan agar pelaksanaan program di 2020 dapat optimal. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh subdit dan subbag di lingkungan Dit. PSMA serta Setiditjen Dikdasmen untuk menyelaraskan program dan anggaran dengan renstra serta program prioritas Kemdikbud. Kegiatan dilakukan sebanyak delapan tahap sesuai dengan

dinamika penganggaran untuk tahun 2020. Masing-masing tahap akan diikuti oleh 30 orang. Strategi pelaksanaannya akan dilakukan sebagai berikut

Pada subkomponen ini, terdapat kegiatan Rembuknas Kemendikbud. Pada dasarnya Rembuknas Kemendikbud merupakan suatu event dengan skala nasional membahas terkait program pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Peserta dari kegiatan ini perwakilan dari seluruh provinsi dan dihadiri pula oleh berbagai stakeholder dunia pendidikan dan kebudayaan. Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian dari salah satu unit kerja Kemendikbud memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pada subkomponen ini terdapat pembiayaan yang dapat memfasilitasi Direktorat Pembinaan SMA untuk berpartisipasi pada Rembuknas Kemendikbud. Tahun 2019, Rembuknas akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2019.

Selain kegiatan Rembuknas Kemendikbud, pada subkomponen ini terdapat Tim Pengembangan Mutu Program dan Penganggaran SMA. Tim ini akan berkoordinasi tidak hanya dengan seluruh subdit dan subbag di Lingkungan Direktorat Pembinaan SMA, melainkan juga unit kerja lain seperti Setditjen Dikdasmen, Biro PKLN, Direktorat Jenderal Anggaran, dan berbagai unit kerja lainnya yang memiliki relevansi dengan perencanaan program dan anggaran untuk tahun 2020. Selain itu, terdapat beberapa aplikasi yang harus diisi terkait perencanaan dan penganggaran yang dilakukan baik secara periodik maupun rutin setiap bulannya seperti *ePlanning*, *Krisna*, dan aplikasi *POK*. Melihat kebutuhan koordinasi dan skala prioritas yang penting dari penyusunan program dan anggaran, maka Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan honor tim ini untuk 30 orang dengan komposisi masing-masing 1 orang untuk pengarah, penanggung jawab, dan ketua serta 27

anggota tim. Tim inilah yang akan bertanggung jawab terhadap kelancaran penyusunan program dan anggaran Direktorat Pembinaan SMA.

g) Workshop Koordinasi Penyusunan Lokus Bantuan Dit. PSMA Tahun 2020

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu dari delapan (8) standar nasional pendidikan yang seharusnya dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Dit. PSMA selaku direktorat teknis yang menangani tingkat SMA, memiliki tanggung jawab untuk membantu satuan pendidikan memenuhi standar pendidikan terkait Sarana Prasarana. Pemenuhan sarana prasarana satuan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia industri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rencana yang dapat menentukan target dan langkah-langkah yang perlu diambil secara periodik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Lokus bantuan SMA tahun 2020 dan mensosialisasikannya kepada provinsi sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana prasarana di satuan pendidikan. Alur kegiatan diawali dengan penyusunan materi, pelaksanaan penyusunan lokus, dan pengolahan hasil kegiatan. Penyusunan materi dilakukan dengan menyusun instrumen, data, dan materi yang akan diberikan selama kegiatan berlangsung serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hasil yang diperoleh selama kegiatan workshop akan diolah dan dianalisis agar dapat dijadikan informasi dan rekomendasi bagi para stakeholder dan penyusunan kebijakan.

h) Diseminasi Program SMA Tahun 2019

Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi dan sinkronisasi program SMA antara pemerintah pusat dengan berbagai *stakeholder* seperti dinas pendidikan provinsi, perwakilan UPTD dan LPMP. Melalui kegiatan ini, para

stakeholder akan mengetahui berbagai program yang akan dilaksanakan selama tahun 2019 dan provinsi dapat menyesuaikan program di provinsi yang dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat. Diseminasi dilakukan agar pelaksanaan program SMA pada tahun 2019 dapat efektif dan efisien serta sinergis dengan para *stakeholder*. Kegiatan akan dilaksanakan diluar kantor dan akan dilaksanakan selama dua tahap dengan total peserta narasumber dan panitia sebanyak 330 orang. Setelah melakukan kegiatan Diseminasi Program SMA Tahun 2019, Dit. PSMA melakukan pengolahan terhadap hasil kegiatan tersebut. Pengolahan dilakukan dengan mengelompokan, menganalisis, dan menyajikan hasil kegiatan agar dapat digunakan dalam mengembangkan kebijakan di lingkungan Dit. PSMA. Berikut ini adalah strategi pelaksanaan kegiatan diseminasi.

- i) Review Juknis Bantuan Direktorat PSMA Tahun 2019 dan 2020
Kegiatan ini dilakukan agar juknis bantuan untuk tahun 2019 dan 2020 yang disusun oleh Dit. PSMA dapat digunakan sebagai pedoman yang tepat sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan ini melibatkan seluruh subdit di lingkungan Dit. PSMA yang mengeluarkan juknis bantuan. Review juknis bantuan Dit. PSMA Tahun 2019 dan 2020 akan melalui dua tahap yakni bentuk FGD. Pada tahap pertama, akan dilakukan review terhadap juknis bantuan yang akan digunakan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahap kedua akan dilakukan reviu terhadap juknis bantuan yang akan digunakan pada tahun 2020. Kegiatan dilakukan di luar kantor dengan melibatkan 30 orang peserta untuk FGD dan 30 orang untuk kegiatan review juknis bantuan Dit. PSMA.
- j) Sinkronisasi Program Dekonsentrasi SMA Tahun 2019
Program dekonsentrasi merupakan bentuk kerjasama yang nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam

pelaksanaannya, seringkali terjadi perubahan yang diakibatkan efisiensi anggaran, perubahan prioritas dan berbagai macam hal yang mungkin terjadi selama tahun anggaran berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut, Dit. PSMA mengadakan kegiatan dalam rangka optimalisasi program dekonsentrasi SMA Tahun 2019. Kegiatan ini dimulai dari penyusunan bahan materi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengolahan data hasil kegiatan. Penyusunan bahan materi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi bahan diskusi selama kegiatan serta menyiapkan berbagai format maupun RKA/KL yang akan digunakan. Pengolahan data dilakukan untuk mengelompokkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyajikan data hasil kegiatan sehingga menjadi *output* yang dapat digunakan di sisa tahun anggaran berjalan. Terdapat 149 orang yang akan mengikuti kegiatan ini. Jumlah tersebut terdiri dari peserta, narasumber, moderator, dan panitia. Strategi pelaksanaan sinkronisasi program Dekonsentrasi tahun 2019

k) Workshop Peningkatan Kualitas Data SMA Tahun 2019

Data merupakan salah satu dasar di dalam sebuah perencanaan. Data yang berkualitas dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Saat ini, di dalam penyusunan berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu mengacu pada Dapodik. Secara kuantitas, Dapodik dapat dikatakan berhasil karena seluruh data sekolah yang meliputi identitas, sarana prasarana, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, dan berbagai data lain yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan telah dimiliki oleh Kemdikbud. Namun, secara kualitas data SMA tetap harus ditingkatkan, khususnya pada aspek validitas, dan kesesuaian antara kondisi nyata dengan kondisi yang terdapat di dalam Dapodik. Validitas dan kesesuaian tersebut menjadi hal yang utama agar kebijakan dan program prioritas yang dikembangkan, menjadi tepat sasaran.

Melihat urgensi kualitas data dalam pengembangan kebijakan dan program prioritas, Dit. PSMA mengadakan kegiatan Peningkatan Kualitas Data SMA Tahun 2019 dengan mengundang sekolah-sekolah yang memiliki kualitas data yang tinggi di daerah 3 T dan daerah khusus lainnya. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan. Beberapa hal yang akan dikoordinasikan dengan sekolah tersebut adalah pertama, diharapkan sekolah-sekolah yang memiliki kualitas data baik tersebut dapat menularkan atau mengimbaskan ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Kedua, kualitas data dihitung berdasarkan kelengkapan pengisian field pada Dapodik. Direktorat Pembinaan SMA memerlukan koordinasi dengan SMA terkait untuk memastikan pengisian field tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila kelengkapan, kualitas, dan kesesuaian pengisian dapodik dengan kondisi nyata di lapangan sudah tercapai, proses perencanaan berbagai program Direktorat Pembinaan SMA dapat dilakukan dengan optimal. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Dapodik, dan juga PDSPK. Pelaksanaan kegiatan ini akan dibagi menjadi dua yakni pelaksanaan dan pengolahan data hasil kegiatan. Pelaksanaan workshop akan dilaksanakan dalam empat tahap.

1) Koordinasi Wilayah Satgas Dapodik SMA

Untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan capaian kuantitas data SMA pada tahun 2019, Dit. PSMA membentuk tim satgas data SMA yang terdiri dari Dit. PSMA, Tim Dapodik, PDSPK, dan operator yang menjadi koordinator di wilayahnya masing-masing. Diharapkan melalui tim Satgas data SMA, segala permasalahan terkait Dapodik yang terjadi di daerah dapat terfasilitasi dan diberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Sekolah-sekolah yang mengalami kendala

terhadap data di sekolahnya, dapat menghubungi tim satgas data SMA yang berada di sekitar wilayah sekolahnya berada.

Tim Satgas Data SMA memiliki koordinator di masing-masing wilayah. Direktorat Pembinaan SMA akan melakukan koordinasi dengan tim koordinator di masing-masing wilayah sebanyak dua kali. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk FGD. Pada Tahap pertama, koordinasi dilakukan untuk menyusun mekanisme seleksi tim satgas dan pedoman kerja tim satgas data SMA tahun 2019. Koordinasi kedua dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari koordinator di masing-masing wilayah.

2) Koordinasi Tim Satgas SMA Tahun 2019

Kegiatan koordinasi ini melibatkan Direktorat Pembinaan SMA dengan seluruh tim satgas SMA Tahun 2019. Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan sebanyak tiga tahap. Tahap pertama merupakan koordinasi awal terkait pengukuhan tim satgas, penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab tim satgas, dan mekanisme pelaksanaan tim satgas data SMA tahun 2019. Tahapan kedua dan ketiga merupakan evaluasi kinerja tim satgas pada semester pertama dan kedua. Ketiga koordinasi yang dilakukan merupakan upaya Direktorat Pembinaan SMA agar tim satgas data SMA tahun 2019 dapat bekerja optimal dalam melayani sekolah.

1) Pengolahan dan Pemuktahiran Data Pokok SMA

Kegiatan ini dilakukan oleh Dit. PSMA sebagai salah satu upaya dalam memanfaatkan data yang diperoleh dari Dapodik untuk digunakan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pendidikan. Data yang dimiliki oleh Dit. PSMA diperbaharui dan diolah agar dapat disajikan dalam pembuatan sebuah kebijakan atau program-program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan memperluas akses pendidikan. Kegiatan ini akan

dilaksanakan pada dua tahap di masing-masing tahun ajaran berjalan. Berikut ini adalah strategi pelaksanaan kegiatan.

Dalam mendukung tercapainya kualitas data yang dibutuhkan, Dit. PSMA membuat tim satgas Dapodik SMA yang terdiri dari unsur internal Dit. PSMA, Dapodik, PDSPK, dan Operator sekolah yang ditunjuk menjadi koordinator di wilayahnya masing-masing. Tim ini bertugas dalam menangani permasalahan dan kendala yang dihadapi setiap satuan pendidikan terkait data sekolah baik Dapodik maupun PDSPK. Diharapkan melalui tim ini, satuan pendidikan memperoleh kemudahan akses dan penanganan yang segera terhadap setiap kendala yang dihadapi. Susunan tim adalah sebagai berikut:

m) Pengelolaan Portal dan Database SMA

Penyajian data informasi layanan pendidikan berbasis internet yang dilakukan Direktorat Pembinaan SMA tidak lepas dari operasionalisasi atau pengelolaan portal/website Direktorat PSMA itu sendiri. Secara teknis, website atau portal tersebut harus terus dipelihara, dikembangkan, dan selalu diperbaharui (*up to date*).

Pemeliharaan portal dan jaringan yang dilakukan adalah untuk (a) menjaga koneksi (baik internet maupun intranet/jaringan) di Direktorat PSMA tetap terjaga, (b) memelihara dan mengembangkan Jaringan Intranet Dit. PSMA (c) mendukung layanan update konten web/portal Dit. PSMA sehingga valid dan tetap *up to date*.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, diperlukan tim pelaksana teknis yang secara simultan, dinamis dan berkesinambungan bekerja bersama-sama mengelola Portal dan publikasi Dit. PSMA. Kegiatan yang dilakukan Dit. PSMA dalam waktu satu tahun sangatlah banyak dan berada di berbagai lokasi di Indonesia. Melihat besarnya kuantitas kegiatan tersebut, diperlukan sebuah tim penulisan berita yang profesional dan memiliki

bidang jurnalis yang bertugas untuk meliput kegiatan-kegiatan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui website atau sosial media Dit. PSMA.

n) Review Layanan Informasi dan Publikasi SMA

Layanan informasi dan publikasi SMA dilakukan melalui berbagai media seperti website, media sosial, dan youtube. Setiap bulan Direktorat Pembinaan SMA akan melakukan review terhadap seluruh kegiatan dan konten yang akan dipublikasi. Kegiatan ini akan melibatkan 30 orang dari Direktorat Pembinaan SMA dan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat. Kegiatan akan dilaksanakan sebanyak 1 kali tiap bulan.

o) Penyusunan Lokus Bantuan Dit. PSMA

Lokus bantuan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam perencanaan program di tahun 2020. Melalui lokus tersebut, dapat ditentukan skala prioritas lokasi-lokasi yang memerlukan intervensi bantuan oleh pemerintah. Penyusunan lokus bantuan merupakan sebuah rangkaian dimulail dari penyusunan draft lokus bantuan oleh Direktorat pembinaan SMA berdasarkan data yang diperoleh dari Dapodik. Data kondisi sekolah yang diperoleh, diolah dan dianalisis untuk dijadikan bahan penyusunan lokus bantuan. Setelah lokus bantuan disusun, lokus tersebut disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi untuk kemudian diverifikasi dan validasi apakah lokus tersebut sudah sesuai atau belum. Jika terdapat perubahan, maka dinas pendidikan provinsi melakukan revisi dengan didampingi oleh Direktorat Pembinaan SMA, Setditjen Dikdasmen, dan PDSPK. Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian direviu kembali oleh Direktorat Pembinaan SMA dan pihak terkait untuk kemudian disahkan menjadi lokus bantuan 2020.

Komponen ini mengakomodir dua kegiatan terkait lokus bantuan yakni penyusunan draft lokus bantuan dan finalisasi lokus bantuan. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan setditjen

dikdasmen dan PDSPK.

p) Penyusunan Buku Statistik dan Bantuan SMA

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi bantuan Direktorat Pembinaan SMA dan angka data statistik terhadap penyaluran bantuan tersebut. Data statistik diperoleh dari Dapodik untuk diolah dan dinalisis untuk kemudian disajikan menjadi informasi bagi para stakeholder. Buku statistik disusun berdasarkan hasil olahan dan analisis data statistik serta hasil FGD yang dilakukan dengan pihak terkait yakni PDSPK dan Setditjen Dikdasmen. Terkait buku bantuan Direktorat Pembinaan SMA, terdapat 2 hasil yang diharapkan yakni finalisasi buku bantuan tahun 2018 dan draft buku bantuan tahun 2019. Finalisasi buku bantuan 2018 dilakukan dengan melihat penyaluran bantuan final mulai dari januari hingga desember 2018. Sedangkan draft buku bantuan 2019, melihat data penyaluran pada tahun berjalan. Kegiatan ini melibatkan seluruh subdit dan subbag di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA dan seluruh pihak yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan.

q) Penyusunan Juknis DAK SMA (Fisik dan Non Fisik)

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar, lembaga eksekutif dan legislatif harus mengalokasikan anggaran minimal 20% dari total APBN untuk pelaksanaan fungsi pendidikan. Salah satu bentuk implementasi dalam amanat tersebut, adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan dengan mekanisme Transfer Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. Selain itu, DAK juga merupakan salah satu wujud dari bentuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terkait dengan DAK Bidang Pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui program pemberian bantuan kepada sekolah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ataupun Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Untuk itu, maka pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Bantuan Operasional Sekolah dalam bentuk DAK Non Fisik dan Program pembangunan sarana dan prasarana sekolah dalam bentuk DAK Fisik.

Dana Alokasi Khusus ditransfer secara langsung dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan pengertian dari DAK, yakni untuk membiayai pemenuhan pelayanan dasar ataupun prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah, dimana salah satunya adalah pendidikan. Dalam pelaksanaan DAK, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menyusun kriteria, norma, dan standar dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Peraturan Menteri setiap tahunnya yang mengatur tentang pelaksanaan program DAK, diantaranya adalah Petunjuk Teknis BOS dan Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Dalam penyusunan Peraturan Menteri tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA berperan untuk menyusun dokumen yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMA. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis DAK Non Fisik (BOS SMA) maupun DAK Fisik SMA Tahun 2020.

Pelaksanaan penyusunan tersebut dilaksanakan sejak pertengahan Tahun 2019 ini. Penyusunan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan proses dan kaidah dalam penyusunan dokumen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mekanisme dalam proses penyusunan dilaksanakan dalam 2 jenis kegiatan yakni: Diskusi Terpumpun Pembahasan Petunjuk Teknis DAK SMA Tahun 2020 dan Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis DAK SMA Tahun 2020. Kegiatan Diskusi Terpumpun Pembahasan Petunjuk Teknis DAK SMA Tahun 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk mereview

kebijakan yang telah dilaksanakan di Tahun 2018/2019. Selanjutnya, hasil review tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan konsepsi kebijakan DAK Fisik maupun Non Fisik Tahun 2020. Pelaksanaan diskusi terpumpun juga diatur sedemikian rupa untuk dapat membahas dan merumuskan berbagai kebijakan jenjang SMA dalam rangka mendukung kebijakan umum kementerian, seperti: zonasi, peningkatan kualitas layanan pendidikan, peningkatan akses layanan pendidikan, dll. Untuk itu, maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan diskusi terpumpun sebanyak 6 kali (3 kegiatan untuk penyusunan Petunjuk Teknis BOS dan 3 kegiatan lainnya untuk penyusunan Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA).

Diskusi terpumpun sangat penting dilaksanakan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja dari program yang akan dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA akan mengundang berbagai instansi dan perwakilan sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan program BOS maupun DAK Fisik. Selain itu, masukan dari berbagai pihak juga dibutuhkan untuk menyempurnakan kebijakan program kedepan, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan ataupun potensi masalah yang akan terjadi di Tahun 2020 mendatang.

Setelah proses diskusi terpumpun, kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen Petunjuk Teknis ataupun Petunjuk Operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen tersebut sebagai tindaklanjut dari kegiatan diskusi terpumpun. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara internal di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.

r) Pengolahan Data BOS SMA

Alokasi dana BOS setiap sekolah didasarkan pada jumlah siswa yang memiliki NISN Valid dalam Dapodik dan telah melalui

proses dalam aplikasi Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD). Data individu persekolahan merupakan sesuatu yang dirasakan cukup krusial karena akan mempengaruhi besaran dana BOS yang akan diterima oleh sekolah. Penyaluran dana BOS (oleh Provinsi) didasarkan pada data *cut off* Dapodik yang telah ditetapkan. Pada tanggal-tanggal tertentu data dalam Dapodik akan diambil sebagai dasar dalam penyaluran oleh provinsi.

Terkait dengan *cut off*, maka Direktorat Pembinaan SMA berinisiasi untuk melakukan koordinasi dengan pengelola Dapodik (Setditjen Dikdasmen) dan pengelola aplikasi Verval PD (PDSPK). Perlu dilakukan koordinasi dengan kedua unit tersebut untuk memonitor perkembangan data persekolahan. Koordinasi yang dilakukan meliputi: pembahasan mengenai validitas data, pembahasan mekanisme percepatan peningkatan kualitas data peserta didik, dan pembahasan penyebaran informasi kepada provinsi agar dapat mendorong sekolah untuk memperbaiki data sekolahnya. Untuk itu, maka Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan FGD terkait dengan hal tersebut.

Setelah dilakukan *cut off* data, maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan pengolahan data hasil *cut off* Dapodik. Hal ini adalah satu implementasi dalam peran pusat (dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA) dalam melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran BOS SMA. Data hasil *cut off* menjadi tools untuk melakukan kontrol terhadap realisasi penyaluran oleh provinsi.

s) Pelaksanaan Diseminasi Program SMA tingkat Provinsi

Diseminasi program SMA Tingkat Provinsi merupakan salah satu kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh Provinsi melalui dana dekonsentrasi. Provinsi mengundang narasumber pusat yakni Direktorat Pembinaan SMA untuk menyampaikan berbagai program Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2020.

Selain itu materi yang disampaikan juga meliputi berbagai kebijakan serta hasil evaluasi pelaksanaan program Direktorat Pembinaan SMA tahun 2019. Diseminasi tingkat provinsi akan diikuti oleh berbagai stakeholder mulai dari seluruh kepala sekolah, lpmp, dan berbagai unsur lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan diseminasi program tingkat provinsi. Petugas Direktorat Pembinaan SMA yang akan menghadiri diseminasi ini terdiri dari masing-masing 2 orang per provinsi.

Pembiayaan kegiatan ini meliputi penyusunan bahan materi kegiatan, koordinasi pelaksanaan, pengiriman petugas, dan pengolahan data hasil diseminasi program SMA tingkat provinsi. Penyusunan bahan materi merupakan kegiatan untuk menyusun berbagai paparan, instrumen, dan data-data yang dibutuhkan. Berbagai hal tersebut disusun menjadi sebuah materi untuk disampaikan kepada seluruh peserta diseminasi program SMA tingkat provinsi. Koordinasi pelaksanaan dilakukan untuk membina para petugas yang akan dikirimkan ke provinsi. Pembinaan dilakukan dengan pemberian materi, pemberian kesempatan bagi calon petugas untuk mempresentasikan kembali materi yang sudah didapat, kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh pimpinan dan penanggung jawab kegiatan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penentu dalam mengirimkan petugas ke provinsi. Pengiriman petugas dilakukan sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh provinsi. Hasil yang dibawa oleh petugas akan diolah dan dianalisis untuk dijadikan rekomendasi dan informasi bagi para stakeholder terkait.

t) Workshop koordinasi pelaksanaan BOS 2019

Workshop ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama bertujuan untuk mensosialisasikan petunjuk teknis penggunaan dana BOS 2019, mengevaluasi hasil cut off pertama, dan berkoordinasi dengan tim manajemen BOS provinsi. Melalui

kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan dan keselarasan pemahaman pelaksanaan program BOS antara pusat dan provinsi. Selain itu, diharapkan kualitas data hasil cut off dapat meningkat sesuai dengan kondisi real di sekolah. Tahap kedua bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan BOS SMA selama tahun berjalan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan atau kendala yang muncul selama program BOS berjalan.

u) Pengelolaan dan Pengolahan DAK Fisik SMA

Dalam pelaksanaan DAK, kementerian teknis juga bertanggungjawab atas capaian yang dihasilkan dari program DAK. DAK Bidang Pendidikan merupakan program yang ditujukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kemendikbud sesuai dengan perannya dalam pengelolaan pendidikan juga harus berupaya untuk memenuhi hal tersebut. Untuk itu, maka Kemdikbud juga harus memastikan efektifitas dalam pelaksanaan DAK agar seluruh target output dapat tercapai seluruhnya.

Terkait dengan DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA juga harus memantau keterlaksanaan program DAK Fisik SMA tersebut. Untuk dapat memantau keterlaksanaan program DAK Fisik Subbidang SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA memerlukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan DAK Fisik SMA. Kegiatan ini juga termasuk dalam proses perencanaan DAK Fisik Subbidang SMA. Kegiatan pengelolaan dan pengolahan DAK SMA meliputi:

1) FGD Analisis Kebijakan DAK Fisik Subbidang SMA

Kegiatan ini akan membahas terkait dengan beberapa hal teknis dalam pelaksanaan DAK Fisik SMA, seperti: pembahasan strategi pemenuhan SNP melalui DAK Fisik, pembahasan norma bangunan dalam menunjang proses belajar mengajar dengan kurikulum yang berlaku, dan

pembahasan menu-menu baru dalam DAK Fisik Subbidang SMA.

- 2) Sinkronisasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan Th 2020
Sejak Tahun 2018, proses usulan DAK dilaksanakan melalui Aplikasi Krisna yang dikelola oleh Bappenas. Pemerintah mengusulkan daftar sekolah yang akan diintervensi melalui program DAK. Seluruh usulan tersebut kemudian dilakukan oleh kementerian teknis, dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan penilaian untuk usulan subbidang SMA. proses penilaian dilaksanakan dengan menyandingkan data usulan dengan data dalam Dapodik sebagai acuan. Penilaian ini juga ditujukan untuk melakukan identifikasi prioritas sekolah dengan Pagu Indikatif DAK Fisik Subbidang SMA. Setelah diperoleh hasil penilaian, kemudian dilakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi yakni Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk membahas dan menyetujui hasil penilaian tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Biro PKLN Kemdikbud untuk akomodasi dan uang harian peserta. Namun, petugas Direktorat Pembinaan SMA tidak dipenuhi oleh Biro PKLN. Untuk itu, maka Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran untuk membiayai petugas Direktorat Pembinaan SMA dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan dalam 3 angkatan.
- 3) Finalisasi Kemendikbud Tentang Target Output DAK SMA
Setelah disetujui oleh Kemdikbud dan Daerah, kemudian daftar sekolah tersebut harus diolah dan disesuaikan dengan format yang ditetapkan. Kemudian, hasil tersebut akan dijadikan sebagai lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah yang akan menerima DAK

Fisik. Untuk itu, maka dilakukan kegiatan Finalisasi Kemendikbud Tentang Target Output DAK SMA

4) Review Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA TH 2020

Setelah dilaksanakan FGD terhadap kebijakan DAK Fisik Subbidang SMA, kemudian dilaksanakan review Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA Tahun 2020. Kegiatan ini untuk menyandingkan usulan dalam FGD dengan dokumen Petunjuk Operasional yang ada.

5) Finalisasi Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA TH 2020

Setelah dilakukan FGD dan Review, maka tahapan berikutnya adalah Finalisasi Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA TH 2020. Kegiatan ini untuk pematangan konsep dalam pelaksanaan DAK Fisik SMA Tahun 2020. Kegiatan ini akan menghasilkan dokumen Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA TH 2020.

6) Penilaian Usulan DAK SMA

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan usulan sekolah dari provinsi. Penilaian dilaksanakan dengan menyandingkan data usulan dengan data dalam Dapodik sebagai acuan. Penilaian ini juga ditujukan untuk melakukan identifikasi prioritas sekolah dengan Pagu Indikatif DAK Fisik Subbidang SMA. Hasil penilaian ini akan menjadi bahan dalam kegiatan sinkronisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan.

7) Workshop Pengelolaan DAK Fisik SMA Tahun 2019

Pelaksanaan Workshop Pengelolaan DAK dilaksanakan bertujuan untuk mensosialisasikan petunjuk teknis dan koordinasi pelaksanaan DAK SMA. Melalui hal tersebut diharapkan pelaksanaan dan penyaluran dana DAK SMA sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, workshop ini juga digunakan sebagai saran dalam koordinasi terkait teknis pelaksanaan DAK Fisik SMA di Tahun 2019. Strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

5627.970.01.52 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

a) Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Laporan Daya Serap Bulanan)

Struktur anggaran Direktorat Pembinaan SMA teralokasi melalui dua mekanisme, yakni dana pusat (dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Pembinaan SMA) dan dana dekonsentrasi (dikelola oleh 34 Dinas Pendidikan Provinsi). Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Subdirektorat Program dan Evaluasi melakukan penyusunan pelaporan pencapaian program sekaligus untuk melakukan pemantauan terhadap program-program yang dilaksanakan baik melalui dana pusat maupun dekonsentrasi. Kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor dan melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.

Selain melalui kegiatan tersebut, di dalam menyusun rencana tindak 2019 diperlukan tenaga ahli dan pendukung terkait monitoring dan evaluasi program. Tenaga ahli dan pendukung membantu Dit. PSMA dalam monitoring dan evaluasi. Bantuan yang diberikan terkait teknis monitoring dan evaluasi program, serta memberikan pendapat dan masukan profesional terkait program yang telah dijalankan Dit. PSMA.

Direktorat Pembinaan SMA membentuk tim percepatan pelaksanaan program dan anggaran. Tim ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

- 1) Melakukan analisis terhadap laporan bulanan pusat dan dekonsentrasi
- 2) Melakukan analisis dan mengeluarkan rekomendasi terhadap tindak lanjut temuan.
- 3) Menyiapkan bahan rapat pimpinan terkait penyerapan anggaran.
- 4) Pengisian beberapa aplikasi seperti:
 - i. B19 Online Setditjen

- ii. SMART Kemenkeu
- iii. Emonev PP 39 Bapenas
- iv. E Performance Biro Keuangan Kemendikbud

b) Pemantauan Dana Dekonsentrasi Tahun 2019

Pemantauan Dana Dekonsentrasi SMA Tahun 2019 dilaksanakan di 34 provinsi, pemantauan ini ditujukan untuk sekolah-sekolah penerima bantuan SMA tahun 2018 dan 2019, alokasi anggaran Pemantauan berada pada DIPA 34 Dinas Pendidikan Provinsi. Direktorat bertugas untuk menyiapkan instrument dan petugas yang akan menjadi narasumber dalam pemekalan petugas pemantauan di 34 Provinsi.

Petugas yang akan memberikan informasi pembekalan menyampaikan informasi tentang kebijakan program SMA Tahun 2019, jenis-jenis bantuan SMA Tahun 2019, serta penjelasan tentang instrumen-instrumen pemantauan yang digunakan.

Selain melakukan pembekalan petugas Direktorat yang hadir juga melakukan survey dan wawancara terhadap pengelolaan program Dekonsentrasi SMA, serta TIM BOS dan Tim DAK SMA Tahun 2019 di Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaan pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap pengelola dana dekonsentrasi secara langsung. Selain itu, pemantauan ini juga dilaksanakan sebagai salah satu wadah dalam menyampaikan informasi kebijakan terbaru dan koordinasi untuk mempercepat penyerapan dana dekonsentrasi. Kegiatan dilakukan melalui tiga tahap yakni review instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dana dekonsentrasi, dan pengolahan hasil kegiatan. Review instrumen pemantauan dilakukan untuk meninjau instrumen yang akan digunakan apakah valid dan reliabel. Validitas dan reliabilitas sangat dibutuhkan agar instrumen dapat digunakan untuk melihat kondisi sebenarnya

yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan pemantauan dana dekonsentrasi dilakukan di 34 provinsi masing-masing sebanyak 2 orang. Hasil pelaksanaan pemantauan tersebut, kemudian diolah untuk dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dan informasi kepada stakeholder terkait.

- c) Pemantauan Bantuan Pemerintah Dit. PSMA Th. 2018 dan 2019
Pelaksanaan kegiatan pemantauan dana bantuan Dit. PSMA tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, petugas yang melaksanakan tugas pemantauan harus menghasilkan output berupa instrumen yang di isi oleh dinas pendidikan provinsi dan sekolah yang menjadi sasaran pemantauan. Kegiatan pemantauan dana bantuan tahun 2018 dan 2019 ini diharapkan dapat menghasilkan laporan progres perkembangan bantuan yang diberikan oleh Dit.PSMA. Hasil yang diperoleh dari pemantauan ini akan diolah untuk dianalisis. Hasil analisis kegiatan dapat digunakann sebagai bahan rekomendasi.

- d) Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Hasil Program SMA Tingkat Provinsi

Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan peserta kegiatan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang dari 34 Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu: (1) Kepala Bidang Pendidikan Menengah,(2) PJK Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas Provinsi Tahun 2018 dan (3) BPP Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas Provinsi Tahun 2019.

Selain pemberian materi melalui paparan/presentasi program dan pencapaian pelaksanaan program secara nasional, kerja mandiri, dan diskusi kelompok, pada kegiatan ini juga diberikan asistensi mengenai pencapaian program oleh para fasilitator kegiatan sehingga hasil dapat lebih optimal.

Kegiatan akan dilakukan sebanyak dua tahap yakni tahap 1

yang akan diadakan pada bulan Juni dan tahap 2 yang akan diadakan pada bulan Desember.

e) Sosialisasi aplikasi E-Monev

Penggunaan instrumen berbasis elektronik telah menjadi kebutuhan dasar saat ini. Dengan menggunakan aplikasi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan lebih efisien dan optimal. Proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih efisien. Untuk mengembangkan aplikasi e-monev ini, diperlukan tim pengembang aplikasi yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang pengembangan aplikasi. Tim pengembang akan merancang dan mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi. Setelah aplikasi tersebut berhasil dikembangkan, diperlukan sosialisasi kepada pengguna aplikasi tersebut agar dapat menggunakan aplikasinya.

f) Penyusunan LAKIP

Kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat PSMA. Pada tahun 2019, Direktorat PSMA telah menetapkan target dan sasaran program/kegiatan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembinaan SMA yang merupakan jabaran dari Rencana Strategis (Renstra 2015-2019) Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan Renstra tersebut, selanjutnya dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang merupakan tolok ukur ketercapaian program/kegiatan tahun 2019 secara menyeluruh. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar kantor terdiri dari pegawai yang mewakili di lingkungan Dit. PSMA dan Setditjen Dikdasmen. Kegiatan akan dilakukan sebanyak tiga kali yakni finalisasi LAKIP tahun 2018, Penyusunan LAKIP Tengah Semester 2019, dan Penyusunan Draft LAKIP Tahun 2019.

g) Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tindak Lanjut ini bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap data hasil temuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi secara menyeluruh, sasaran kegiatan ini adalah dinas pendidikan provinsi dan juga sekolah yang mendapatkan catatan temuan dari pemeriksa. Hasil yang diperoleh dari program tindak lanjut pemeriksaan ini diolah dan dianalisis. Hasil analisis menghasilkan informasi serta jawaban kepada setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

h) Koordinasi Program SMA

Kegiatan koordinasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, hal ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang profesional serta memperkuat koordinasi di lingkungan Ditjen Dikdasmen. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan SMA yang menjadi salah satu penyelenggara kegiatan koordinasi ini mendatangi beberapa provinsi dalam rangka penguatan pelaksanaan program SMA. Hasil dari koordinasi diolah dan dianalisis. Hasil analisis digunakan sebagai rekomendasi dan informasi kepada seluruh stakeholder terkait. Terdapat pula FGD yang digunakan untuk berdiskusi baik dengan setditjen dikdasmen, Biro PKLN, dan inspektorat jenderal terkait program dan anggaran tahun 2020. Kegiatan FGD tersebut dilakukan sebanyak dua kali.

i) Kajian Naskah Akademik Pembinaan dan Pengembangan SMA

Dit. PSMA memiliki tugas untuk mengembangkan NSPK dalam bidang sarana prasarana, kurikulum, peserta didik, pembiayaan, dan tata kelola SMA. Untuk mengembangkan NSPK tersebut diperlukan sebuah kajian akademik yang menjadi dasar pertimbangan NSPK. Kajian akademik dilakukan melalui metodologi penelitian yang ilmiah sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan kajian akademik ini, Dit. PSMA bekerjasama dengan perguruan tinggi

yang relevan dengan bidang pendidikan khususnya SMA. Perguruan tinggi bertugas untuk merancang, dan melaksanakan sebuah kajian akademik. Hasil dari kajian tersebut kemudian didiskusikan dengan para *stakeholder* dalam rangka verifikasi hasil kajian akademik. Setelah diskusi tersebut, pihak perguruan tinggi menyusun sebuah laporan yang menjadi kajian akademik bagi Dit. PSMA. Pelaksanaan kajian akademik dilakukan mulai dari menyusun TOR Kajian Naskah Akademik dan pelaksanaan kajian akademik

Kajian akademik yang dilakukan berfokus kepada peningkatan mutu pendidikan SMA. Berdasarkan UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lulusan SMA diharapkan mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun terjadi gap antara kondisi ideal dengan kondisi yang terjadi saat ini. Terdapat lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena beberapa hal seperti kekurangan dana ataupun daya tampung universitas. Menyingkapi hal tersebut, para lulusan SMA memerlukan keterampilan agar dapat berwirausaha ataupun memiliki keterampilan lain yang dapat digunakan untuk melanjutkan hidup. Diperlukan kajian akademik terkait program yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Kajian akademik akan melibatkan akademi sebagai pihak independen yang dapat menganalisis, dan menyusun program untuk mengatasi permasalahan lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

j) Workshop Penguatan Kerjasama Antara SMA Dengan Instansi Lainnya

Workshop ini dilakukan oleh Dit. PSMA untuk menjembatani antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang akan bermitra dan sudah melakukan MoU dengan Kemdikbud maupun Lembaga-lembaga mitra di internal lingkungan Kemdikbud, dengan melibatkan pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas

pendidikan provinsi. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan Pemerintah Pusat dan Daerah kesulitan dalam menjaring satuan pendidikan untuk bekerjasama. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap kerjasama tersebut dan kurangnya *supply* data kepada lembaga-lembaga tersebut. Mengingat peran penting kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada bidang pendidikan SMA, Dit. PSMA mengadakan sebuah workshop agar lembaga tersebut mendapatkan usulan satuan pendidikan yang memiliki potensi untuk bekerjasama. Diharapkan usulan tersebut ditindaklanjuti, sehingga mutu pembelajaran dari satuan pendidikan yang bekerjasama dapat meningkat dan menularkan kepada satuan pendidikan lainnya.

Rangkaian kegiatan Workshop Penguatan Kerjasama Antara SMA dengan Instansi Lainnya dimulai dari penyusunan materi, pelaksanaan workshop dan pengolahan data.

k) Kerjasama dengan Instansi Lainnya

Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi kerjasama antara Dit. PSMA dengan lembaga lainnya. Selain itu, dalam kegiatan ini juga menjaring kebutuhan kerjasama dari subdit-subdit dilingkungan Dit. PSMA dan satuan pendidikan SMA.

Dokumen kerjasama yang sudah disusun ditahun sebelumnya dan yang sedang berjalan akan diverifikasi kembali pemanfaatan dan mekanismenya untuk kebutuhan Dit. PSMA, kemudian dengan memanfaatkan dokumen kerjasama dilakukan FGD Identifikasi kerjasama untuk menggali potensi kerjasama yang akan membuka kesempatan bagi lembaga-lembaga lain untuk mengadakan kerjasama dengan satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Rangkaian kerjasama dengan instansi lainnya dilakukan mulai dari identifikasi hubungan kerjasama Dit. PSMA dengan

instansi lainnya, penyusunan dokumen kerjasama Dit. PSMA dengan instansi lainnya, dan finalisasi dokumen kerjasama Dit. PSMA dengan instansi lainnya.

l) Penyusunan Buku Informasi Dit PSMA Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku informasi Program Direktorat Pembinaan SMA bertujuan memuat informasi garis-garis besar dari berbagai program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA pada Tahun 2019 yang merupakan penjabaran pilar-pilar kebijakan pembangunan pendidikan SMA Tahun 2019. Buku ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan kerja pelaksanaan program-program SMA, sekaligus menjadi salah satu bahan masukan bagi mitra kerja kami di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah dan instansi lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan SMA. Beberapa buku informasi yang disusun adalah buku informasi Dit. PSMA tahun 2019, buku informasi Dit. PSMA Tahun 2020 (draft), dan Petunjuk Teknis Program Dekonsentrasi Tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jumlah buku dan diakhir dengan finalisasi ketiga buku tersebut.

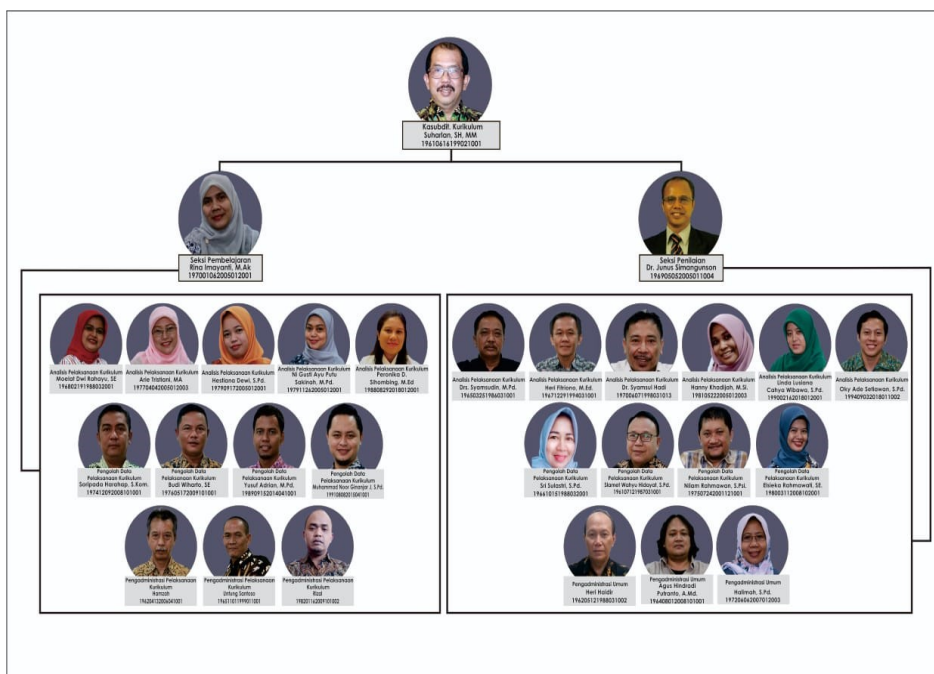
m) Workshop Evaluasi DAK Fisik SMA Tahun 2019

Salah satu peran dari Kemendikbud, dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan SMA adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan DAK Fisik SMA. Proses pemantauan pelaksanaan DAK Fisik meliputi: perkembangan penyaluran dana DAK Fisik SMA, koordinasi kesiapan provinsi dalam penyaluran tahap ke II, dan evaluasi dalam seluruh proses pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran. Kegiatan workshop ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada pertengahan tahun sebagai upaya pemantauan dan pada akhir tahun sebagai upaya evaluasi. berikut ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan secara lebih rinci.



**Subdit Kurikulum
Direktorat Pembinaan SMA
2019**

1. Struktur Organisasi



Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi Subdirektorat Kurikulum dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan dalam tiga output yang tercantum dibawah ini.

KODE PROGR AM	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT	JUMLAH
SUBDIT KURIKULUM		149,077,570,000
5627.013	SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	74,582,665,000
5627.019	SEKOLAH YANG MENERAPKAN KURIKULUM DAN MODEL PEMBELAJARAN YANG BERLAKU	47,073,623,000
5627.023	SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PROGRAM KETERAMPILAN/KEWIRUSAHAAN	27,421,282,000

3. Rencana Kerja Subdirektorat Kurikulum Tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) tugas pokok yang akan dilaksanakan oleh Subdirektorat Kurikulum yaitu diantaranya:

- 1) Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Subdit Kurikulum:
 - 1) Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan (5627.013)
 - 2) Sekolah yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Berlaku (5627.019)
 - 3) Sekolah yang Mendapatkan Program Keterampilan/Kewirusahaan (5627.023)

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a) Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan

Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan merupakan program peningkatan mutu pendidikan berbasis wilayah (zonasi) yang diintegrasikan dengan program pembinaan lainnya dari Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen bersama untuk mengalokasikan program dan anggaran bagi pembinaan SMA Rujukan.

Penyelenggaraan program Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan dimaksudkan sebagai salah satu upaya pembinaan sekolah oleh pemerintah untuk peningkatan dan perluasan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya sekolah tersebut diharapkan dapat berbagi praktik baik ke sekolah lain di sekitarnya dengan tujuan antara lain:

- 1) meningkatnya daya inisiatif sekolah untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 2) optimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- 3) berkembangnya praktik-praktik terbaik (*best practices*) penyelenggaraan pendidikan yang dapat dirujuk sekolah lain;
- 4) sebagai pusat sumber belajar praktik-praktik baik;
- 5) sebagai laboratorium bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah;
- 6) terbangunnya sinergi pembinaan sekolah bermutu dengan pemerintah daerah;
- 7) terwujudnya perluasan dan percepatan ketersediaan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi;
- 8) terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak untuk peningkatan mutu.

Keluaran kegiatan ini adalah ditetapkannya Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan yang telah memenuhi atau melampaui SNP, mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai

tempat belajar, mengembangkan praktik terbaik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi akademik maupun non akademik, serta melaksanakan program kebijakan pendidikan yang layak menjadi rujukan SMA lain.

i. Verifikasi Calon Penerima

Kegiatan verifikasi terhadap calon Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan pada tahun 2019 dilaksanakan yang bertujuan untuk memverifikasi data usulan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi setelah diberikan kuota calon Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Kegiatan verifikasi dilaksanakan di seluruh Indonesia secara acak (*random sampling*) setelah mendapatkan data usulan dari Dinas Provinsi.

ii. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan terhadap penerima bantuan pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan pada tahun 2019 dengan melibatkan Setditjen Dikdasmen, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi, BAN S/M, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Dinas Pendidikan Provinsi, Sekolah, dan Direktorat Pembinaan SMA. Adapun kegiatan dalam Bimbingan Teknis:

1) Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Sekolah yang

mendapatkan Pembinaan akan menghasilkan yang MoU (naskah kesepakatan) bantuan pemerintah program Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan antara Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah.

Tujuan bimbingan teknis bantuan pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan adalah:

- a. meningkatkan pemahaman kebijakan strategis peningkatan mutu SMA;
 - b. meningkatkan pemahaman konsep dan pengembangan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan;
 - c. menyusun dan menyepakati rencana aksi (*action plan*) Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan;
 - d. menyepakati rencana penggunaan dana Bantuan Pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan;
 - e. menandatangani naskah perjanjian kerjasama Bantuan Pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan.
- 2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan

Bimbingan teknis pengelolaan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan merupakan pembinaan terhadap peningkatan dan perluasan mutu pendidikan berbasis Standar Nasional pendidikan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan sekolah sebagai subyek pendidikan yang berperan meningkatkan mutu dirinya sendiri dan membantu meningkatkan mutu sekolah lain.

Berdasarkan hal diatas, Agar kegiatan-kegiatan 650 SMA Rujukan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan berhasil maka materi kegiatan, jadwal kegiatan, pemanfaatan bantuan pemerintah, pelaporan akan dibahas pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan SMA Rujukan dengan fokus kepada

implementasi penguatan kegiatan yang telah dikembangkan pada tahun 2018 dan pengimbasan praktik-praktik baik kepada SMA lain (deseminasi) secara nasional.

Tujuan dari Bimbingan Teknis Pengelolaan SMA yang Mendapatkan Pembinaan adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman kebijakan strategis peningkatan mutu SMA;
- b. Meningkatkan pemahaman program SMA yang Mendapatkan Pembinaan;
- c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan rencana anggaran biaya bantuan pemerintah SMA yang Mendapatkan Pembinaan yang telah disepakati;
- d. Meningkatkan kemampuan teknis pelaksanaan kegiatan SMA yang Mendapatkan Pembinaan;
- e. Meningkatkan pemahaman sistem pelaporan kegiatan dan keuangan bantuan pemerintah SMA yang Mendapatkan Pembinaan.

3) Penyaluran Bantuan

Sekolah penerima bantuan pemerintah adalah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan tahun 2019 yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan kriteria dan persyaratan serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA. Dana bantuan pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan tahun 2019 disalurkan langsung ke rekening sekolah oleh Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp100.000.000,00 per sekolah dengan prinsip penggunaan swakelola.

4) Supervisi

Supervisi program Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan dilakukan sebagai upaya Direktorat Pembinaan SMA dalam pengendalian dan pengawasan penggunaan dana bantuan pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, administrasi serta mengetahui beberapa besar peran dan partisipasi masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program bantuan berjalan lancar sesuai sasaran yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan.

Adapun kegiatan dalam Supervisi adalah:

- a. ToT Petugas Supervisi keterlaksanaan program Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan

Menyiapkan tim monitoring dan evaluasi melalui kegiatan workshop/TOT ditingkat pusat yang akan melibatkan unsur pusat dan daerah.

Tujuan dari ToT Petugas Supervisi ini adalah

1. Menyamakan pemahaman petugas supervisi mengenai strategi pelaksanaan supervisi keterlaksanaan program SMA Rujukan tahun 2019;
2. Memantapkan penguasaan petugas supervisi terhadap instrumen yang akan diberikan kepada masing-masing responden di sekolah;
3. Menyiapkan sejumlah personel yang akan ditugaskan sebagai petugas dalam kegiatan supervisi keterlaksanaan program SMA Rujukan.

- b. Pelaksanaan Supervisi

Metode supervisi dalam rangka monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi, wawancara dengan responden, pengisian kuesioner /instrumen oleh responden.

Rincian pelaksanaan supervisi program SMA yang mendapatkan Pembinaan:

1. Petugas supervisi yang berjumlah 2 (dua) orang ke 150 lokasi di 34 Provinsi;
2. Satu tim petugas supervisi terdiri dari 1 (satu) petugas pusat dan 1 (satu) orang petugas daerah melakukan supervisi ke 150 lokasi di 34 Provinsi yang sudah ditentukan;
3. Petugas supervisi akan mengunjungi lokasi verifikasi minimal 2 lokasi di masing-masing Provinsi dengan lokasi yang sudah ditentukan.

b) Sekolah yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Berlaku

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan.

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 menjadi Kurikulum 2013. Pengembangan Kurikulum 2013, selain untuk memberi

jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat kurikulum sebelumnya, juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang di peroleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Sedangkan inti dari Kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan tematik-integratif.

Arah kebijakan pada tahun 2019, pelaksanaan pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait sehingga terbangunnya sinergi yang efektif dalam peningkatan pola pembinaan di jenjang Sekolah Menengah Atas baik dari proses pembelajaran sampai dengan penilaian yang bertitik pada peserta didik.

Pola pembinaan yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMA dalam upaya percepatan pendidikan yang bermutu dilakukan secara terintegrasi sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara terukur dan terarah, sehingga apa yang akan menjadi tujuan dapat terlaksana sesuai apa yang sudah dijadikan tujuan dalam roadmap pendidikan bermutu tahun 2025. Untuk mendukung sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 dan model pembelajaran yang berlaku, Subdirektorat Kurikulum memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1) Penyusunan Bahan

Dalam rangka implementasi Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya terus untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA. Merealisasikan upaya tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya memprogramkan berbagai kegiatan pembinaan peningkatan mutu SMA antara lain implementasi Kurikulum 2013, SMA Rujukan, SMA Kewirausahaan, Penguatan Pendidikan Karakter, Literasi, serta Pembelajaran dan Penilaian. Pembinaan tersebut perlu adanya dukungan naskah/pedoman/panduan yang lebih operasional sehingga dalam implementasi di lapangan (sekolah/kelas) tidak terjadi multi tafsir dan pemahaman terhadap naskah/pedoman baik secara konsep dan strategi penyelenggaraan, pedoman/panduan/petunjuk teknis, dan materi serta bahan pembelajaran serta naskah/pedoman lain yang relevan dengan tuntutan dalam pembelajaran dan penilaian di kelas.

Mengawali kegiatan dimaksud telah dilakukan identifikasi kebutuhan naskah pembelajaran dan penilaian terlebih dahulu. Selanjutnya naskah tersebut akan ditelaah, disusun dan dikembangkan baik dari sisi desain, konsep, dan konten yang berhubungan dengan substansi dalam implementasi di kelas, untuk mendukung hal tersebut maka Subdirektorat Kurikulum mempersiapkan beberapa kegiatan pendukung dalam pelaksanaan output penyusunan bahan, sebagai berikut:

- a. *Workshop* Review Dan Pengembangan Naskah Pembelajaran Dan Penilaian
- b. *Workshop* Pembahasan Dan Penyempurnaan Naskah Pembelajaran Dan Penilaian
- c. Editing Dan Finalisasi Pengembangan Naskah Pembelajaran Dan Penilaian

2) Koordinasi Pelaksanaan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan mitra kerja Subdirektorat Kurikulum dalam implementasi Kurikulum 2013, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar terjalin harmonisasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan implementasi Kurikulum 2013, maka Subdirektorat Kurikulum mempersiapkan beberapa kegiatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi kurikulum dengan LPMP sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP yang tersebar di 34 Provinsi.

Tujuan Koordinasi dan sinkronisasi implementasi kurikulum dengan LPMP adalah:

- a. Memberikan informasi kebijakan terkini implementasi Kurikulum SMA.
- b. Memberikan informasi tentang teknis dan mekanisme pelaksanaan implementasi kurikulum SMA.
- c. Melakukan validasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

3) Pelatihan Kurikulum

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di tingkat sekolah perlu keterlibatan nyata dari berbagai pihak terkait baik secara kebijakan, substansi, dan teknis. Direktorat Pembinaan SMA telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Balitbang (Puskurbuk dan Puspendik), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, BSNP, PASKA, Dapodik, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Pengawas SMA, Kepala SMA, dan Guru SMA. Upaya tersebut dilakukan agar kebijakan, materi, dan strategi fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 disiapkan dan dilaksanakan dengan keterlibatan semua pihak yang terkait. Pada kenyataannya memang harus diakui bahwa pelibatan berbagai pihak dan fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di SMA belum sepenuhnya mampu memahami, memampukan,

dan menggerakkan pelaku utama Kurikulum 2013 di sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Guru untuk melaksanakan pembelajaran dan penilaian seperti yang diharapkan dalam konsep Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 menghendaki agar pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana yang diminta dalam Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar dilakukan melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan dengan berbagai model pembelajaran seperti *discovery learning*, *project-based learning*, *problem-based learning*, *inquiry learning*, serta menggunakan modus pembelajaran langsung (*direct instructional*) dan tidak langsung (*indirect instructional*). Konsep tersebut dijelaskan dalam Lampiran Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Seiring dengan konsep tersebut, dalam berbagai workshop, bimtek, pelatihan yang terkait dengan Kurikulum 2013 sering diuraikan mengenai kompetensi abad 21 (4 C), *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*, Penguatan Pendidikan Karakter, Literasi, dan *Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)* yang kesemuanya itu menjadi muatan bagi kepala sekolah dan guru untuk mengimplementasikannya di depan kelas.

Berdasarkan hal tersebut, Subdirektorat Kurikulum telah mempersiapkan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:

- a. *Workshop* Pengelolaan SKS SMA
- b. Bimbingan Teknis Penyusunan Soal HOTS
- c. ToT Tim Fasilitator Pembinaan Di SMA - Pasca EHB
- d. Pelaksanaan Pembinaan Di SMA-Pasca EHB
- e. Pelaksanaan Pendampingan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
- f. *Workshop* Tim Pengembang Pembelajaran dan Penilaian

- g. Pelaksanaan Implementasi SMA Kemaritiman
 - h. *Workshop* Peningkatan Mutu Penyelenggaraan dan Pengembangan Soal Ujian Sekolah
 - i. *Workshop* Pembinaan Program Kurikulum SMA Bagi Pengawas
 - j. Sosialisasi/Seminar Kurikulum (Uji Publik)
 - k. *Workshop* Penyiapan Emodul dan Video Pembelajaran
 - l. *Workshop* Pembahasan dan Penyempurnaan E-Modul Dan Video
 - m. *Editing* dan Finalisasi E-Modul Dan Video
 - n. Penggandaan dan Pengiriman Blangko Sertifikat/Ijazah SMA
- c) Sekolah yang Mendapatkan Program Keterampilan/Kewirausahaan

Saat ini Kewirausahaan merupakan bagian integral dari struktur Kurikulum 2013 yang dalam pelaksanaannya mengimplementasikan kecakapan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (*Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving*, dan *Creativity and Innovation*) yang merupakan kemampuan sesungguhnya ingin dituju dengan Kurikulum 2013. Program Kewirausahaan merupakan salah satu jawaban bagi pendidikan di SMA untuk mengenal konsep kewirausahaan, latihan mengembangkan usaha, mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha, menumbuhkan minat berwirausaha dan mengembangkan potensi berwirausaha. Mengimplementasikan program Kewirausahaan di SMA tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun anggaran 2019 memberikan Bantuan Pemerintah untuk penguatan dan peningkatan mutu kewirausahaan di SMA. Bantuan Pemerintah Program Kewirausahaan di SMA merupakan dana bantuan yang secara khusus digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan bermutu yang memenuhi Standar Nasional

Pendidikan, pelaksanaan kebijakan dan pengembangan keunggulan sekolah Program Kewirausahaan. Selanjutnya sekolah tersebut diharapkan berperan sebagai pelopor pelaksana kebijakan, pengembang keunggulan dan keunikan serta praktik baik program kewirausahaan sehingga dapat menjadi rujukan bagi SMA yang lain.

Strategi pemilihan Sekolah Program Kewirausahaan melalui seleksi proposal calon Sekolah Program Kewirausahaan yang sudah diketahui dan disetujui Dinas Pendidikan Provinsi, sesuai kuota yang diberikan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas untuk calon Sekolah program Kewirausahaan tahun 2019

Berdasarkan hal tersebut, Subdirektorat Kurikulum telah mempersiapkan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan terhadap penerima bantuan pemerintah program SMA Kewirausahaan pada tahun 2019 dengan melibatkan Direktorat Pembinaan SMA, Praktisi Kewirausahaan, Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah.

Adapun kegiatan dalam Bimbingan Teknis:

a. Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Program SMA Kewirausahaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Program SMA Kewirausahaan akan menghasilkan yang MoU (naskah kesepakatan) bantuan pemerintah program Program SMA Kewirausahaan antara Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah.

Tujuan bimbingan teknis bantuan pemerintah Sekolah

yang Mendapatkan Pembinaan adalah:

1. meningkatkan pemahaman kebijakan strategis peningkatan mutu SMA;
2. meningkatkan pemahaman konsep dan pengembangan Program SMA Kewirausahaan;
3. menyusun dan menyepakati rencana aksi (*action plan*) Program SMA Kewirausahaan;
4. menyepakati rencana penggunaan dana (RAB) Bantuan Pemerintah Program SMA Kewirausahaan;
5. menandatangani naskah perjanjian kerjasama (MoU) Bantuan Pemerintah Program SMA Kewirausahaan.

b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Program SMA Kewirausahaan

Kegiatan pembinaan untuk SMA Kewirausahaan meliputi (1) Bimbingan Teknis Program SMA Kewirausahaan, (2) Pemberian Bantuan Pemerintah sebesar Rp. 115 Juta/SMA, dan (3) Bimbingan Teknis Pengelolaan Program Kewirausahaan di SMA. Materi pembinaan yang dilakukan sekolah meliputi (1) Pemantapan Pemahaman Pembelajaran dan Penilaian Pada Kurikulum 2013 SMA : Kebijakan, Konsep, dan Realita Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian di Sekolah (Pembelajaran Abad 21; 5M; 4C; Pendidikan Karakter; Literasi; Pembelajaran dan soal HOTS; Model Pembelajaran; Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Vs Afektif, Kognitif, dan Psikomotor; Penilaian Karakter Vs Penilaian Sikap; USBN, UN, Rapor Akademik dan Rapor Karakter); (2) Penerapan penilaian dengan soal HOTS (membuat bank soal HOTS); (3) Praktik Baik Penguatan Karakter Kewirausahaan di SMA; (4) Evaluasi dan pemantapan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di

sekolah (best practise); (5) Pengelolaan Kelompok Usaha Siswa (KUS); (6) Merintis kerjasama vokasi dan akademik dengan SMK/dunia usaha dunia industri; (7) Pemenuhan kelengkapan Dapodik.

Perjalanan fasilitasi dan pembinaan mutu SMA diatas sampai dengan tahun 2018 secara waktu telah berjalan 3 tahun, secara pembiayaan telah diinvestasikan milyaran rupiah, secara kuantitas telah dibina 204 SMA, walaupun tidak menjangkau semua kabupaten/kota di 34 provinsi dan secara materi telah dikembangkan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan mutu SMA Kewirausahaan dari segi pemenuhan SNP khususnya SKL, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian, implementasi Kurikulum 2013, implementasi kebijakan mutu, dan peningkatan keunggulan sekolah. Beberapa pertanyaan strategis dikemukakan dari program tersebut antara lain (1) Apakah program tersebut tepat sasaran?; (2) Apakah sekolah menjalankan semua rencana aksi sesuai dengan kesepakatan?; (3) Apakah materi kegiatan dalam program aksi memberikan manfaat langsung bagi sekolah; (4) Apakah Kurikulum 2013 telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan konsep yang diharapkan?; (5) Apakah kebijakan strategis Kemendikbud terlaksana di sekolah?; (6) Apakah praktik baik dan keunggulan sekolah berkembang secara kuantitas dan kualitas?; (7) Apakah bantuan pemerintah digunakan sesuai ketentuan dan kegiatan?; (8) Apakah telah terjadi pembelajaran dan penilaian sesuai Kurikulum 2013?; (9) Apakah SMA lain disekitarnya menerima manfaat dari SMA Kewirausahaan?; (10) Apakah melalui program ini jiwa entrepreneur dapat terbentuk?; dan lain-lain. Pertanyaan tersebut harus dijawab oleh setiap SMA Kewirausahaan yang ditunjukkan

dengan karya nyata dalam bentuk Penampilan, Pelayanan, dan Prestasi.

Harapan masyarakat terhadap program SMA Kewirausahaan sangat tinggi, karena melalui SMA Kewirausahaan perluasan dan peningkatan mutu SMA akan terjadi. Penyelenggaraan program kewirausahaan di SMA bukan berarti meng-SMK-kan SMA. Program ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberi bekal kepada peserta didik agar mereka memahami konsep kewirausahaan, memiliki karakter wirausaha, mampu memanfaatkan peluang, dan mendapatkan pengalaman langsung berwirausaha, serta terbentuknya lingkungan sekolah yang berwawasan kewirausahaan. Oleh karena itu karya nyata SMA Kewirausahaan tahun ini harus ditunjukkan kepada khalayak. SMA Kewirausahaan sendiri harus menunjukkan sebagai SMA yang dapat mendorong peserta didik untuk mulai mengenal dan membuka usaha atau berwirausaha. Komunitas SMA Kewirausahaan harus satu gerak dan tujuan. Agar kegiatan-kegiatan 204 SMA Kewirausahaan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan berhasil maka materi kegiatan, jadwal kegiatan, pemanfaatan bantuan pemerintah, pelaporan akan dibahas pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Program Kewirausahaan di SMA.

Tujuan dari Bimbingan Teknis Pengelolaan SMA yang Mendapatkan Pembinaan adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman kebijakan strategis peningkatan mutu SMA;
- b. Meningkatkan pemahaman program SMA Kewirausahaan;

- c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan rencana anggaran biaya bantuan pemerintah SMA Program Kewirausahaan yang telah disepakati;
- d. Meningkatkan kemampuan teknis pelaksanaan kegiatan SMA Program Kewirausahaan;
- e. Meningkatkan pemahaman sistem pelaporan kegiatan dan keuangan bantuan pemerintah SMA Program Kewirausahaan.

2) Penyaluran Bantuan

Sekolah penerima bantuan pemerintah adalah SMA Kewirausahaan tahun 2019 yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan kriteria dan persyaratan serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA. Dana bantuan pemerintah SMA Kewirausahaan tahun 2019 disalurkan langsung ke rekening sekolah oleh Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp115.000.000,00 per sekolah dengan prinsip penggunaan swakelola.

Tujuan Bantuan Pemerintah SMA Kewirausahaan bertujuan antara lain:

- a. mendorong sekolah untuk meningkatkan mutu pemenuhan Standar Nasional Pendidikan khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan;
- b. menumbuhkembangkan praktik-praktik baik dan inovasi kegiatan kewirausahaan bagi siswa;
- c. memperluas dan mempercepat ketersediaan pelayanan pendidikan pengembangan Program Kewirausahaan di SMA;

- d. memberdayakan sekolah sebagai pelopor dan pengembang praktik-praktik baik pengembangan Program Kewirausahaan sebagai mitra bagi SMA lain;
- e. memperkuat pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA dengan cara mengembangkan metode pembelajaran dalam penguatan pendidikan karakter dan pembentukan nilai-nilai kewirausahaan pada kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah;
- f. menganalisis kompetensi dasar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, Ekonomi, Fisika, Kimia, Biologi, dan Seni Budaya dalam rangka pemetaan ruang lingkup materi yang terkait dengan program kewirausahaan;
- g. merumuskan rancangan program kewirausahaan dan pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan di SMA.

3) Supervisi

Pengendalian dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Pemerintah SMA Kewirausahaan dilakukan melalui kegiatan supervisi sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi. Monitoring bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, administrasi serta mengetahui seberapa besar peran dan partisipasi masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program bantuan berjalan lancar sesuai sasaran yang diharapkan. Hasil supervisi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan.

Supervisi program kewirausahaan di SMA oleh Direktorat Pembinaan SMA atau instansi lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan. Monitoring

dan evaluasi dapat juga melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan.

Metode supervisi dapat dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi, wawancara dengan responden, pengisian kuesioner/instrumen oleh responden. Metode lain responden dapat mengisi kuesioner monitoring dan evaluasi secara *on-line*. Kuesioner/instrumen monitoring disusun oleh Direktorat Pembinaan SMA.

Agar pelaksanaan supervisi dapat terlaksana secara efektif Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Adapun kegiatan dalam Supervisi adalah:

a. ToT Petugas Supervisi keterlaksanaan program SMA Kewirausahaan

Menyiapkan tim monitoring dan evaluasi melalui kegiatan workshop/TOT ditingkat pusat yang akan melibatkan unsur pusat dan daerah.

Tujuan dari ToT Petugas Supervisi ini adalah

1. Menyamakan pemahaman petugas supervisi mengenai strategi pelaksanaan supervisi keterlaksanaan program SMA Rujukan tahun 2019;
2. Memantapkan penguasaan petugas supervisi terhadap instrumen yang akan diberikan kepada masing-masing responden di sekolah;
3. Menyiapkan sejumlah personel yang akan ditugaskan sebagai petugas dalam kegiatan supervisi keterlaksanaan program SMA Rujukan.

4) Pelaksanaan Supervisi

Metode supervisi dalam rangka monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi, wawancara

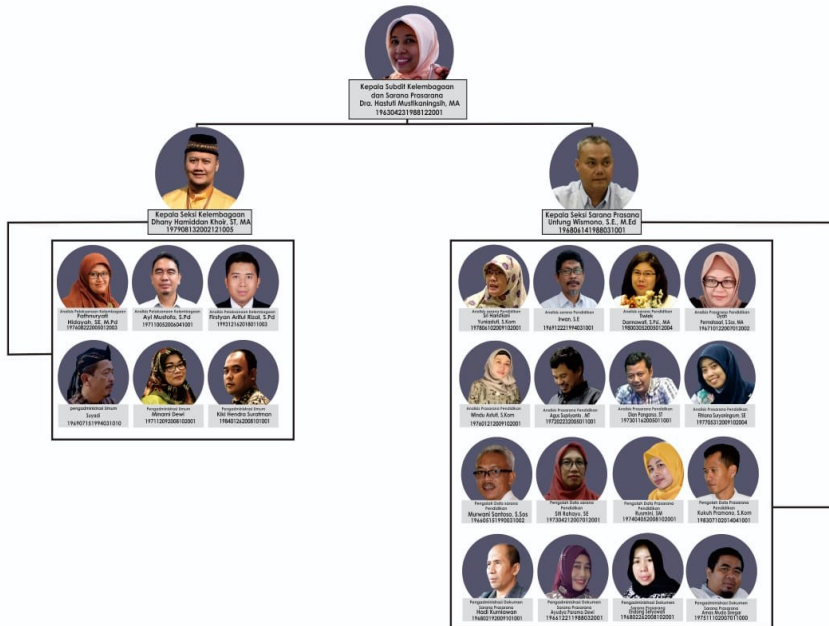
dengan responden, pengisian kuesioner /instrumen oleh responden.

Rincian pelaksanaan supervisi program SMA Kewirausahaan:

- a. Petugas supervisi yang berjumlah 2 (dua) orang ke 100 lokasi di 34 Provinsi;
- b. Satu tim petugas supervisi terdiri dari 1 (satu) petugas pusat dan 1 (satu) orang petugas daerah melakukan supervisi ke 100 lokasi di 34 Provinsi yang sudah ditentukan;
- c. Petugas supervisi akan mengunjungi lokasi verifikasi minimal 2 lokasi di masing-masing Provinsi dengan lokasi yang sudah ditentukan.



1. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

2. Profil Anggaran Tahun 2019

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta

fasilitas sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas. Pagu anggaran 2019 untuk Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana digunakan untuk membiayai program bantuan sarana dan prasarana yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak terkait lainnya. Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dimulai dengan seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan, bimbingan teknis kepada calon penerima bantuan, penyaluran dana bantuan, dan supervisi. Metode pengelolaan bantuan adalah swakelola dengan memerhatikan akuntabilitas, transparansi, partisipatif, demokratis, efisien dan efektif.

Pada seksi kelembagaan, anggaran digunakan untuk membiayai, antara lain, 3 (tiga) output kegiatan utama, yakni pembinaan manajemen berbasis sekolah, sekolah terbuka yang mendapatkan bantuan operasional, dan pembinaan UKS. Di dalam pembinaan MBS terdapat beberapa program, yaitu penguatan MBS, revitalisasi perpustakaan, pembinaan SPK, persiapan akreditasi, pengelolaan sarana prasarana, dan bantuan untuk SMA Terbuka.

a. Rencana Kerja Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) tugas pokok yang akan dilaksanakan oleh Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana yaitu diantaranya:

- 1) melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Unit Sekolah Baru yang dibangun (5627.002);

- 3) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Sekolah yang direnovasi (5627.007);
- 4) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (5627.018);
- 5) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan (5627.020);
- 6) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Sekolah yang melaksanakan Program UKS (5627.022);
- 7) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional (5627.025).

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

I. Unit Sekolah Baru yang dibangun (5627.002)

Bantuan pemerintah Unit Sekolah Baru (USB) adalah bantuan pembangunan unit sekolah baru, bagi sekolah dengan kategori sebagai berikut:

- a) belum memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan kependidikan, serta bangunan sendiri;
- b) sudah memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan kependidikan, namun belum memiliki bangunan sendiri atau menumpang di tempat lain;
- c) sudah memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan kependidikan, dan bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah atau Yayasan Pendidikan, namun jumlahnya minim dibandingkan dengan kebutuhan siswa.

Metode pelaksanaan/pembangunan USB SMA adalah dengan cara swakelola yang dikerjakan oleh panitia pembangunan yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi bagi SMA Negeri atau yayasan pendidikan bagi sekolah swasta, komite sekolah, dan masyarakat.

Strategi pemberian bantuan USB dilaksanakan melalui tahapan: seleksi dan verifikasi, bimbingan teknis, penyaluran bantuan, dan supervisi. Adapun ruang lingkup program pembangunan USB sebagai berikut:

a) Seleksi Verifikasi Sekolah Calon Penerima Bantuan USB
(052)

1) Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi USB dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data keadaan lahan, status lahan dan dukungan para pemangku kebijakan serta faktor pendukung lainnya yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan menentukan sekolah penerima bantuan USB tahun anggaran 2019.

Metode yang digunakan adalah observasi ke lokasi pembangunan USB dan wawancara kepada pihak terkait khususnya pelaksana pembangunan USB di kab/kota. Output kegiatan adalah data hasil verifikasi sekolah/Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan calon penerima bantuan USB SMA.

2) Analisis dan Pengolahan Data Hasil Verifikasi

Kegiatan ini untuk mengentri, mengolah, dan menganalisis data hasil verifikasi. Output kegiatan ini adalah analisis hasil verifikasi sekolah sebagai pertimbangan untuk menentukan sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan yang akan diundang untuk bimbingan teknis *review* proposal.

3) Koordinasi Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana

Kegiatan ini adalah koordinasi dan tindak lanjut terkait hasil pembangunan Unit Sekolah Baru yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan. Output kegiatan ini adalah hasil pembangunan Unit Sekolah Baru di provinsi penerima bantuan.

b) Bimbingan Teknis Review Proposal USB (053)

Kegiatan *review* proposal merupakan kegiatan pemberian bimbingan teknis kepada Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan yang akan melaksanakan pembangunan USB SMA di kab/kotanya masing-masing. Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini meliputi:

1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis *Review* Proposal

Kegiatan bimbingan teknis *review* proposal USB dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan tujuan untuk memberikan bimbingan teknis mengenai pembangunan USB SMA dan *me-review* proposal bantuan pendidikan pembangunan USB agar sesuai dengan pedoman pembangunan USB tahun 2019. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya proposal bantuan pemerintah USB SMA yang telah di-*review*, dan MoU Bantuan pemerintah pembangunan USB SMA tahun 2019 antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan dengan Direktur Pembinaan SMA. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan USB adalah:

- a. pematangan lahan USB SMA yang menjadi tanggung jawab dinas pendidikan provinsi/yayasan pendidikan;
- b. pemasangan papan pengumuman di lokasi pembangunan yang menginformasikan sekurang-kurangnya mengenai jumlah dan sumber dana

pembiayaan pembangunan, dan jadwal pelaksanaan pembangunan USB SMA;

- c. Pembentukan panitia pembangunan dan penyusunan rencana kerja detail disusun/dibuat oleh konsultan perencana pembangunan USB SMA yang ditunjuk. Rencana kerja detail dimaksud adalah desain dan gambar teknis bangunan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), jadwal pelaksanaan kurva “S”;
 - d. Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan menunjuk konsultan perencana dan pengawas pembangunan USB SMA. Biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, dan manajemen pelaksanaan pembangunan USB dialokasikan dari dana APBN;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan keuangan Bantuan USB SMA, berdasarkan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam pedoman Bantuan SMA;
 - f. Serah terima hasil pekerjaan dan inventarisasi USB SMA dalam daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah provinsi/ yayasan pendidikan setempat.
- 2) Analisis Kegiatan dan Pengolahan Hasil Bimtek
- Kegiatan ini untuk mengentri, mengolah, dan menganalisis data hasil bimtek. Output kegiatan ini adalah pengolahan data hasil bimtek untuk proses penyaluran bantuan serta analisis hasil bimtek yang menjadi bagian dari pelaporan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 3) Pengembangan E-takola PSMA
- Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk pengelolaan bantuan dan profil sarana prasarana SMA yang lebih efisien dan efektif karena paper less dan memudahkan

updating data serta user friendly. Aplikasi ini juga sebagai digitalisasi arsip dan *tracking* proses usulan dan pelaksanaan bantuan.

c) Penyaluran Bantuan Pembangunan USB (054)

Penyaluran dana bantuan USB SMA ke rekening atas nama Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan, disalurkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam buku pedoman bantuan Unit Sekolah Baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

Penyaluran bantuan USB dilakukan dalam 2 termin. Termin pertama sebesar 70% setelah kegiatan penandatanganan SP2D dan termin kedua sebesar 30% setelah dinas provinsi/yayasan pendidikan menyampaikan laporan kemajuan progres pembangunan fisik 50%. Proses penyaluran dana bantuan USB sampai ke rekening Dinas Provinsi/yayasan pendidikan.

d) Supervisi (055)

Supervisi bantuan USB dilakukan agar dapat melihat secara langsung kelengkapan kesesuaian pelaksanaan pembangunan USB yang didanai dari bantuan APBN tahun 2019.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini meliputi:

1) Pelaksanaan Supervisi

Supervisi dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pembangunan USB pada dinas pendidikan provinsi/yayasan pendidikan penerima Bantuan pemerintah tahun 2019. Metode yang digunakan adalah observasi ke lokasi pembangunan USB dan wawancara kepada pihak terkait khususnya

pelaksana pembangunan USB di provinsi/yayasan pendidikan. Output kegiatan ini adalah hasil Supervisi pelaksanaan pembangunan USB di provinsi/yayasan pendidikan penerima bantuan tahun 2019 sebanyak 8 lokasi.

2) Analisis dan Pengolahan data hasil Supervisi

Kegiatan ini untuk mengentri, mengolah, dan menganalisis data hasil Supervisi. Output kegiatan ini adalah analisis hasil Supervisi unit sekolah baru sebagai pertimbangan untuk menentukan Dinas Provinsi/yayasan pendidikan yang akan akan mengusulkan bantuan pemerintah pada tahun berikutnya.

II. Sekolah yang direnovasi (5627.007).

Kondisi bangunan sekolah, seiring dengan bertambahnya usia bangunan, akan mengalami penurunan keandalan bangunan. Penurunan keandalan ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kegiatan pengguna bangunan, kondisi cuaca dan perubahan standard. Kondisi bangunan sekolah yang menurun keandalannya akan berpengaruh pada performansi pemenuhan fungsi bangunan.

Persyaratan keandalan bangunan akan meninjau kondisi bangunan terhadap aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Dengan meninjau keempat aspek tersebut terhadap bangunan sekolah akan menjadi dasar evaluasi teknis terkait keandalan bangunan sekolah dalam pemenuhan fungsinya.

Bantuan renovasi sekolah dibagi menjadi 2 jenis yaitu renovasi bangunan SMA dan renovasi sanitasi SMA.

III. Renovasi Bangunan SMA

Bantuan ini diberikan pada sekolah dengan tujuan: (1) meningkatkan kualitas dan kondisi fisik bangunan SMA,

sehingga dapat memenuhi fungsinya dan sesuai standart sebagai prasarana pendidikan dan pembelajaran di sekolah; (2) terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dari prasyarat teknis bangunan, oleh pengguna dan pengelola bangunan SMA; (3) membangun citra baru bangunan SMA yang tertata dan berpenampilan menarik, tidak kusam dan biasa pada perwajahan depan sekolah.

Diprioritaskan pada SMA yang memiliki kondisi, diantaranya:

- a) Usia bangunan SMA lebih dari 20 tahun;
- b) Sasaran bangunan yang direnovasi adalah perwajahan bagian depan sekolah;
- c) Sebagian besar kondisi bangunan lama, sudah tidak layak fungsi sehingga dapat membahayakan atau mengganggu ketenangan dalam proses belajar mengajar atau berukuran tidak standart sesuai pedoman standarisasi ruang dan perabot direktorat PSMA;
- d) Mengalami musibah (kebakaran, bangunan runtuh, kerusakan, dll) atau bencana alam (rob, gempa, banjir, longsor, dll);
- e) Memiliki kemampuan dan komitmen internal dalam bentuk dana *sharing* (imbal swadaya), untuk mendukung penyelesaian lingkup pekerjaan renovasi yang telah direncanakan khususnya untuk pekerjaan non standar atau luasan bangunan tambahan yang akan direnovasi;
- f) Memiliki dokumen masterplan sebagai rencana pengembangan sekolah jangka panjang;
- g) Renovasi Sekolah diarahkan pada sebagian atau keseluruhan dari bangunan lama yang akan dipugar atau dibongkar, dan selanjutnya dibangun kembali dengan tampilan dan disain bangunan baru sesuai dengan site plan sekolah;

- h) Bangunan sekolah yang masuk kategori cagar budaya, tidak diperkenankan menjadi sasaran bangunan yang akan direnovasi;
- i) Melakukan proses pengurusan penghapusan aset, khususnya pada sasaran bangunan renovasi yang sudah tidak mendukung fungsi bangunan yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan pengembangan sekolah;
- j) Untuk bangunan yang akan direnovasi namun tidak melalui proses penghapusan aset, maka klausulnya menjadi peningkatan fungsi bangunan;
- k) Untuk bangunan sekolah yang harus melakukan proses penghapusan, maka pelaksanaan Renovasi dapat dilaksanakan setelah surat persetujuan atau surat konfirmasi proses penghapusan aset dikeluarkan oleh pejabat daerah yang berwenang dan diterima oleh pihak sekolah, serta selanjutnya ditembuskan kepada Direktorat PSMA;

Kategorisasi lingkup Renovasi Sekolah sekolah:

- 1) Kategori I, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:
 - a. Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan kembali;
 - b. Perbaikan/perkuatan struktur dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan penghuninya
- 2) Kategori II, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:
 - a. Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan kembali;
 - b. Terjadinya penambahan kapasitas dan jenis fungsi ruang;
- 3) Kategori III, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:
 - a. Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan kembali;

- b. Penambahan kapasitas dan jenis fungsi ruang, serta perubahan alokasi fungsi ruang;
- c. Perubahan model tampak depan bangunan (perwajahan sekolah) dan/atau penambahan asesoris bangunan;
- d. Bangunan yang akan direnovasi berada di atas tanah yang memiliki kejelasan status sebagai hak milik sekolah, yang diperkuat dengan penyertaan sertifikat hak milik dan/atau akta jual beli (sertifikasi sedang dalam proses);
- e. Bantuan renovasi tidak diperuntukkan untuk pembangunan bangunan baru di lokasi lain;
- f. Pencapaian kualitatif yang harus dipenuhi dari bangunan yang telah direnovasi adalah:
 - Peningkatan nilai fungsi bangunan;
 - Disain dan tata letak bangunan yang baru;
 - Bangunan dipugar dan dibangun baru;
 - Kapasitas bangunan yang baru;
 - Perubahan atau perbaikan perwajahan depan sekolah
 - Perbaikan atau perkuatan struktur dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan pengguna
- g. Tidak termasuk sekolah yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan sosial atau mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan sosial sebelumnya.

IV. Renovasi Sanitasi Sekolah

Bantuan ini bertujuan agar tersedianya sarana sanitasi yang memenuhi persyaratan, terbentuknya budaya sekolah yang sehat, bersih dan cinta lingkungan melalui pengembangan

sarana sanitasi, dan terbentuknya perilaku warga sekolah yang mencintai kebersihan, kenyamanan dan keindahan, disertai dengan kesadaran untuk merawat dan menjaganya.

Diprioritaskan untuk SMA dengan kondisi belum memiliki sarana sanitasi yang layak dan memenuhi persyaratan, atau kondisi minim dan terbatasnya ketersediaan sarana sanitasi dibandingkan dengan jumlah siswa dan warga sekolah.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana sanitasi yang ada di lingkungan sekolah difokuskan pada; 1) Penyediaan dan distribusi air bersih, 2) Penyediaan jumlah kebutuhan toilet, 3) Penyediaan tempat cuci tangan, 4) Penanganan air kotor dan limbah, dan 5) Ketersediaan toilet yang bersih dan sehat.

Seluruh kegiatan yang dilakukan tersebut di atas dilakukan melalui metode swakelola.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan renovasi bangunan dan renovasi sanitasi sebagai berikut:

a) *Review* Juklak dan Juknis

Kegiatan *review* naskah Pedoman, Juklak dan Juknis Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi SMA dimaksudkan untuk mengakomodir adanya perubahan program/kegiatan Direktorat Pembinaan SMA dan perubahan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perubahan peraturan terkait.

b) Seleksi Verifikasi Sekolah Calon Penerima Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi SMA

Seleksi dan verifikasi sekolah calon penerima Bantuan Pemerintah Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi SMA dengan mempertimbangkan analisis profil sekolah yang mencakup indikator: kondisi geografis, kebutuhan, dan desain perencanaan.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini meliputi:

1) Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data keadaan sekolah yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan menentukan sekolah calon penerima bantuan. Metode yang digunakan adalah observasi ke sekolah dan wawancara kepada pihak terkait khususnya pihak sekolah mengenai kesiapan sekolah menerima bantuan dan kesesuaian kebutuhan sekolah serta kondisi yang ada di lapangan. Output kegiatan ini adalah data hasil verifikasi sekolah calon penerima Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi SMA.

2) Pengolahan Data Hasil Verifikasi

Kegiatan ini untuk mengentry, mengolah, dan menganalisis data hasil verifikasi. Output kegiatan ini adalah analisis hasil verifikasi sekolah sebagai pertimbangan untuk menentukan sekolah yang akan diundang untuk bimbingan teknis review proposal.

c) Bimbingan Teknis Review Proposal Sekolah Penerima Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi SMA

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis kepada sekolah calon penerima bantuan yang akan melaksanakan pembangunan Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi SMA.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini meliputi:

1) Pelaksanaan Bimtek Review Proposal

Kegiatan bimbingan teknis review proposal Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi SMA bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis pembangunan renovasi bangunan SMA dan review

proposal Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi SMA.

Output yang diharapkan pada kegiatan ini adalah proposal Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi SMA yang telah di review, dan MoU bantuan Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi SMA Tahun Anggaran 2019 antara kepala sekolah penerima Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi SMA dengan Direktorat Pembinaan SMA.

2) Analisis Kegiatan dan Penyusunan Laporan

Analisis kegiatan dan Penyusunan Laporan hasil Bimtek adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan workshop untuk menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis review proposal sekolah calon penerima Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi SMA beserta Penyusunan Laporannya.

d) Pemberian Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi SMA

Penyaluran Bantuan pembangunan Renovasi Bangunan SMA sejumlah 100 Paket, @ Rp.400.000.000,- dengan nilai seluruh bantuan renovasi bangunan SMA berjumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

Penyaluran Bantuan pembangunan Renovasi Sanitasi SMA sejumlah 100 Paket, @ Rp.100.000.000,- dengan nilai seluruh bantuan renovasi sanitasi SMA berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

e) Supervisi Penerimaan Bantuan

Supervisi penerima bantuan dilakukan agar dapat melihat secara langsung ke lapangan kesesuaian pelaksanaan bantuan renovasi yang didanai dari bantuan APBN tahun 2019.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini meliputi:

1) Pelaksanaan supervisi

Supervisi dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan bantuan renovasi tahun 2019. Metode yang digunakan adalah observasi ke lokasi pembangunan renovasi bangunan SMA dan wawancara kepada pihak terkait khususnya panitia pelaksana pembangunan. Output kegiatan ini adalah hasil supervisi pelaksanaan pembangunan renovasi bangunan SMA tahun 2019 sebanyak 30 lokasi.

2) Pengolahan data hasil supervisi

Pengolahan data hasil supervisi dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan supervisi ke sekolah penerima bantuan renovasi dan menindaklanjuti ketika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penerimaan bantuan renovasi.

V. Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (5627.018).

Peningkatan mutu pengelolaan pendidikan salah satunya upaya peningkatannya dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS bertujuan untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi) kepala sekolah dan mendorong sekolah untuk dapat mengelola sekolahnya lebih baik.

Ruang lingkup pembinaan MBS, sebagai berikut:

a) Penyusunan Panduan (051)

Kegiatan ini merupakan penyusunan pedoman Penguatan MBS SMA agar dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep MBS sesungguhnya. Juga memberikan arah pada sekolah agar dapat dengan mudah untuk

menerapkan MBS di sekolah masing-masing walaupun memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain.

Selain itu disusun buku *best practice* MBS berupa praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan MBS. Sekolah yang mampu mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber daya yang ada di sekolah termasuk sumber pendanaan dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut beriringan dengan peningkatan mutu tata kelola sekolah sesuai standar pengelolaan pendidikan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007. Langkah-langkah mewujudkan sekolah dengan tata kelola bermutu diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lainnya.

Mekanisme pelaksanaannya diawali dengan rapat koordinasi antar pihak dan instansi terkait. Dilanjutkan dengan visitasi sekolah untuk mengambil data implementasi MBS dengan cara observasi dan wawancara mendalam serta pengambilan dokumentasi sebagai bahan dasar penyusunan naskah. Setelah itu dilakukan uji keterbacaan naskah sebagai uji publik untuk sekolah dan instansi terkait. Masukan yang didapat sebagai penyempurna naskah pada finalisasi naskah.

b) Verifikasi Calon Penerima Bantuan (052)

Kegiatan verifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi SMA yang melaksanakan program MBS untuk selanjutnya diberikan bantuan/bimtek. Tahapan kegiatan terkait diawali dengan rapat koordinasi antar pihak dan instansi terkait. Kegiatan persiapan dengan melakukan penyusunan instrumen melibatkan instansi terkait. Selanjutnya diadakan pembekalan untuk petugas yang akan ke sekolah agar dapat memperoleh materi yang utuh sehingga dapat melakukan tugas verifikasi dengan sebaik-baiknya.

c) Bimbingan Teknis (053)

Bimbingan teknis MBS meliputi beberapa kegiatan dengan fokus pada beberapa bidang tertentu sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis Penguatan MBS SMA

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis terkait Pedoman MBS dan pemahaman mengenai Permendikbud 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. MBS meliputi komponen manajemen kurikulum dan program pembelajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sarana prasarana pendidikan, dan humas. Tujuannya sekolah dapat menyusun evaluasi diri sekolah dan rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan MBS di sekolah.

Ruang lingkup kegiatan pendukung diawali dengan rapat koordinasi antar pihak dan instansi terkait, penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan teknis dengan sasaran 150 orang, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test.

2) Bimbingan Teknis Revitalisasi Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mewajibkan sekolah/madrasah memiliki perpustakaan. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa setiap sekolah/madrasah menyediakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan serta memerhatikan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Perpustakaan tersebut terdiri atas standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan

perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Standar Nasional Perpustakaan tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan pada satuan pendidikan sekolah/madrasah, baik negeri maupun swasta.

Ketentuan bahwa setiap sekolah/madrasah harus memiliki perpustakaan juga diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana ruang perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Bimbingan Teknis Revitalisasi Perpustakaan SMA dilakukan agar SMA mampu mencapai kelima standar nasional perpustakaan khususnya standar pelayanan, standar pengelolaan, standar penyelenggaraan perpustakaan.

Revitalisasi perpustakaan sebagai upaya peningkatan standart pelayanan dan manajemen perpustakaan di sekolah.

Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai berikut: rapat koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan teknis, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test.

3) Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi SMA

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis terkait 8 Standar Nasional Pendidikan kepada 100 sekolah yang belum diakreditasi (BT), tidak diakreditasi (TT) dan Akreditasi C. Harapannya sekolah akan memiliki persiapan dini untuk penilaian akreditasi di tahun

selanjutnya dengan melakukan evaluasi diri sekolah dan rencana tindak persiapan akreditasi sekolah.

Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai berikut: rapat koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan teknis, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test.

4) Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis pada SPK jenjang SMA khususnya mengenai pembinaan nasionalisme kebangsaan, peraturan pengganti dari permendikbud 31 tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia, dapodik untuk SPK, kebijakan akreditasi SPK SMA, serta tindak lanjut program kerjasama SMA dan SPK. Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai berikut: penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan teknis, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test.

5) Bimtek Pengelolaan Sarana Prasarana

Kegiatan ini merupakan bimbingan teknis dalam bentuk *workshop* terkait standar sarana prasarana sesuai permendiknas nomor 24 tahun 2007. Bimtek ini memberikan pemahaman pada para pemangku kebijakan di daerah, dalam hal ini 34 Dinas Pendidikan Provinsi dan 374 Kantor Cabang Dinas mengenai standar sarana prasarana, baik mengenai ukuran dan lulusan maupun pemeliharaan dan perawatannya. Termasuk didalamnya mengenai bangunan tahan gempa. Mengingat Indonesia adalah daerah rawan gempa. Perlu dilakukannya bimtek ini karena cukup tingginya pergantian pejabat daerah sehingga perlu memberikan mereka bekal agar dapat

membina sekolah menengah atas di daerah. informasi terkait kebijakan pelaksanaan berita acara serah terima barang milik negara (BASTBMN). Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini hanya pada pelaksanaan bimbingan teknis.

d) Supervisi SPK (055)

Kegiatan supervisi yang dilakukan adalah supervisi SPK. Kegiatan ini mengevaluasi penyelenggaraan SPK dan keterlaksanaan kerjasama SMA dan SPK jenjang SMA. Berkoordinasi dengan Setditjen Dikdasmen sebagai koordinator perijinan SPK. Supervisi tersebut sebagai sampel untuk mengukur keberhasilan program dan memperoleh evaluasi keterlaksanaan program kerjasama SMA dan SPK jenjang SMA.

Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai berikut: rapat koordinasi, penyusunan instrumen supervisi, pembekalan petugas, dan pengolahan data hasil supervisi.

VI. Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan (5627.020).

Bantuan diberikan kepada sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta untuk meningkatkan/melengkapi sarana dan prasarana yaitu peralatan pendidikan. kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung proses belajar mengajar pada kurikulum 2013.

Metode pelaksanaan penyediaan peralatan pendidikan adalah dengan cara *e-purchasing* melalui aplikasi e-katalog LKPP yang dikerjakan oleh KPA bersama dengan tim unit layanan pengadaan (ULP) dan tim teknis Direktorat Pembinaan SMA. Tim teknis dalam hal ini dibantu oleh jasa tenaga ahli yang memiliki kompetensi dibidang TIK.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan pendidikan sebagai berikut:

a) Penyusunan Juknis dan TOR

Petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan bantuan peralatan pendidikan disusun dan digandakan masing-masing sebanyak 2200 eks.

b) Persiapan lelang dan pembahasan pengadaan dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan TP4P Kejaksaan Agung.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang /Jasa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan e-purchasing, maka diperlukan persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan lelang/pengadaan peralatan pendidikan. Kegiatan persiapan yang dilakukan adalah review juknis TIK, analisis biaya pengiriman dan penyusunan, pembahasan/evaluasi lelang.

c) Bimbingan Teknis Operator Komputer Pembelajaran

Kegiatan bimbingan teknis operator komputer pembelajaran merupakan kegiatan pemberian bimbingan teknis kepada sekolah penerima bantuan peralatan pendidikan.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini meliputi :

1) Pelaksanaan bimbingan teknis operator komputer pembelajaran

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah guru/operator/ penanggungjawab TIK di sekolah mampu

melaksanakan administrasi penerimaan barang, melakukan pemeriksaan barang, melakukan instalasi jaringan lokal, menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penerimaan barang.

- 2) Analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test kegiatan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan bimtek untuk melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis serta menganalisis dan mengolah hasil pre test dan post test.

d) Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan pemerintah peralatan pendidikan sejumlah 2.152 Paket diberikan untuk jenis bantuan peralatan pendidikan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 389.860.000,-.

Termasuk didalamnya bantuan sosial untuk penanggulangan bencana dalam bentuk barang untuk bantuan kelas darurat/rehab dan school kit, pengadaan peralatan dan perabot dengan total bantuan senilai Rp. 28.085.000.000,-.

e) Supervisi Penerimaan Bantuan

Supervisi penerima bantuan dilakukan agar dapat melihat secara langsung ke lapangan kesesuaian pelaksanaan bantuan peralatan pendidikan yang didanai dari bantuan APBN tahun 2019. Dilaksanakan sampel pada 140 lokasi dengan jumlah sekolah menyesuaikan sesuai kondisi geografis sekolah penerima bantuan.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini meliputi:

1) Pelaksanaan supervisi

Supervisi bagi sekolah penerima bantuan peralatan pendidikan ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana peralatan pendidikan tersebut digunakan oleh

sekolah. Selain itu untuk mengetahui apakah seluruh peralatan pendidikan yang diberikan sudah diterima oleh sekolah dan diketahui kondisinya layak pakai.

2) Pengolahan data hasil supervisi

Pengolahan data hasil supervisi dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan supervisi ke sekolah penerima bantuan peralatan pendidikan dan menindaklanjuti ketika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penerimaan bantuan peralatan pendidikan.

VII. Sekolah Yang Melaksanakan Program UKS (5627.022).

a) Penyusunan Panduan (051)

Kegiatan ini merupakan penyusunan praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah khususnya untuk sekolah adiwiyata dan pemenang lomba sekolah sehat. Sehingga langkah-langkah mewujudkan sekolah sehat tersebut dapat menjadi model bagi sekolah lainnya.

Tahapan kegiatan terkait diawali dengan rapat koordinasi antar pihak dan instansi terkait. Selanjutnya dilakukan visitasi sekolah diperlukan untuk mengambil data implementasi dengan cara observasi dan wawancara mendalam serta pengambilan dokumentasi tentang praktik baik yang telah dilakukan sekolah sebagai bahan dasar penyusunan naskah. Setelah pengumpulan bahan dilakukan maka dilakukan kegiatan penyusunan dan pembahasan naskah. Dilanjutkan dengan uji keterbacaan naskah sebagai uji publik untuk sekolah dan instansi terkait. Masukan yang didapat sebagai penyempurna naskah pada finalisasi naskah.

b) Bimbingan Teknis (053).

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis terkait sanitasi sekolah dan penggerakkan sekolah untuk memiliki program pembudayaan sanitasi sekolah untuk membentuk

pola hidup bersih dan sehat. Untuk sekolah yang belum mengikuti program adiwiyata atau lomba sekolah sehat dapat terpacu untuk menata lingkungan sekolah. Sedangkan untuk sekolah yang sudah meraih penghargaan memiliki program untuk mempertahankan kelaikan penghargaan tersebut. Selain itu sekolah juga akan mendapatkan bantuan pemerintah untuk renovasi sanitasi sekolah. Oleh karena itu akan diikuti dengan pemberian materi berkenaan dengan sarpras serta review proposal yang diakhiri dengan penandatanganan surat perjanjian penggunaan dana bantuan. Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai berikut: rapat koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan teknis, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test.

c) Pelaksanaan Kegiatan (054)

Pelaksanaan kegiatan UKS terdiri dari 2 yaitu:

1) Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat

Kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mensosialisasikan perlunya peran guru/pendidik dalam Narkoba, HIV, AIDS. Tujuannya untuk menciptakan kondisi sekolah yang memungkinkan siswa berkembang secara sehat dalam hal fisik, mental, spiritual dan sosial dengan meningkatkan peran dan pemberdayaan guru serta bersahabat dengan siswa melalui komunikasi. Dengan terciptanya kondisi sekolah yang nyaman maka siswa memiliki keleluasaan untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler serta berkompetisi sehat baik di bidang akademik maupun non akademik.

2) Deklarasi Sekolah Sehat

Kegiatan pemberian bimbingan teknis terkait sanitasi sekolah dan penggerakkan sekolah untuk memiliki program pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah serta untuk menggerakkan sekolah untuk membentuk

pola hidup bersih dan sehat. Akan dipilih satu sekolah negeri di 6 provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi untuk pencairan deklarasi sekolah sehat. Deklarasi ini diharapkan dapat berimbas pada sekolah lain di daerah tersebut.

Ruang lingkup kegiatan ini diawali dengan rapat koordinasi antar pihak dan instansi terkait. Kegiatan persiapan deklarasi dengan melakukan penyusunan panduan dan materi. Selanjutnya diadakan pembekalan untuk petugas yang akan ke sekolah, karena petugas akan masuk ke kelas untuk menggerakkan siswa. Selanjutnya petugas bersama unsur dari sekolah akan melakukan gerakan nyata untuk menata lingkungan sekolah. Pelaksanaan deklarasi dilaksanakan di 6 lokasi yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

VIII. Sekolah Terbuka Yang Mendapatkan Bantuan Operasional (5627.025).

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu memerlukan langkah-langkah konkrit untuk menjangkau anak-anak dari masyarakat lapisan bawah yang kurang beruntung karena kondisi sosial ekonomi dan faktor geografis. Di samping itu, mereka juga mempunyai keterbatasan waktu sehingga tidak dapat belajar di sekolah reguler karena harus membantu orang tua untuk bekerja. Untuk memberikan layanan pendidikan menengah bagi anak-anak tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000.000,-, yaitu:

- a. Bantuan pendidikan SMA terbuka untuk 4207 siswa dengan jumlah bantuan per siswa Rp. 1.100.000,-. Jumlah bantuan pendidikan SMA Terbuka seluruhnya Rp. 4.627.700.000,-.

- b. Bantuan operasional vokasi untuk SMA Terbuka untuk 7 sekolah dengan jumlah bantuan seluruhnya Rp. 372.300.000,-.

Sasaran penerima bantuan ini adalah sekolah menengah atas yang menjadi induk bagi SMA Terbuka dengan memberikan bantuan langsung pada sekolah.



**FOTO BERSAMA SUBDIT PESERTA DIDIK, DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

perencanaan program. Beberapa instansi tersebut adalah Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Alur proses perencanaan itu sendiri ditentukan dan diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan DPR dan pemerintah. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan program/kegiatan pembinaan SMA untuk tahun anggaran tahun 2019 baik di pusat maupun anggaran di provinsi.

Rencana Kerja Subdit Peserta Didik Tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat 6 (enam) tugas pokok yang akan dilaksanakan oleh Subdirektorat Peserta Didik yaitu diantaranya:

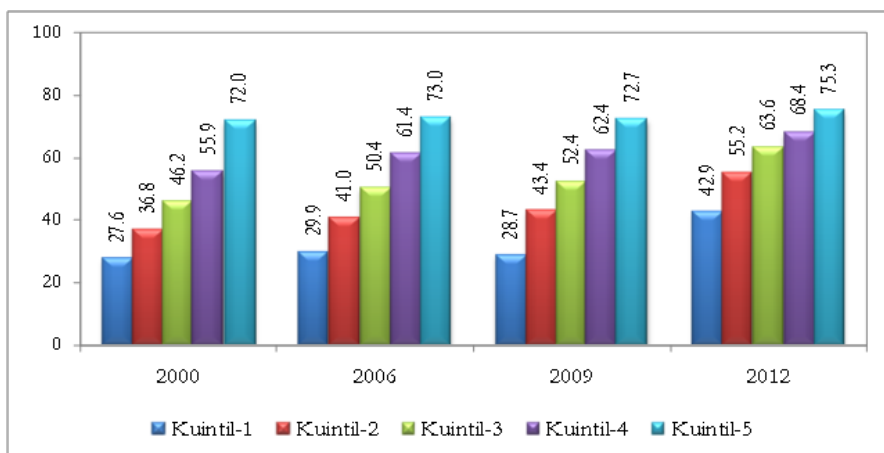
1. melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar;
3. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Siswa yang mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa;
4. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
5. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade;

6. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler.

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Siswa yang mendapatkan Program Indoensia Pintar

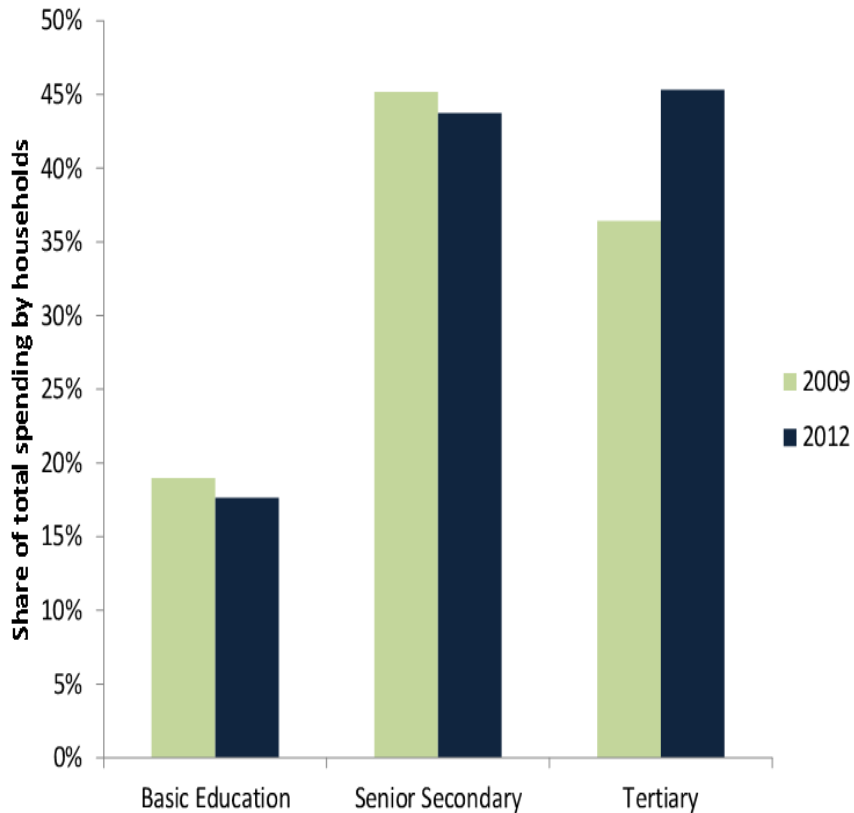
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan pemberian bantuan secara langsung kepada siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam pelaksanaannya, program PIP ini dilaksanakan oleh setiap Direktorat teknis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diampu, dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan PIP untuk jenjang Pendidikan SMA. PIP dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi resiko putus sekolah pada keluarga kurang mampu yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor tersebut menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Badan Perencanaan Nasional melalui Suvey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) membuat suatu analisa perbandingan antara komposisi partisipasi pendidikan seorang siswa dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang dihitung dari rata-rata pengeluaran keluarga dan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok perlinaan (Quantile). Perlinaan/Quantile 5 adalah keluarga paling kaya dan Quantile 1 adalah keluarga termiskin. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai hal tersebut.



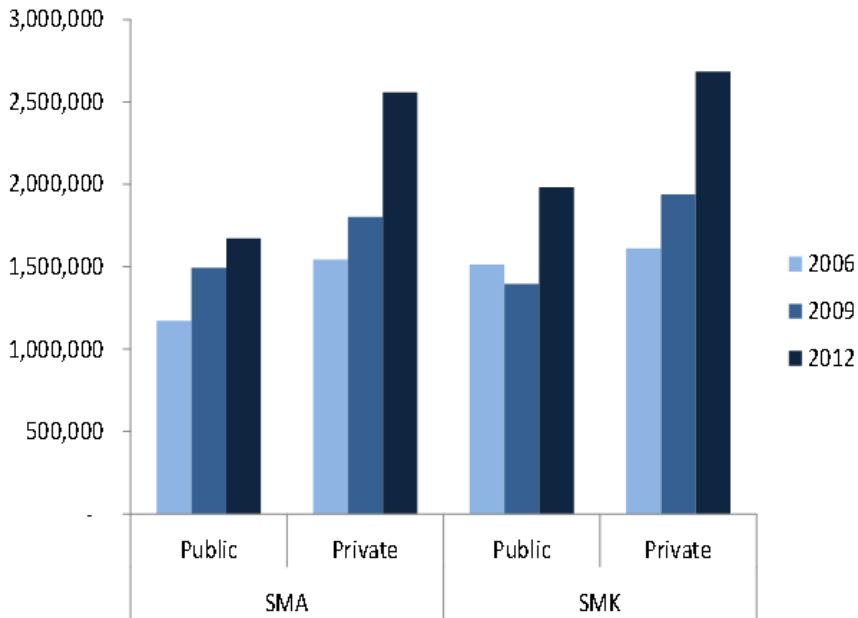
Bagan 1 Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga Tahun 2012. Sumber: Bapenas, Susenas education modules, 2012

Ilustrasi diatas menunjukan bahwa faktor ekonomi keluarga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Terjadi kesenjangan partisipasi antara keluarga kaya dan miskin. Fenomena tersebut menunjukan bahwa jenjang Pendidikan Menengah didominasi oleh siswa yang berasal dari keluarga kaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah komoditas yang mahal dan sulit dijangkau oleh kaum miskin.

Tidak terjangkau pendidikan bagi siswa miskin dikarenakan tingginya biaya pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah. Pada dasarnya, pendidikan yang baik membutuhkan biaya yang tinggi. Pada tahun 2012, Susenas mencatat alokasi pembiayaan Rumah Tangga untuk Pendidikan Menengah masih cukup tinggi yakni sebesar 45%. Berikut ini adalah ilustrasi pengeluaran untuk pendidikan yang terbebankan pada rumah tangga.



Bagan 2 Pengeluaran untuk pendidikan yang terbebankan pada rumah tangga Tahun 2012. Sumber: APBN, APBD for public spending, Susenas education modules for privatespending, 2012. Kontribusi rumah tangga untuk sekolah menengah cukup tinggi, yakni sebesar 45 persen (negeri dan swasta). Persentase tersebut hampir sama dengan pendidikan tinggi. Secara lebih spesifik, World Bank mencatat bahwa biaya pendidikan sekolah pada tahun 2012 untuk SMA Negeri adalah sebesar 1,7 Juta. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai hal tersebut.



Bagan 3 Pengeluaran rata-rata menurut jenis sekolah Tahun 2012. Sumber: World Bank calculations using Susenas, 2012

Ilustrasi diatas menunjukan biaya pendidikan semakin meningkat. Hal ini menunjukan bahwa biaya Pendidikan SMA semakin mahal bagi Rumah Tangga miskin, khususnya bagi keluarga miskin yang memiliki pendapatan di bawah Rp300.000,-/bulan.

Deskripsi di atas menunjukan bahwa PIP merupakan salah satu program prioritas yang hendaknya diselenggarakan dengan baik oleh direktorat teknis terkait agar siswa kurang mampu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Pelaksanaan PIP diharapkan berjalan dengan efektif dan efisien, oleh karena itu diperlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan tersebut terdiri dari:

a. Penyusunan Petunjuk Teknis;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Petunjuk Teknis yang akan digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota maupun sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Dokumen Petunjuk Teknis ini merupakan dokumen yang cukup penting dalam pelaksanaan PIP.

b. Verifikasi Calon Penerima PIP;

Tahapan ini dilaksanakan sebagai proses tindak lanjut atas data penerima PIP SMA yang diterima oleh Direktorat Pembinaan SMA. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi data yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyaluran PIP SMA Tahun 2019.

c. Pelaksanaan *Workshop* PIP;

Koordinasi merupakan suatu hal yang cukup penting dalam keterlaksanaan suatu program. Salah satu bentuk koordinasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan PIP ini adalah melalui kegiatan *Workshop*. Pelaksanaan *Workshop* dilaksanakan untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, penyamaan persepsi, dan konfirmasi data penerima PIP.

d. Pelaksanaan Diseminasi Program PIP SMA tingkat provinsi

Direktorat pembinaan SMA melaksanakan kegiatan diseminasi di 34 provinsi. Kegiatan tersebut akan melibatkan kepala sekolah diseluruh Indonesia. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan anggaran, maka dalam kesempatan tersebut akan dikoordinasikan terkait dengan PIP SMA. Dalam kesempatan tersebut direktorat PSMA akan mengirimkan 1 orang petugas yang akan mengoordinasikan program PIP.

e. Penyaluran Dana PIP;

Penyaluran Bantuan Program Indonesia disalurkan kepada peserta didik penerima melalui rekening tabungan pribadi peserta didik. Rekening tabungan pribadi peserta didik

dibuatkan oleh Bank Penyalur PIP SMA. Direktorat Pembinaan SMA akan menjalin kerjasama dengan Bank Penyalur dalam proses penyaluran PIP. Penyaluran bantuan dilaksanakan kepada seluruh siswa yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA.

Dana PIP disalurkan dalam dua rangkaian proses, yakni: melalui KPPN Jakarta III kepada Bank penyalur, selanjutnya Bank penyalur melakukan penyaluran ke rekening peserta didik dalam jangka waktu yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dan Bank Penyalur.

Pelaksanaan penyaluran akan dilaksanakan pada Bulan Mei untuk Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2019, dan penyaluran kedua akan dilaksanakan pada Bulan September untuk mengakomodir Peserta Didik baru pada Tahun Ajaran 2019/2020.

Pengambilan dana dilaksanakan secara langsung oleh peserta didik di Kantor Bank Penyalur. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Kantor Bank BNI, maka pengambilan dana bantuan dikuasakan kepada kepala sekolah, dan selanjutnya kepala sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

f. **Supervisi Penerima PIP.**

Kegiatan Supervisi penerima bantuan PIP dilaksanakan untuk meninjau secara langsung terkait penyaluran kepada penerima Kartu Indonesia Pintar tahun anggaran 2019 sebagai tindak lanjut data penerima PIP SMA dan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke lokasi sasaran penerima PIP SMA.

g. ***Monitoring* Evaluasi Percepatan Pencairan**

Program PIP merupakan program yang selalu dipantau keterlaksanaannya secara periodik oleh Kantor Staff Presiden (KSP), TNP2K, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait hal tersebut maka kemdikbud dalam hal ini direktorat PSMA harus melaporkan perkembangan pelaksanaan program PIP secara berkesinambungan. Untuk dapat memberikan data dan informasi dalam pelaksanaan program PIP tersebut maka direktorat PSMA harus melaksanakan pemantauan (*monitoring*) keterlaksanaan PIP.

h. Roadshow Penyerahan KIP

Program PIP merupakan salah satu program prioritas nasional yang mendukung program nawacita. Oleh karena itu, presiden sangat memperhatikan keterlaksanaan program ini. Dalam banyak kesempatan kunjungan kerja presiden membagikan kartu Indonesia pintar secara simbolis kepada siswa sasaran. Untuk mendukung hal tersebut maka direktorat PSMA mengalokasikan anggaran untuk keberhasilan hal tersebut melalui kegiatan roadshow penyerahan KIP yatim piatu.

2. Pendidikan Karakter Bangsa

Meningkatnya partisipasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan kepribadian dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh Bangsa Indonesia, perilaku tersebut diantaranya adalah: penggunaan narkoba; tindak kekerasan di sekolah; pornografi, dll. Pendidikan karakter mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan karakter guna mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia.

Sejalan dengan visi pendidikan nasional yakni menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna), maka Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2019 ini akan melaksanakan program yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan Karakter Bangsa. Pembinaan karakter

bangsa dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan, yakni: kegiatan pembinaan kepemimpinan dan kepanduan; pembinaan peserta didik SMA; penumbuhan budaya cinta damai; dan pemberian bantuan kepada SMA untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan karakter bangsa.

Program ini adalah salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 yang bertujuan untuk mengaktualisasikan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, melalui kegiatan ini siswa diharapkan mampu mengaplikasikan sikap kerjasama, nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, jujur, peduli, berfikir kritis, positif, dapat menumbuhkan kembangkan sikap hormat dan saling menghargai dalam keberagaman, meningkatkan disiplin diri, tanggung jawab, kesadaran terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya, hidup bersih dan sehat, melatih kewirusahaan, menjalin silaturahmi antar siswa dari berbagai wilayah di Indonesia, memperkuat kesatuan bangsa, membangun jiwa kepemimpinan di kalangan generasi muda, meningkatkan kematangan jiwa dan kestabilan emosi dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku terpuji, serta menyalurkan bakat dan minat serta kreativitas siswa dalam rangka pembinaan karakter bangsa.

Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. mengaktualisasikan potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
- b. mengaplikasikan sikapkerjasama, nasionalisme, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, jujur, peduli, berfikir kritis dan positif,

- c. menumbuhkan mengembangkan sikap hormat dan saling menghargai dalam keberagaman;
- d. meningkatkan disiplin diri, tanggung jawab, kesadaran terhadap lingkungan fisik, masyarakat dan cultural;
- e. menjalin silaturahmi antar siswa dari berbagai wilayah untuk memperkuat kesatuan bangsa;
- f. membangun jiwa kepemimpinan di kalangan generasi muda;
- g. membudayakan lingkungan sekolah sehat dan bersih;
- h. mengembangkan jiwa kependuan.
- i. mengembangkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan;
- j. meningkatkan kematangan jiwa dan kestabilan emosi dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku terpuji;
- k. menyalurkan bakat dan minat serta kreativitas siswa dalam rangka pembinaan karakter bangsa.

Untuk mencapai tujuan program pendidikan karakter bangsa ini, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Kawah kepemimpinan pelajar;
Kawah Kepimimpinan Pelajar merupakan kegiatan yang ditujukan untuk penanaman dan penguatan nilai-nilai kepemimpinan pada peserta didik. Kegiatan ini akan melibatkan ketua OSIS yang terpilih dari seluruh provinsi. Berbagai nilai dan norma yang baik akan disampaikan pada peserta dalam kegiatan ini, seperti: penguatan nilai kedisiplinan, penguatan nilai spiritual, dan cinta tanah air. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat saling berbagi informasi dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan bagi setiap peserta.
- b. Pemberian *blockgrant* pendidikan karakter bangsa;

Direktorat Pembinaan SMA pada Tahun 2019 memberikan Bantuan kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan karakter. Hal ini ditujukan untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang terpilih untuk lebih mengoptimalkan pembinaan pendidikan karakter untuk siswa di sekolahnya. Melalui hal tersebut, diharapkan sekolah penerima bantuan dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam pelaksanaan program pembinaan pendidikan karakter dan dapat mengimbaskan program yang dikembangkannya kepada sekolah lain di wilayahnya. Total jumlah yang mendapatkan Bantuan Pendidikan Karakter 110 paket dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemberian *blockgrant* pendidikan
 - a. Bantuan Pendidikan Karakter ke SMA 50 Paket, besar dana perpaket Rp25.000.000,00
 - b. Bantuan Pendidikan Untuk Event Sekolah pilihan 10 Paket, besar dana per paket Rp50.000.000,00
- 2) Pemberian pembinaan dan pencegahan tindakan perilaku siswa SMA diberikan 50 Paket, besar dana per paket Rp30.000.000,00
- c. Kemah pramuka tingkat nasional dan provinsi;

Pramuka adalah suatu kegiatan kependuan yang menjadi ekstrakurikuler wajib bagi Satuan Pendidikan. Kepramukaan merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan sebagai wahana bagi siswa tingkat Sekolah Menengah Atas untuk menggali, mengekspresikan, mengaktualisasikan kreatifitas, karakternya dalam bentuk sikap dan tindakan. Terkait dengan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan

SMA melaksanakan kegiatan Pramuka Tingkat Nasional. Kegiatan ini akan melibatkan peserta didik terpilih dari 34 provinsi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional. Dalam kegiatan ini, Direktorat Pembinaan SMA juga akan berkoordinasi dengan organisasi kepramukaan tingkat nasional dalam pelaksanaan kegiatannya.

Selain pelaksanaan Kegiatan kepramukaan tingkat nasional, kegiatan kepramukaan juga dilaksanakan pada tingkat provinsi melalui dana dekonsentrasi di 34 provinsi. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan tingkat provinsi ditujukan untuk memperoleh sasaran yang lebih luas. Dinas Pendidikan Provinsi akan mengundang peserta dari sekolah sebagai perwakilan atau representasi dari setiap Kabupaten/Kota. Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA akan mengirimkan narasumber yang akan menyampaikan materi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

d. Diseminasi program peserta didik tahun 2019;

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan peserta didik SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan kegiatan Diseminasi Program Peserta Didik Tahun 2019. Kegiatan ini akan melibatkan 34 Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pesertanya. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana sosialisasi program peserta didik SMA Tahun 2019. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat terwujud kesamaan persepsi antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan pembinaan peserta didik. Dalam kegiatan ini juga akan dilaksanakan koordinasi antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan program-program pembinaan peserta didik. Melalui koordinasi

tersebut, diharapkan dapat terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program pembinaan peserta didik sehingga dapat terlaksana secara optimal.

- e. Finalisasi SOP pelaksanaan kegiatan peserta didik tahun 2019;

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Subdirektorat Peserta Didik adalah menyusun Norma, Standar, Pelaksanaan, dan Kegiatan Pembinaan Peserta Didik. Sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan Tupoksi tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA, melalui Subdirektorat Peserta Didik melaksanakan kegiatan Finalisasi SOP Pelaksanaan Kegiatan Peserta Didik Tahun 2019. SOP ini ditujukan untuk menjadi acuan bagi sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengimplementasikan kegiatan pembinaan peserta didik. Hal ini menjadi penting agar proses pembinaan peserta didik dapat terlaksana secara berkesinambungan.

3. Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi

Output ini bertujuan untuk menyalurkan beasiswa kepada siswa berprestasi. Dalam pencapaian perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Bermutu, Berkesetaraan *gender* dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota.

Untuk memacu siswa dalam mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, diperlukan sebuah budaya kompetisi, baik di bidang keilmuan dan dibidang olah raga. Pembentukan budaya kompetisi tersebut difasilitasi oleh pemerintah melalui penyelenggaraan olimpiade sains (nasional & internasional) serta penyelenggaraan olimpiade olahraga dan seni olah raga pelajar SMA. Sebagai bentuk apresiasi, dan untuk memotivasi siswa untuk berprestasi, pemerintah memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bentuk beasiswa

prestasi SMA. Beasiswa ini diberikan kepada para siswa-siswi pemenang Olimpiade, Lomba, dan Festival, dan kegiatan peningkatan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

Direktorat Pembinaan SMA akan memberikan beasiswa bakat dan prestasi kepada siswa-siswi yang layak menerima beasiswa tersebut. Beasiswa ini akan diberikan kepada siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan kegiatan Kesiswaan Tingkat Nasional lainnya. Melalui beasiswa ini diharapkan siswa dapat mengembangkan bakat dan prestasi yang dimiliki sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan program ini, telah dipersiapkan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Verifikasi Calon Penerima Beasiswa;

Verifikasi calon penerima beasiswa merupakan kegiatan persiapan yang dilaksanakan dengan metode *review* data penjangkaran beasiswa bakat dan berprestasi. Data individual siswa tersebut kemudian diolah untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Surat keputusan Direktur Pembinaan SMA. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan Olimpiade, Lomba, Festival, dan kegiatan peningkatan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

b. Penyaluran Beasiswa Bakat dan Prestasi.

Penyaluran beasiswa bakat dan prestasi dapat dilakukan melalui hasil pengolahan data peserta didik yang mengikuti kegiatan Olimpiade, Lomba, Festival, dan kegiatan peningkatan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA, kemudian ditetapkan oleh Surat

Keputusan Direktur Pembinaan SMA. Siswa berprestasi mendapatkan bantuan beasiswa senilai Rp3.500.000/siswa.

4. Siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade

Output ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan lomba, festival dan olimpiade. Kegiatan siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade dilaksanakan untuk tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, kerkesetaraan *gender* dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Semua kabupaten dan kota dalam pencapaian perluasan dan pemerataan akses Pendidikan bermutu, Berkesetaraan *gender* dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota.

Pembinaan peserta didik memiliki peran yang strategis dalam keberhasilan pembangunan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yakni: “tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sejumlah program pembinaan peserta didik, yakni berupa lomba, olimpiade, atau pun festival tingkat nasional dalam rangka mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Pengembangan potensi peserta didik semakin krusial pada jenjang Pendidikan Menengah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada usia Pendidikan Menengah (usia 16 s.d. 18 Tahun) Peserta Didik lebih rentan terhadap pengaruh negatif, mengingat di era globalisasi ini berbagai informasi dapat dengan mudah diakses. Berbagai

konten negatif, seperti: pornografi, radikalisme, dan lainnya dapat dengan mudah diakses oleh generasi muda. Melalui informasi, berbagai nilai-nilai asing juga dapat masuk dengan mudah, dimana nilai tersebut tidak selalu positif tetapi juga negatif. Hal negatif tersebut dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia yang akan berakibat pada pergeseran nilai dan norma sehingga menghasilkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma Bangsa Indonesia, seperti pergaulan bebas dan berbagai gaya hidup hedonisme lainnya. Selain itu, peredaran Narkoba juga semakin marak saat ini, hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh *stakeholder* pendidikan dalam upaya membentuk generasi muda Indonesia yang unggul.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Direktorat Pembinaan SMA memiliki beberapa program pembinaan peserta didik, seperti: lomba, olimpiade, dan festival. Melalui program-program yang melibatkan peserta didik secara langsung, diharapkan dapat mengarahkan peserta didik SMA untuk terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Selain itu, program-program pembinaan peserta didik juga diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki. Program lomba, olimpiade, dan festival dikembangkan dalam lingkup keilmuan, olah raga, dan seni.

Direktorat Pembinaan SMA akan mengikuti lomba, festival dan olimpiade pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian keluaran dilakukan dengan skema atau langkah sebagai berikut:

a. Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah mendorong minat siswa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha mendorong minat tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Olimpiade 9 (sembilan) bidang pengetahuan, yaitu: Fisika, Kimia, Biologi, Matematika,

Astronomi, Informatika, Ekonomi, informatika, dan Geografi. Untuk menumbuhkan budaya kompetisi di kalangan para siswa SMA, olimpiade keilmuan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, nasional sampai dengan internasional. Ajang ini juga sekaligus menjadi alat seleksi untuk mewakili Indonesia di olimpiade internasional. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan OSN seperti: 1). Koordinasi Pelaksanaan; dan 2). Penyelenggaraan Lomba.

b. Siswa yang mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)

Dalam rangka memfasilitasi minat dan bakat peserta didik dalam bidang seni, maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN). Kegiatan festival ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik SMA untuk menyalurkan minat dan bakat seni yang dimiliki. Selain itu, festival dan lomba seni ini juga merupakan sarana bagi siswa untuk menunjukan bakatnya. Kegiatan ini juga merupakan suatu upaya dari Direktorat Pembinaan SMA untuk penghargaan terhadap bakat yang dimiliki siswa dalam bidang seni. Berikut ini adalah Berikut ini adalah rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan FLS2N. Berikut ini adalah rangkaian pada kegiatan FLS2N yang akan dilaksanakan seperti: 1). Penyusunan Materi; 2). Koordinasi Pelaksanaan; dan 3) Penyelenggaraan Lomba.

c. Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Dalam rangka meningkatkan semangat berolahraga di kalangan siswa SMA, akan dilaksanakan kompetisi olahraga secara berjenjang dari tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional dalam kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun fisik yang sehat, kuat

dan membentuk karakter siswa untuk bersikap sportif, jujur, berprestasi, menumbuhkan kecerdasan estetika, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah rangkaian pada kegiatan O2SN yang akan dilaksanakan seperti: 1). Penyusunan Materi; 2). Koordinasi Pelaksanaan; dan 3). Penyelenggaraan Lomba.

d. Siswa yang mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)

Banyak ilmuwan terkemuka dari berbagai cabang ilmu pengetahuan lahir dari lomba yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1997. Sejak saat itu setiap tahun dilaksanakan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) bagi para remaja (siswa SLTA dan SLTP). Pada tahun 2019 ini Lomba Penelitian siswa SMA dilaksanakan melalui program Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).

Tujuan dari pelaksanaan OPSI adalah memotivasi siswa SMA berkreasi dalam berbagai bidang ilmu sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, OPSI juga ditujukan untuk memfasilitasi komunitas peneliti tingkat siswa SMA dari berbagai daerah untuk melakukan temu karya penelitian. Melalui OPSI diharapkan akan dapat menjaring siswa SMA yang memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang penelitian yang akan mewakili Indonesia di ajang internasional. Bidang ilmu yang dilombakan dalam OPSI dikelompokkan menjadi tiga bidang, yakni: Sains Terapan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, dan Sains Dasar. Berikut ini mekanisme OPSI tahun 2019 seperti: 1). Penyusunan Materi; dan 2). Penyelenggaraan Lomba.

e. Siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Tingkat Nasional

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran analitik siswa dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapat, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Ajang debat

ini akan membicarakan isu-isu hangat mengenai perkembangan kondisi nasional maupun internasional yang terjadi. Lomba Debat ini akan dipertandingkan didalam dua ajang yang berbeda, yakni Lomba Debat dalam Bahasa Indonesia (LDBI) dan Debat dalam Bahasa Inggris dalam *event* National Schools Debating Championship (NSDC). Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dilaksanakan dengan *Asian Parliamentary System*. Setiap provinsi akan diwakili oleh satu tim debat yang terdiri dari tiga orang. Berikut rangkaian kegiatan Siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Tingkat Nasional seperti: 1). Penyusunan Materi; dan 2). Penyelenggaraan Lomba.

5. Siswa yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler

Output ini bertujuan untuk siswa yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler yang memperoleh medali pada olimpiade atau lomba tingkat internasional, dengan demikian Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan *Gender* dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat di Semua Kabupaten dan Kota.

Pembinaan peserta didik memiliki peran yang strategis dalam keberhasilan pembangunan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yakni: “tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sejumlah program pembinaan peserta didik, yakni berupa lomba,

olimpiade, atau pun festival tingkat nasional dalam rangka mengembangkan minat dan bakat peserta didik.

Pengembangan potensi peserta didik semakin krusial pada jenjang Pendidikan Menengah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada usia Pendidikan Menengah (usia 16 s.d. 18 Tahun) Peserta Didik lebih rentan terhadap pengaruh negatif, mengingat di era globalisasi ini berbagai informasi dapat dengan mudah diakses. Berbagai konten negatif, seperti: pornografi, radikalisme, dan lainnya dapat dengan mudah diakses oleh generasi muda. Melalui informasi, berbagai nilai-nilai asing juga dapat masuk dengan mudah, dimana nilai tersebut tidak selalu positif tetapi juga negatif. Hal negatif tersebut dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia yang akan berakibat pada pergeseran nilai dan norma sehingga menghasilkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma Bangsa Indonesia, seperti pergaulan bebas dan berbagai gaya hidup hedonisme lainnya. Selain itu, peredaran Narkoba juga semakin marak saat ini, hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh *stakeholder* pendidikan dalam upaya membentuk generasi muda Indonesia yang unggul.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Direktorat Pembinaan SMA memiliki beberapa program pembinaan peserta didik, seperti lomba, olimpiade, dan festival. Melalui program-program yang melibatkan peserta didik secara langsung, diharapkan dapat mengarahkan peserta didik SMA untuk terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Selain itu, program-program pembinaan peserta didik juga diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki. Program lomba, olimpiade, dan festival dikembangkan dalam lingkup keilmuan, olah raga, kewirausahaan, dan seni.

Program peserta didik yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA juga tidak hanya sampai pada tingkat nasional

saja, tetapi juga sampai pada tingkat internasional. Lomba dan olimpiade peserta didik tingkat internasional juga memiliki arti penting bagi Bangsa Indonesia. Hal tersebut, menjadi sebuah sarana ataupun wahana bagi Indonesia untuk dapat menunjukkan kompetensi bangsanya. Prestasi Indonesia dalam pelaksanaan lomba ataupun olimpiade tingkat internasional juga cukup membanggakan. Peserta didik yang dikirim mewakili Indonesia untuk mengikuti lomba ataupun olimpiade tingkat internasional selalu dapat mendapatkan medali. Hal tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Bangsa Indonesia dalam tataran internasional. Berikut ini adalah beberapa lomba ataupun olimpiade tingkat internasional yang secara rutin diikuti oleh Indonesia sebagai berikut:

- a. Olimpiade Matematika Internasional (*International Mathematical Olympiad, IMO*);
- b. Olimpiade Fisika Internasional (*International Physics Olympiad, IPhO*);
- c. Olimpiade Kimia Internasional (*International Chemistry Olympiad, IChO*);
- d. Olimpiade Biologi Internasional (*International Biology Olympiad, IBO*);
- e. Olimpiade Kimia Internasional (*International Chemistry Olympiad, IChO*);
- f. Olimpiade Astronomi Internasional (*International Astronomy Olympiad, IAO*);
- g. Olimpiade Geografi Internasional (*International Geography Olympiad, IGeO*);
- h. Olimpiade Kebumihan Internasional (*International Earth Science Olympiad, IESO*);
- i. Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional (*International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA*).

Peserta didik yang dipilih untuk tingkat internasional merupakan para juara pada tingkat nasional. Sebelum mengikuti lomba ataupun olimpiade tingkat internasional, peserta didik yang akan mengikuti lomba tingkat internasional mendapatkan pembinaan secara intensif agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Untuk melakukan pembinaan, maka dibutuhkan seorang yang profesional dan mendalami bidang keilmuan yang akan diikuti pada tingkat internasional. Untuk itu, maka proses pembinaan melibatkan unsur dari beberapa Perguruan Tinggi unggulan di Indonesia. Pembina yang ditunjuk adalah para akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keilmuannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan pembinaan melalui kegiatan Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaan program ini, telah dipersiapkan beberapa kegiatan Sekolah yang Mendapatkan Ekstrakurikuler ialah melakukan Pembinaan.

Pemenang OSN pada seluruh bidang akan dibina untuk memperoleh siswa yang akan mewakili Indonesia di ajang olimpiade sains tingkat internasional. Kegiatan pembinaan sekaligus dilaksanakan sebagai seleksi siswa. Dalam setiap tahapan pembinaan akan dilaksanakan beberapa hal, yakni: penanaman konsepsi dan teori, pembekalan materi umum, dan *drilling*.

Terkait dengan bidang olah raga, peserta pembinaan adalah pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Sedangkan untuk olimpiade debat, maka siswa yang dibina adalah pemenang pada kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Bulan Februari, April, Juni, dan September. Berikut ini adalah kegiatan pembinaan dan pengiriman secara lebih rinci:

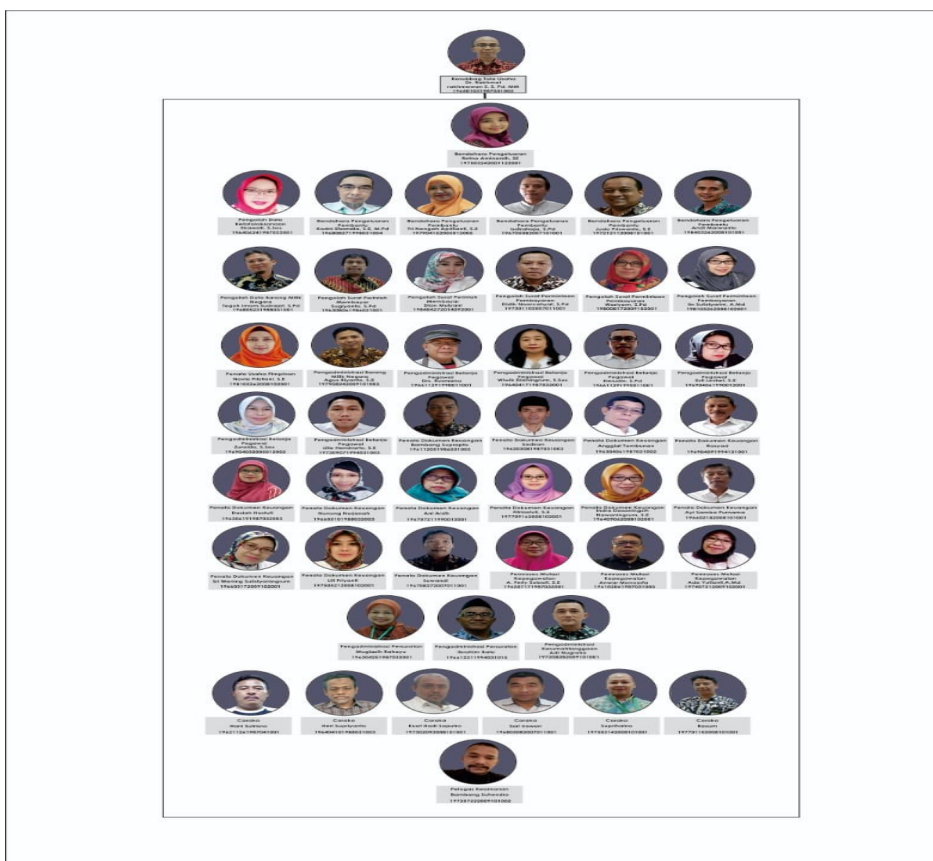
1. Pembinaan dan pengiriman tim IMO ke Inggris tk. Internasional;
2. Pembinaan dan pengiriman tim ICHO ke Prancis tk. Internasional;
3. Pembinaan dan pengiriman tim IOI ke Azerbaijan tk. Internasional;
4. Pembinaan dan pengiriman tim IESO ke Korea Selatan tk. Internasional;
5. Pembinaan dan pengiriman tim IBO ke Hungaria tk. Internasional;
6. Pembinaan Dan Pengiriman Tim IOAA/IAO ke Hungaria tk. Internasional;
7. Pembinaan Dan Pengiriman Tim IGEO ke Hongkong tk. Internasional;
8. Pembinaan Dan Pengiriman Tim IPHO ke Latvia tk. Internasional;
9. Pembinaan Dan Pengiriman Tim IEO ke Rusia tk. Internasional;
10. Pembinaan Dan Pengiriman Tim Olahraga ke Belgia tk. Internasional;
11. Pembinaan Dan Pengiriman Tim Intel ISEF ke Amerika tk. Internasional;
12. Pembinaan Dan Pengiriman Tim Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia ke Colombo, Sri Lanka tk. Internasional.



Subbagian Tata Usaha
Direktorat Pembinaan SMA
2019

E. RENCANA DAN ANGGARAN SUBBAG TATA USAHA

1. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Subbag Tata Usaha

2. Profil Anggaran Tahun 2018

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk Melakukan urusan persurutan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Penerima Manfaat dari subbagian Tata Usaha dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.

3. Rencana Kerja Subbag Tata Usaha Tahun 2019

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

5627.951.001 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

a. 5627.951.001.997 Pengadaan Perangkat dan Fasilitas Kantor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Berikut ini adalah rincian peralatan dan fasilitas kantor yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

Uraian	Jumlah
Sound System Ruang Sidang	1 Paket
Drone	3 Unit
Interaktif White Board	1 Unit
CCTV	1 Paket
Intercom	5 Unit
AC 2 PK	18 Unit
Lemari Arsip	1 Paket
Perangkat Penunjang Kantor	1 Paket
Mebileur	1 Paket
UPS	1 Paket

b. 5627.951.001.998 Gedung/Bangunan

Untuk meningkatkan kinerja pegawai direktorat Pembinaan SMA, di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung demi kelancaran kerja melayani masyarakat. Oleh sebab itu kebutuhan akan pemeliharaan gedung/Bangunan kantor, pemeliharaan halaman gedung, perbaiki Kamar mandi , penggantian pintu akses ruang kerja sangat dibutuhkan demi kenyamanan bekerja. Perbaiki ruang arsip , perbaiki pertisi, pemeliharaan gudang peralatan dan perbaiki lantai

gedung A. Gedung / Bangunan adalah fasilitas penunjang yang di digunakan oleh pegawai di dalam menjalankan tugas sehari hari, Pemeliharaan gedung sangat di butuhkan agar gedung terawat dengan baik.

Uraian	Jumlah
Pemeliharaan Gedung / Bangunan	2.500 m2
Pemeliharaan Halaman gedung / bangunan	250 m2
Perbaiki Kamar Mandi Lantai 1, 2, 3 dan 4	1 paket
Penggantian Pintu Akses Ruang Kerja	7 SET
Perbaiki Ruang Arsip	1 Paket
Perbaiki Partisi Ruang Kasi	1 Paket
Pemeliharaan Gudang Peralatan	60 m2
Perbaiki Lantai	1 Paket

5627.994.01 Layanan Perkantoran

- a. 5627.994.001.996 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi diharapkan dapat menunjang kinerja pegawai. Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Saat ini penggunaan peralatan teknologi komunikasi dan informasi bukan menjadi pendukung melainkan hal utama yang dibutuhkan oleh lembaga.

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi akan dilakukan pada Bulan Agustus s.d. November Tahun 2019.

Cara pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah dengan metode swakelola dan kontraktual

- 1) 5627.994.001.001 Gaji dan Tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai diberikan sebagai hak dan kewajiban yang telah dijalankan pegawai dalam melakukan tugas sehari-hari.

2) 5627.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- a) Jasa Keamanan dan Kebersihan
- b) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Empat
- c) Operasional Perkantoran dan Pimpinan

3) 5627.970.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker

Cara pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah dengan metode swakelola dan kontraktual.

I. 5627.970.001.054 Pengelolaan Kepegawaian

a. Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi I

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda utama, khususnya dalam hal peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. Reformasi birokrasi dilakukan dengan melakukan penguatan di kedelapan aspek yakni manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana, penguatan perundang-undangan, penguatan pengawasan, penguatan kelembagaan, penguatan manajemen SDM ASN, dan peningkatan kualitas layanan. Untuk melaksanakan kedelapan aspek ini, diperlukan pemahaman yang mendalam bagi seluruh pegawai Direktorat Pembinaan SMA. Melalui pemahaman tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan SMA mengadakan kegiatan bimtek dengan tujuan mensosialisasikan dan menyusun program kerja untuk pencapaian reformasi birokrasi. Langkah

pelaksanaan bilmtek dimulai dari koordinasi dengan semua pihak yang terlibat agar pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif. Hasil yang diperoleh bilmtek dan proses yang terjadi selama bilmtek berlangsung di evaluasi kembali oleh Subbag Tata Usaha.

Selain itu, dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi sekaligus penyusunan instrumen evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah dikembangkan sebelumnya. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi, kebutuhan POS yang belum terpenuhi. POS menjadi salah satu indikator dalam ketercapaian Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta evaluasi yang dapat mengukur hasil dari perencanaan yang telah ditetapkan.

II. 5627.970.001.055 Pelayanan Umum, Pelayan Rumah Tangga, dan Perlengkapan

a. Pameran/Visualisasi/Publikasi

Terdapat tiga event nasional yang dapat menjadi sarana bagi Direktorat Pembinaan SMA dalam mempublikasikan karya peserta didik yang mengikuti berbagai lomba baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ketiga event itu adalah hari pendidikan nasional, hari guru, dan saat rembuk nasional. Melalui publikasi hasil karya peserta didik, diharapkan para tamu undangan yang hadir dapat mengapresiasi hasil karya tersebut. Selain itu terdapat video pembelajaran dalam bentuk DVD dan berbagai

buku terkait pendidikan tingkat SMA yang menjadi hasil karya Direktorat Pembinaan SMA. Melalui buku-buku tersebut, diharapkan tamu undangan dapat mengetahui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA khususnya dalam meningkatkan mutu dan tata kelola SMA serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. **Pembinaan dan peningkatan motivasi pegawai**
Pembinaan dan peningkatan motivasi pegawai dilaksanakan untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja serta menumbuhkan kembangkan suasana kondusif dan kompetitif yang sehat antar pegawai di Lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. Melalui pembinaan dan peningkatan motivasi pegawai, para peserta akan diberikan materi terkait komunikasi, kerjasama tim, tatalaksana, kepegawaian, capaian pada tahun 2018, dan program-program yang akan dijalankan pada tahun 2019. Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA diharapkan memiliki persamaan persepsi terkait program dan layanan yang akan diberikan pada tahun 2019. Selain itu, melalui pendekatan softskill diharapkan kerjasama dan komunikasi antar pegawai menjadi efektif. Hal tersebut dapat membantu capaian pekerjaan yang optimal. Materi lain yang disampaikan terkait pemecahan masalah atau problem solving. Tujuan akhir dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan peserta terkait program dan hal-hal internal Direktorat Pembinaan SMA, keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah, dan sikap

penuh dedikasi untuk melayani masyarakat melalui pekerjaannya sehari-hari.

c. Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan

Tujuan Bimtek ini adalah para peserta diharapkan dapat memahami mekanisme prosedur tata naskah dinas persuratan meliputi Jenis Naskah, pengamanan dan penyampaian, pencatuman alamat, pemberian nomor, tanggal dan kode naskah. Hal tersebut menjadi hal penting karena tata naskah dinas merupakan salah satu komponen penting didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Melalui pemahaman prosedur tata naskah dinas yang baik, penyelenggaraan dan pemberian layanan dapat berjalan optimal. Terkait Pengelolaan Arsip terdapat beberapa komponen didalamnya yang meliputi arsip aktif, Inaktif, arsip Fital, arsip Audiofisual, arsip elektronik serta masa retensi arsip dan penyusutan arsip.

d. Pelatihan Bahasa Inggris

Hubungan dengan pihak asing menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan saat ini. Era globalisasi dan industri 4.0 mendesak terjalinnya hubungan internasional dan pelibatan berbagai lembaga yang berasal dari berbagai negara. Hubungan internasional tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila kualitas penguasaan bahasa asing yang dimiliki oleh sumber daya manusia berada pada kategori baik. Oleh sebab itu,

pelatihan bahasa inggris menjadi kebutuhan yang hendaknya dapat dilaksanakan.

e. Teknis Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

Terkait pengelolaan kepegawaian, terdapat beberapa kebijakan yang mengatur terkait pengelolaan kepegawaian yakni Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA mengadakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan pemahaman terkait prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku, jenis status dan kedudukan, fungsi tugas, dan peran jabatan, hak dan kewajiban aparatur sipil negara.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian memberikan pemahaman kepada pimpinan dan pengelola kepegawaian tentang peraturan-peraturan kepegawaian, pedoman kerja kepegawaian dan meningkatkan kinerja staf pengelola kepegawaian secara professional.

f. Bimbingan Teknis Penyusunan SKP

Direktorat Pembinaan SMA mengadakan bimbingan teknis penyusunan SKP dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai terkait penyusunan SKP khususnya terkait teknis pelaksanaan yang meliputi perencanaan target kinerja, pengisian target kinerja, log harian, dan realisasi SKP. Melalui kegiatan ini diharapkan

penyelenggaraan SKP menjadi optimal sehingga mendukung pencapaian reformasi birokrasi di Kemdikbud.

g. Sinkronisasi Data Kepegawaian

Sinkronisasi data kepegawaian dilakukan untuk melakukan pembaruan terhadap data pegawai. Perubahan atau dinamika data pegawai seringkali terjadi akibat perubahan pada status, keluarga, maupun pendidikan pegawai. Kegiatan diperlukan agar data pegawai yang terdapat pada aplikasi yang ditetapkan sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini menjadi penting karena perencanaan kepegawaian memerlukan data pegawai terkini. Melihat kondisi tersebut, Direktorat Pembinaan SMA berencana untuk melaksanakan sinkronisasi data kepegawaian pada dua tahap

h. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa bermanfaat bagi pegawai untuk mengetahui proses pengadaan barang dan jasa. Untuk menjadi pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan di butuhkan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa. Bimbingan Teknis ini Berguna untuk memutakhirkan pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa terutama di dalam regulasi atau kebijakan yang terkait.

i. Bimbingan Teknis Pengembangan Jaringan/Website

Jaringan yang optimal dapat membantu penyelenggaraan pemerintah dan pemberian

layanan kepada masyarakat agar berjalan dengan efektif dan efisien. Jaringan yang dimaksud adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya yang terhubung satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Melihat kebutuhan yang mendesak terkait pengembangan jaringan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA mengadakan bimbingan teknis pengembangan jaringan dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

j. Bimbingan Teknis Pengembangan Integritas Pegawai

Integritas merupakan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dan menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pekerjaannya. Apabila seorang pegawai memiliki integritas yang baik, hasil dari pekerjaannya akan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

k. Bimbingan Teknis Perpajakan

Direktorat Pembinaan SMA sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewajiban terhadap pengelolaan keuangan yang digunakan pada setiap program yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan oleh staff dengan jabatan yang relevan. Dinamika organisasi Direktorat Pembinaan SMA mengakibatkan terjadinya rotasi terhadap staff yang mengelola keuangan. Di sisi yang lain, pengelolaan keuangan menjadi hal yang krusial di dalam penyelenggaraan pemerintah.

Terdapat berbagai macam kebijakan dan peraturan yang harus diikuti.

1. Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi II

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda utama, khususnya dalam hal peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. Reformasi birokrasi dilakukan dengan melakukan penguatan di kedelapan aspek yakni manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana, penguatan perundang-undangan, penguatan pengawasan, penguatan kelembagaan, penguatan manajemen SDM ASN, dan peningkatan kualitas layanan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis reformasi birokrasi I, dilakukan kembali evaluasi terhadap progres pelaksanaan program kerja yang telah disusun. Evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi yang digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja pelaksanaan RBI Direktorat Pembinaan SMA.

m. Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Pegawai

Melihat pentingnya kompetensi pegawai dalam pelaksanaan program pada lingkungan Direktorat Pembinaan SMA, Subbag TU mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Melalui kegiatan ini, diharapkan pegawai yang mengikuti bimtek dapat memiliki kompetensi

yang baik dan dapat menerapkannya pada pekerjaannya sehari-hari.

n. Bimbingan Teknis Pemanfaatan TIK

TIK menjadi instrumen utama bagi Direktorat Pembinaan SMA saat ini, karena hampir semua penyelenggaraan kegiatan menggunakan alat ini. Oleh sebab itu, kompetensi pegawai dalam menggunakan TIK menjadi hal yang utama saat ini. Melihat hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMA mengadakan kegiatan pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kompetensi pegawai terkait penggunaan TIK. Melalui kegiatan ini, diharapkan pegawai dapat menggunakan TIK dalam pekerjaannya sehari-hari sehingga kinerja yang dicapai dapat optimal.

o. Sosialisasi Kebijakan Direktorat

Kebijakan tersebut dikembangkan oleh masing-masing subdit sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan yang telah dikembangkan masing-masing subdit memiliki urgensi untuk disosialisasikan kepada seluruh pegawai Direktorat Pembinaan SMA. Hal tersebut perlu dilakukan agar seluruh pegawai memiliki persamaan persepsi dan informasi mengenai seluruh kebijakan Direktorat Pembinaan SMA. Selain itu, seluruh pegawai Direktorat Pembinaan

SMA juga memerlukan informasi mengenai pencapaian program yang telah dikerjakan.

p. Penghapusan Barang Milik Negara

Proses penghapusan barang milik negara merupakan proses yang harus dilakukan terhadap BMN yang sudah tidak dapat digunakan. Proses ini membutuhkan proses dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan perundangan-undangan. Selain itu, kegiatan ini membutuhkan tim yang memiliki kompetensi dan tupoksi terkait BMN ini.

q. Bimbingan Teknis Pengembangan Dokumen dan Publikasi

Berbagai program yang telah dilakukan oleh masing-masing subdit dan subag di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA, perlu untuk dipublikasikan. Hal tersebut untuk mendukung keterbukaan informasi publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publikasi yang dilakukan hendaknya sesuai dengan perkembangan terbaru dan target dari publikasi. Publikasi disusun dalam narasi dan bentuk yang relevan dengan kondisi saat ini, sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat tersampaikan.

Publikasi juga dapat dijadikan sarana untuk menjelaskan kepada masyarakat capaian-capaian yang telah diperoleh Direktorat Pembinaan SMA.

r. Bimbingan Teknis Penatausahaan Satker

Salah satu komponen yang diperlukan untuk mencapai reformasi birokrasi adalah penguatan penatausahaan Direktorat Pembinaan SMA. Penatausahaan ini termasuk didalamnya adalah pembuatan SOP/POS yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan SMA. Kegiatan bimtek ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SOP/POS melalui review dan evaluasi, serta perubahan SOP/POS agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

s. Bimbingan Teknis Inventaris BMN

Inventarisir menjadi hal yang penting, karena melalui kegiatan ini Direktorat Pembinaan SMA dapat mengetahui kondisi BMN yang berada di Direktorat Pembinaan SMA. Dengan mengetahui kondisi BMN, Subbag Tata Usaha dapat melakukan perencanaan untuk memperbaiki dan menambah BMN sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Inventaris BMN memerlukan kompetensi tersendiri dengan melibatkan staff yang sesuai dengan tupoksinya. Diperlukan peningkatan kompetensi sesuai dengan paraturan dan perundangan yang terbaru terkait inventaris BMN. Kegiatan akan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan yang ada.

t. Bimbingan Teknis Peningkatan *Public Speaking*

Kompetensi dalam bidang public speaking menjadi kemampuan yang diperlukan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. Kompetensi tersebut diperlukan agar pegawai

dapat menyampaikan berbagai kebijakan di lingkungan Direktorat dan dapat berinteraksi dengan masyarakat. Pegawai dapat mengetahui bagaimana cara berkomunikasi pada lingkup audience yang besar. Kompetensi ini menjadi penting agar pesan yang hendak disampaikan pegawai sebagai perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMA dapat tersampaikan kepada masyarakat luas.

III. 5627.970.001.053 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

a) Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan oleh staff dengan jabatan yang relevan. Dinamika organisasi Direktorat Pembinaan SMA mengakibatkan terjadinya rotasi terhadap staff yang mengelola keuangan. Di sisi yang lain, pengelolaan keuangan menjadi hal yang krusial di dalam penyelenggaraan pemerintah. Terdapat berbagai macam kebijakan dan peraturan yang harus diikuti. Kompetensi dari para pengelola keuangan pun menjadi hal yang utama di dalam mengelola keuangan Direktorat Pembinaan SMA. Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan, Direktorat Pembinaan SMA mengadakan kegiatan bimbingan teknis administrasi pengelolaan keuangan.

b) Penyusunan Laporan Satuan Kerja

Laporan Keuangan Satuan Kerja (SATKER) dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah, menganalisis dari aspek keuangan berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Laporan ini disusun dalam rangka pemenuhan akuntabilitas Direktorat Pembinaan SMA. Kegiatan ini diperlukan agar koordinasi dan penyusunan laporan dapat dilakukan dengan intensif dan menghasilkan laporan yang memiliki akuntabilitas yang baik.

c) Penyusunan Laporan Simak BMN

SIMAK BMN merupakan aplikasi yang berisi data terkait barang milik negara. Dalam rangka pencapaian reformasi birokrasi khususnya dalam indikator akuntabilitas, Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan kegiatan untuk menyusun laporan kondisi BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Kegiatan ini diperlukan karena kondisi BMN pada Direktorat Pembinaan SMA mengalami perubahan akibat penghapusan barang dan penambahan barang milik negara yang baru.

BAB IV

PENUTUP

Upaya Pencapaian Pada Program Prioritas Bidang Pendidikan, Sasaran Strategi, Dan Indikator Kinerja Kegiatan, Dilakukan Oleh Direktorat Pembinaan SMA Melalui Perencanaan Kebijakan Serta Pelaksanaan Program Dan Kegiatan. Hal Tersebut Untuk Memenuhi Tujuan Tersebut, Pemerintah Mengupayakan Pemenuhan Pendanaan Pendidikan Melalui Penyediaan Bantuan Merupakan Dana Dan Bimbingan Teknis Yang Bertujuan Untuk Menyediakan Layanan Pendidikan Baik Dari Sisi “Supply” Maupun “Demand”.

Dari Sisi “Supply” Penyediaan Layanan Pendidikan Difasilitasi Melalui Penyediaan Dana Bantuan Yang Dapat Membantu Seolah Untuk Memenuhi Biaya Investasi Dana Operasional Sekolah. Sedangkan Sisi “Demand” Difasilitasi Melalui Penyediaan Dana Bantuan Untuk Siswa Yang Dapat Membantu Mereka Untuk Meningkatkan “Daya Beli” Terhadap Layanan Pendidikan SMA.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan Dikategorikan Menjadi 3 (Tiga) Komponen, Yaitu: Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), Biaya Operasional Sekolah (Biaya Di Satuan Pendidikan), Dan Biaya Pribadi Peserta Didik.

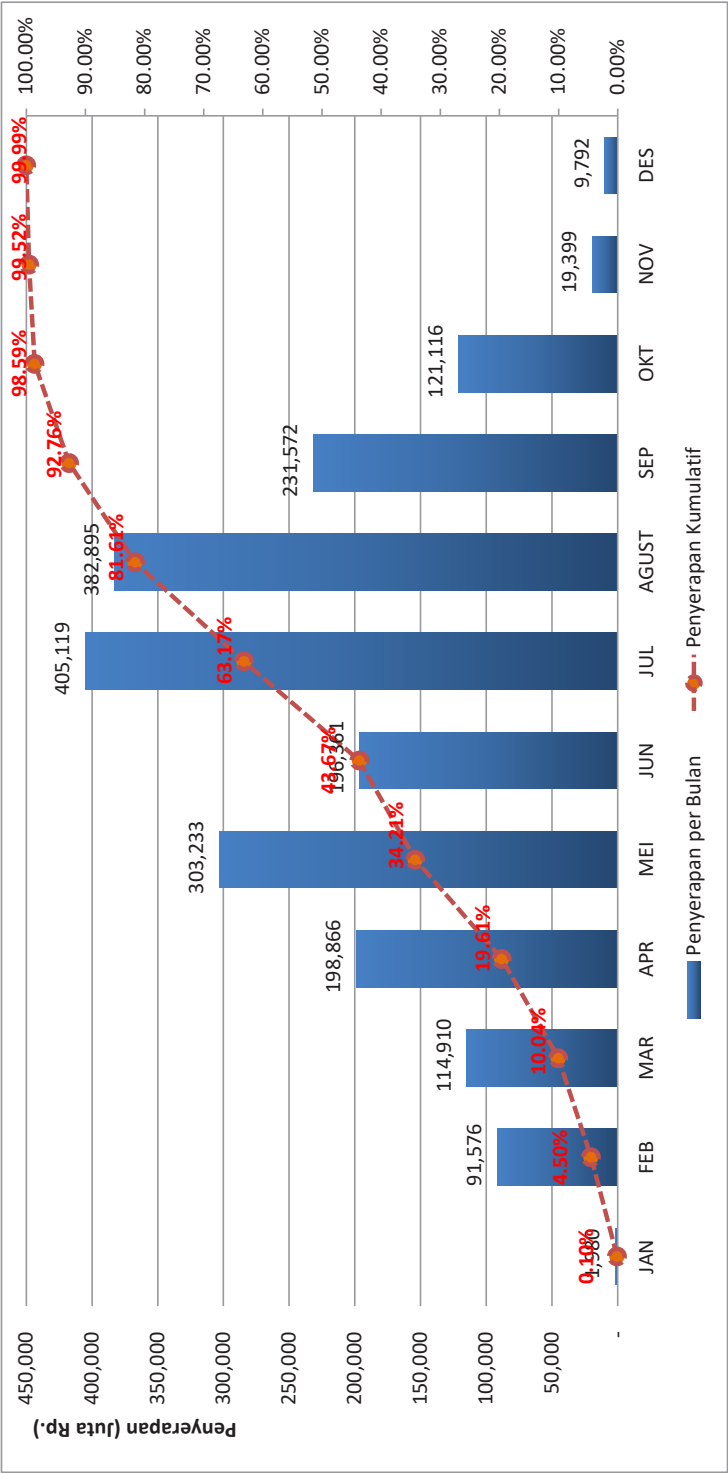
Implementasi Perencanaan Kebijakan Serta Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Direktorat Pembinaan SMA Mengacu Pada Konsep Tersebut Diatas. Biaya Investasi Sekolah Dipenuhi Melalui Penyediaan Bantuan Sarana Dan Prasarana . Sedangkan Biaya Operasional Sekolah Berusaha Dipenuhi Melalui Penyediaan Dana Untuk Operasional Sekolah Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA. Untuk Meningkatkan Daya Beli Siswa Terhadap Layanan Pendidikan Sma, Pemerintah Mengalokasikan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Yang Dapat Digunakan Siswa Untuk Biaya Operasional Mereka.

Dokumen Ini Bertujuan Untuk Memberikan Gambaran Tentang Deskripsi Program-Program Pembangunan Pendidikan Sma Tahun 2019 Dan Kontribusi Program-Program Tersebut Dalam Usaha Untuk Mencapai Target Kinerja Pembangunan Pendidikan SMA Dan Target Ikk Direktorat Pembinaan SMA Dan Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Direktorat Pembinaan SMA; Serta Memberikan Bahan Informasi Pelaksanaan Program Dan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA Dalam Lingkup Internal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Lembaga Eksternal Terkait Lainnya.

Melalui Dokumen Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2019 Ini Diharapkan Akan Tergambar Secara Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi Dan Sumber Daya Manusia , Alokasi Anggaran, Dan Deskripsi Program Dan Kegiatan Direktorat Pembinaan Sma Tahun 2019

LAMPIRAN

Grafik Rencana Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2019



Tabel Rencana Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2019

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
Penyerapan per Bulan	1,980,130	91,576,028	114,910,274	198,866,313	303,232,543	196,361,026	405,118,620	382,895,347	231,572,340	121,115,883	19,399,065	9,792,153
Penyerapan Kumulatif	1,980,130	93,556,158	208,466,432	407,332,745	710,565,288	906,926,315	1,312,044,935	1,694,940,282	1,926,512,622	2,047,628,505	2,067,027,571	2,076,819,723
Persentase	0.10%	4.50%	10.04%	19.61%	34.21%	43.67%	63.17%	81.61%	92.76%	98.59%	99.52%	99.99%

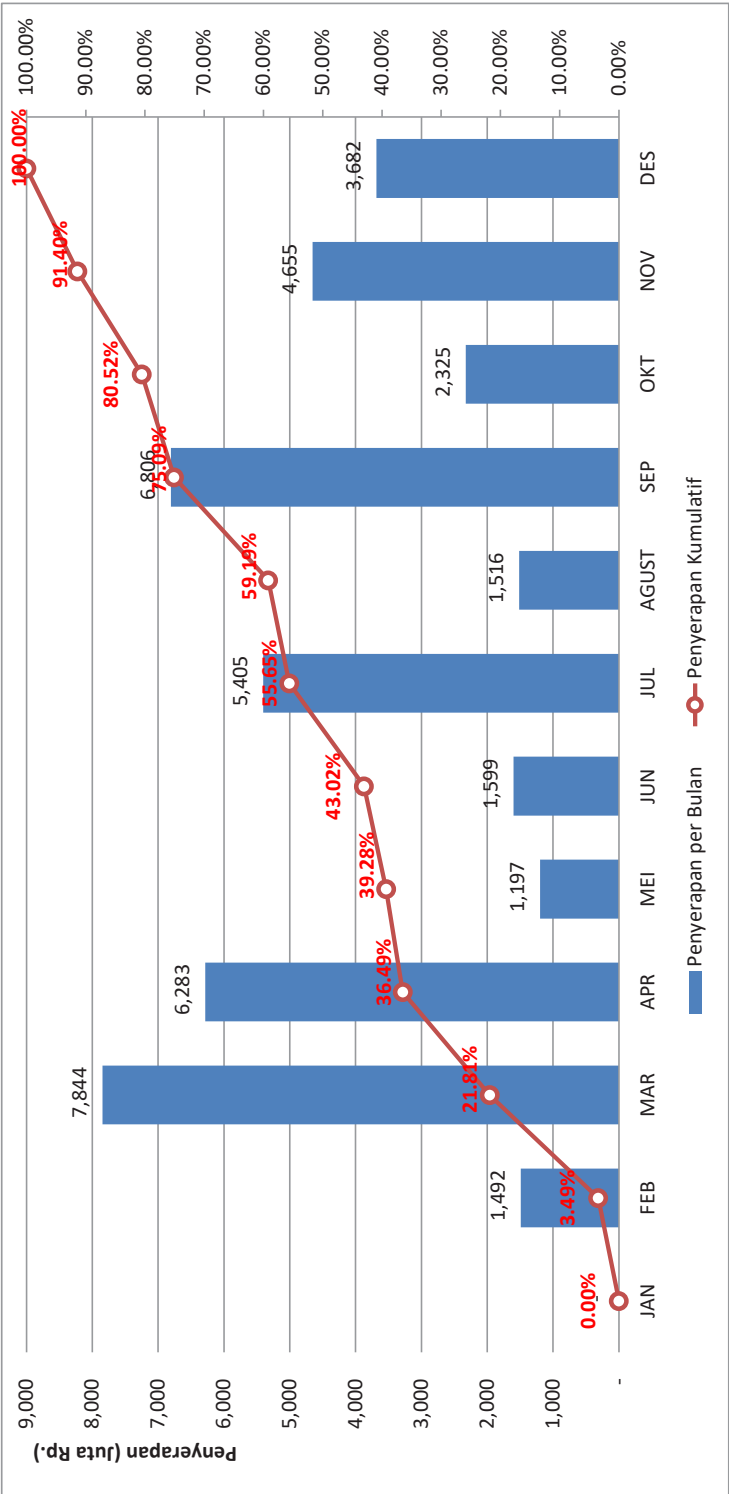
Rencana Tindakan Kegiatan (Action Plan) unit kerja: Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2019

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
5627	PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	42,805,305,000	
	SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI	42,805,305,000	
5627.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	42,805,305,000	
5627.970.001	Layanan Dukungan Manajemen Program	42,805,305,000	
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	29,448,179,000	
A	Penajaman Renstra Direktorat PSMA	302,625,000	Minggu 3 Maret dan Minggu 1 Oktober
B	Penajaman Roadmap Peningkatan Mutu SMA Tahun 2025	1,431,981,000	Minggu 2 April
C	Pelaksanaan Penyusunan Action Plan Program Dekonsentrasi SMA	1,051,370,000	Minggu 3 Maret
D	Penyusunan Program Kerja Dit. PSMA	506,850,000	Minggu 3 Februari
E	Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Program SMA Tahun 2020 (Pusat dan Dekonsentrasi)	326,220,000	Minggu 2 Oktober
F	Penyusunan Program Dan Anggaran Tahun 2020	1,946,600,000	Maret (M5); Mei (M1); Juli (M3); Sep (M4); Nov (M1); Des (M2)
G	Workshop Koordinasi Penyusunan Lokus Bantuan Dit. PSMA Tahun 2020	966,150,000	Minggu 5 Oktober
H	Diseminasi Program SMA Tahun 2019	2,268,300,000	Minggu 1 dan 2 Maret
I	Review Juknis Bantuan Direktorat PSMA Tahun 2019 Dan 2020	247,100,000	Minggu 4 Okt
J	Sinkronisasi Program Dekonsentrasi SMA Tahun 2019	986,230,000	Minggu 1 Juli

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
K	Workshop Peningkatan Kualitas Data SMA Tahun 2019	8,931,070,000	Maret (M4); Juli (M2); Sept (M1, M2, M3); Des (M1)
L	Pengolahan Dan Pemutakhiran Data Pokok SMA	1,063,586,000	April (M5); Sept (M5)
M	Pengelolaan Portal Dan Database SMA	2,008,226,000	Feb; Maret; April; Mei; Juni; Juli; Agsts; Sept; Okt; Nov; Des (Semua di M5)
N	Penyusunan Lokus Bantuan Dit. PSMA	151,300,000	Maret (M4); Nov (M2)
O	Penyusunan Buku Statistik & Bantuan SMA	654,400,000	Agustus (M5); Desember (M3)
P	Penyusunan Juknis DAK SMA (Fisik dan Non Fisik)	732,200,000	Juni (M2); Nov (M4)
Q	Pengolahan Data BOS SMA	401,300,000	April (M4); Juni (M4); Sept (M4); November (M5)
R	Pelaksanaan Diseminasi Program SMA Tingkat Propinsi	1,843,753,000	Maret (M1 dan M2)
S	Workshop Koordinasi Pelaksanaan BOS 2019	1,749,634,000	Maret (M4); Nov (M3)
T	Pengelolaan Dan Pengolahan Data DAK SMA	866,400,000	Mei (M4); Juli (M3); Agustus (M4); Nov (M1)
U	Workshop Pengelolaan DAK Fisik SMA Tahun 2019	1,012,884,000	Maret (M5); Nov (M5)
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	13,357,126,000	

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
A	Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Laporan Daya Serap Bulanan)	1,827,900,000	Feb (M5); Maret (M2) ; April; Mei; Juni; Juli; Agsts; Sept; Okt; Nov; Des (mulai april s.d Des di M3)
B	Pemantauan Dana Dekonsentrasi Tahun 2019	883,596,000	Minggu 2 November
C	Pemantauan Bantuan Pemerintah Dit. PSMA Tahun 2018 Dan 2019	1,476,935,000	April (M1 dan M2); Juli (M4 dan M5)
D	Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Hasil Program SMA Tingkat Propinsi	2,382,496,000	Juli (M1) dan Desember (M2)
E	Sosialisasi Aplikasi E-Monev	179,200,000	April (M1)
F	Penyusunan LAKIP	332,690,000	Feb (M2); Juli (M2) ; Desember (M3)
G	Tindak Lanjut Pemeriksaan	544,609,000	Minggu 3 dan 4 Juni
H	Koordinasi Program Dit. PSMA	958,170,000	Feb (M2); April (M2); Juni (M2); Agsts (1)
I	Kajian Naskah Akademik Pembinaan Dan Pengembangan SMA	492,770,000	Agustus (M2)
J	Workshop Penguatan Kerjasama Antara SMA Dengan Instansi Lainnya	1,035,440,000	Sept (M1)
K	Kerja Sama Dengan Instansi Lainnya	571,900,000	Feb (M1) dan Okt (M1)
L	Penyusunan Buku Informasi Dit. PSMA Tahun 2019	754,110,000	Maret (M4)
O	Workshop Evaluasi Dak Fisik SMA Tahun 2019	1,917,310,000	April (M5); Nov (M1)

Grafik Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2019



Tabel Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2019

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
Penyerapan per Bulan	-	1,491,978	7,843,665	6,283,297	1,197,064	1,599,315	5,405,126	1,515,785	6,806,265	2,325,471	4,655,357	3,681,962
Penyerapan Kumulatif	-	1,491,978	9,335,663	15,618,960	16,816,024	18,415,339	23,820,466	25,336,250	32,142,515	34,467,986	39,123,343	42,805,305
Persentase	0.00%	3.49%	21.81%	36.49%	39.28%	43.02%	55.65%	59.19%	75.09%	80.52%	91.40%	100.00%

Rencana Tindakan Kegiatan (Action Plan) unit kerja: Subdit Kurikulum Tahun 2019

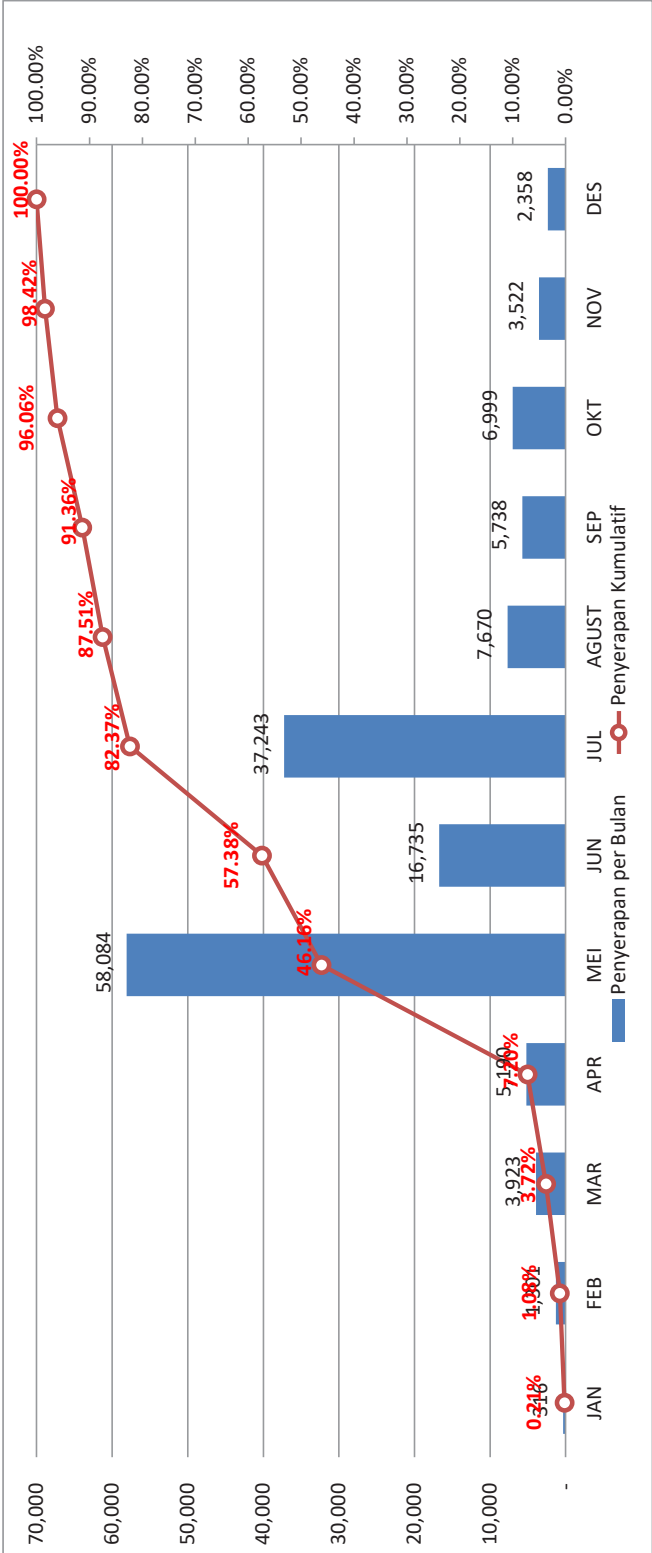
NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
5627	PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	2,076,949,325,000	
	SUBDIT KURIKULUM	149,077,570,000	
5627.013	SEKOLAH YANG DIBINA MENJADI SEKOLAH RUJUKAN	74,582,665,000	
5627.013.001	SEKOLAH RUJUKAN	74,582,665,000	
052	VERIFIKASI CALON PENERIMA	1,004,850,000	
A	VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SMA RUJUKAN	1,004,850,000	15-22 MARET
053	BIMBINGAN TEKNIS	6,880,870,000	
A	BIMBINGAN TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH SMA RUJUKAN	3,586,700,000	7-10 MEI, 14-17 MEI, 20-23 MEI, 21-24 MEI, 27-29 MEI
B	BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN SMA RUJUKAN	3,294,170,000	5-8 Ags, 20-23 Ags, 27-30 Ags, 3-6 Sep, 10-13 Sept
054	PENYALURAN BANTUAN	65,000,000,000	MEI, JUNI
055	SUPERVISI	1,696,945,000	

NO	OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
A	PELAKSANAAN SUPERVISI PROGRAM SMA RUJUKAN	1,696,945,000	16-18 OKT, 21 OKT-30 NOV
5627.019	SEKOLAH YANG MENERAPKAN KURIKULUM DAN MODEL PEMBELAJARAN YANG BERLAKU	47,073,623,000	
5627.019.001	SEKOLAH YANG MENERAPKAN KURIKULUM DAN MODEL PEMBELAJARAN YANG BERLAKU	47,073,623,000	
051	PENYUSUNAN PANDUAN	3,683,400,000	
A	WORKSHOP REVIEW DAN PENGEMBANGAN NASKAH PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN	1,226,890,000	19-22 FEB, 4-13 MARET
B	WORKSHOP PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN NASKAH PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN	1,726,270,000	23-26 APR, 8-11 OKT
C	EDITING DAN FINALISASI PENGEMBANGAN NASKAH PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN	730,240,000	3-17 SEPTEMBER
052	KOORDINASI PELAKSANAAN	553,110,000	
A	KOORDINASI DAN SINKRONISASI IMPLEMENTASI KURIKULUM DENGAN LPMP	553,110,000	30 APR-3 MEI
053	PELATIHAN KURIKULUM	38,371,468,000	
A	WORKSHOP PENGELOLAAN SKS SMA	1,553,128,000	22-25 JULI 2018
B	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SOAL HOTS	11,194,280,000	2-5 JUL, 9-12 JUL, 15-18 JUL, 23-26 JUL, 29 JUL-1 AGS, 6-9 AGS, 12-15 AGS, 19-22 AGS, 26-29 AGS

NO	OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
C	ToT TIM FASILITATOR PEMBINAAN DI SMA - PASCA EHB	708,405,000	4-6 SEPT
D	PELAKSANAAN PEMBINAAN DI SMA-PASCA EHB	3,449,720,000	24-27 SEP, 1-4 OKT, 8-11 OKT
E	PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UJIAN SEKOLAH (USBN)	2,474,040,000	26-28 FEB, 3-24 MAR
F	WORKSHOP TIM PENGEMBANG PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN	1,712,100,000	9-12 JULI, 10-13 DES
G	PELAKSANAAN IMPLEMENTASI SMA KEMARITIMAN	655,345,000	16-19 SEP, 24 SEP-5 OKT
H	WORKSHOP PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SOAL UJIAN SEKOLAH	1,037,885,000	1-4 MEI
I	WORKSHOP PEMBINAAN PROGRAM KURIKULUM SMA BAGI PENGAWAS	1,933,190,000	25-28 JUN, 1-4 JUL
J	SOSIALISASI/ SEMINAR KURIKULUM (UJI PUBLIK)	1,584,150,000	15 APR, 16 APR, 2 DES, 9 DES, 16 DES
K	WORKSHOP PENYIAPAN EMODUL DAN VIDEO PEMBELAJARAN	2,382,740,000	16-19 APR, 2-5 JULI
L	WORKSHOP PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN EMODUL DAN VIDEO	2,012,540,000	24-26 JULI, 24-26 SEPT
M	EDITING DAN FINALISASI EMODUL DAN VIDEO	931,375,000	3-14 OKTOBER
N	PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN BLANGKO SERTIFIKAT/ IJAZAH SMA	4,684,110,000	28-30 APRIL, 24 MEI, 27-29 JUNI, 8-19 JULI, 3-6 DES
O	PENDUKUNG SATUAN KERJA PELAKSANAAN KURIKULUM	650,000,000	JANUARI - DESEMBER

NO	OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
P	PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PERSIAPAN PISA SMA	1,408,460,000	10-12 JULI , 15-22 JULI
055	SUPERVISI	4,465,645,000	
A	PELAKSANAAN SUPERVISI UJIAN NASIONAL (UN)	1,542,395,000	27 Maret-8 APRIL
B	PELAKSANAAN SUPERVISI IMPLEMENTASI KURIKULUM	2,923,250,000	30 OKT-1 NOV, 4-29 NOV
5627.023	SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PROGRAM KETERAMPILAN/KEWIRAUSAHAAN	27,421,282,000	
5627.023.001	SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PROGRAM KETERAMPILAN/KEWIRAUSAHAAN	27,421,282,000	
053	BIMBINGAN TEKNIS	2,571,785,000	
A	BIMBINGAN TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DI SMA	1,065,320,000	18-21 JUNI, 25-28 JUNI
B	BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM KEWIRAUSAHAAN	1,068,940,000	23-27 SEPT
C	REVIEW PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DI SMA	437,525,000	11-13 APRIL
054	PENYALURAN BANTUAN	23,460,000,000	JULI
055	SUPERVISI	1,389,497,000	
A	PELAKSANAAN SUPERVISI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DI SMA	1,389,497,000	30 OKT-1 NOV, 4-29 NOV

Grafik Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Kurikulum Tahun 2019



Tabel Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Kurikulum Tahun 2019

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
Penyerapan per Bulan	316,000	1,300,751	3,922,806	5,189,966	58,083,676	16,734,626	37,242,508	7,669,662	5,737,962	6,999,176	3,522,091	2,358,346
Penyerapan Kumulatif	316,000	1,616,751	5,539,557	10,729,523	68,813,199	85,547,825	122,790,333	130,459,995	136,197,957	143,197,133	146,719,224	149,077,570
Persentase	0.21%	1.08%	3.72%	7.20%	46.16%	57.38%	82.37%	87.51%	91.36%	96.06%	98.42%	100.00%

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
5627	PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	2,076,949,325,000	
	SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	553,247,821,000	
5627.002	Unit Sekolah Baru yang dibangun	38,861,054,000	
5627.002.001	Bantuan Pembangunan Fisik Reguler	27,250,795,000	-
052	Verifikasi Penerima Bantuan	930,020,000	
A	Pelaksanaan Verifikasi	546,920,000	Maret s.d. April
B	Analisis dan Pengolahan Data Hasil Verifikasi	167,500,000	April
C	Koordinasi Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana	215,600,000	November
053	Bimtek Bantuan	2,059,310,000	
A	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	536,410,000	April
B	Analisis Kegiatan dan Pengolahan Hasil Bimtek	124,500,000	Juni
C	Pengembangan E-Sarpras	939,800,000	Februari s.d. Desember

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
D	Pengolahan Data Sarana Prasarana	458,600,000	Februari s.d. Desember
054	Penyaluran Bantuan	23,865,445,000	
055	Supervisi Penerima Bantuan	396,020,000	
A	Pelaksanaan Supervisi	279,020,000	Oktober s.d. November
B	Analisis Kegiatan dan Pengolahan Data Hasil Supervisi	60,750,000	November
C	Pengolahan Data Hasil Supervisi USB Tahun 2018	56,250,000	November
5627.002.002	Bantuan Pembangunan Fisik Daerah 3T dan Perbatasan	11,610,259,000	
054	- Penyaluran Bantuan	11,610,259,000	
5627.007	Sekolah yang direnovasi	54,350,824,000	
5627.007.001	Bantuan Pembangunan Fisik Reguler	54,350,824,000	
052	Verifikasi Penerima Bantuan	2,495,030,000	
A	Pelaksanaan Verifikasi	2,243,755,000	Maret s.d. April
B	Pengolahan Data Hasil Verifikasi	125,500,000	Mei

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
C	Koordinasi Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana	125,775,000	Juni
053	Bimtek Bantuan	769,094,000	
A	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	647,594,000	April s.d. Mei
B	Analisis Kegiatan dan Penyusunan Laporan	121,500,000	
054	Penyaluran Bantuan	50,000,000,000	
A	Renovasi Gedung Sekolah	40,000,000,000	Mei dan Agustus
B	Renovasi Sanitasi Sekolah	10,000,000,000	Mei dan Agustus
055	Supervisi Penerima Bantuan	1,086,700,000	
A	Pelaksanaan Supervisi	961,200,000	September s.d. Oktober
B	Pengolahan Data Hasil Supervisi	125,500,000	November
5,627,018	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Berbasis Sekolah (MBS)	11,916,938,000	
5,627,018,001	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Berbasis Sekolah (MBS)	11,916,938,000	
051	Penyusunan Panduan	2,035,600,000	

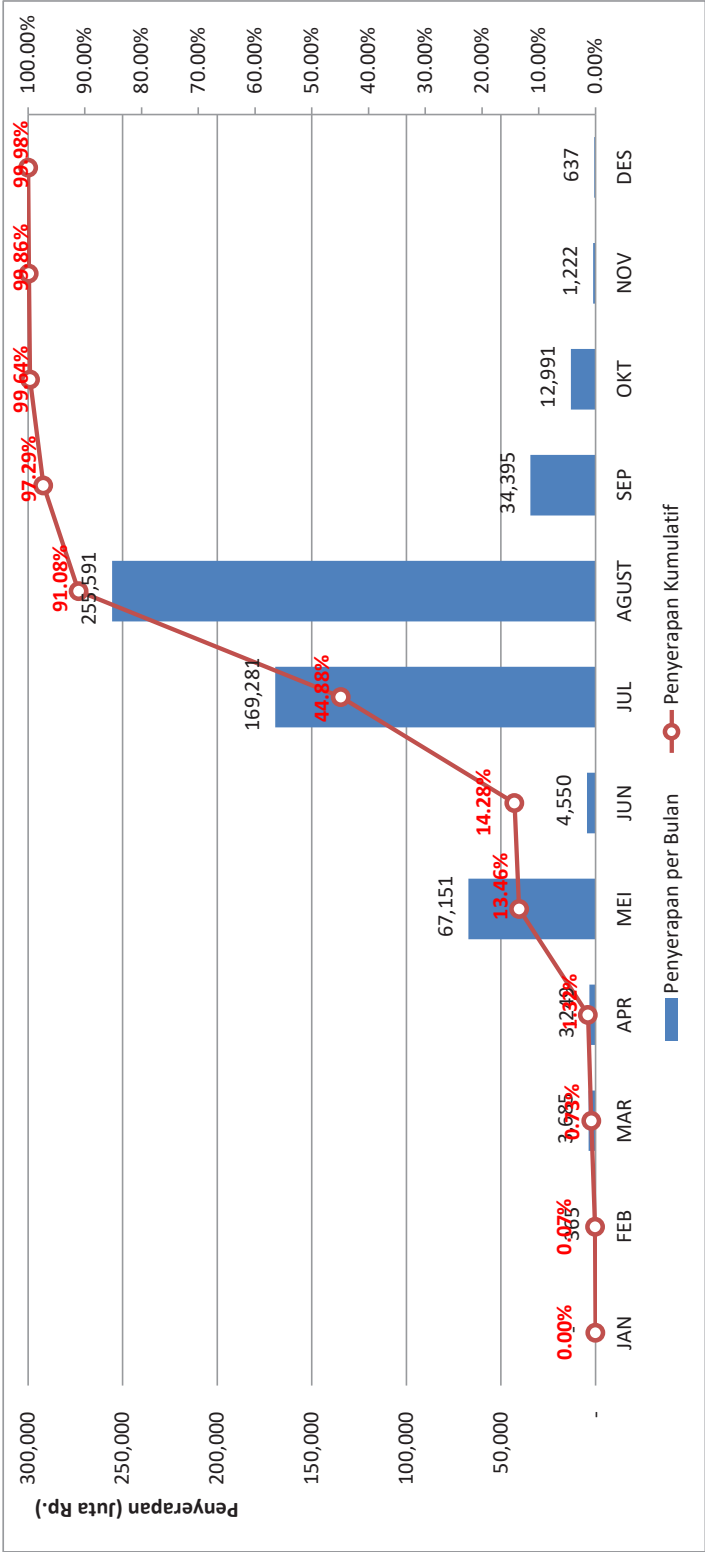
NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
A	Best Practice dan Naskah Penguatan MBS SMA	2,035,600,000	Februari s.d. Maret
053	Bimbingan Teknis	8,412,088,000	
A	Bimtek Penguatan MBS SMA	1,737,995,000	Juni
B	Bimtek Revitalisasi Perpustakaan	1,219,060,000	Juni
C	Bimtek Persiapan Akreditasi Sekolah	1,458,997,000	Maret
D	Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)	651,056,000	Juni
E	Bimtek Pengelolaan Sarana Prasarana	3,344,980,000	Agustus
055	Supervisi	1,469,250,000	
A	Bantuan Pendidikan CLC	594,000,000	September s.d. Oktober
B	Bantuan Operasional CLC	477,850,000	September s.d. Oktober
C	Bantuan Keterampilan	30,000,000	September s.d. Oktober
D	Supervisi SPK	367,400,000	September
5627.020	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	437,319,124,000	

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
5627.020.001	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Reguler	437,319,124,000	
051	Penyusunan Materi dan Panduan	2,023,290,000	
A	Penyusunan Juknis dan TOR	264,000,000	Februari
B	Persiapan Lelang dan Pembahasan Pengadaan Dengan Itjen dan TP4P Kejaksaan Agung	1,759,290,000	Februari s.d. Maret
053	Bimtek Bantuan	17,797,200,000	
A	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator Komputer Pembelajaran	17,149,700,000	Juli s.d. September
B	Analisis dan Pengelolaan Hasil Bimtek	647,500,000	November s.d. Desember
054	Penyaluran Bantuan	416,316,634,000	Juli s.d. November
056	Supervisi Penerima Bantuan	1,182,000,000	
A	Pelaksanaan Supervisi	1,056,000,000	Oktober s.d. November
B	Pengolahan Data Hasil Supervisi	126,000,000	November
5627.022	Sekolah yang melaksanakan Program UKS	5,799,881,000	
5627.022.001	Sekolah Memiliki UKS Sesuai Standar Pelayanan	5,799,881,000	

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
051	Penyusunan Panduan	753,200,000	
A	Best Practice Program Pembinaan SMA	753,200,000	Agustus
053	Bimbingan Teknis	1,733,700,000	
A	Bimtek Sanitasi Sekolah	1,577,200,000	Agustus
B	Pengelolaan dan Analisis Data Kelembagaan	156,500,000	Desember
054	Pelaksanaan Kegiatan	3,312,981,000	
A	Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	476,331,000	September
B	Deklarasi Sekolah Sehat	2,547,550,000	September
C	Koordinasi Tim UKS Pusat	289,100,000	Maret s.d. April
5627.025	Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	5,000,000,000	
5627.025.001	Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	5,000,000,000	
054	Penyaluran Bantuan	5,000,000,000	
A	BANTUAN PROGRAM KETERAMPILAN SMA TERBUKA	372,300,000	Mei

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
B	Bantuan Pendidikan SMA Terbuka	4,627,700,000	Mei

Grafik Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Tahun 2019



Tabel Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Tahun 2019

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
Penyerapan per Bulan	-	365.000	3.684.865	3.249.110	67.150.825	4.550.296	169.281.429	255.591.270	34.394.831	12.991.426	1.222.090	637.080
Penyerapan Kumulatif	-	365.000	4.049.865	7.298.974	74.449.799	79.000.095	248.281.523	503.872.794	538.267.625	551.259.051	552.481.141	553.118.221
Persentase	0.00%	0.07%	0.73%	1.32%	13.46%	14.28%	44.88%	91.08%	97.29%	99.64%	99.86%	99.98%

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
5627	PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	2,076,949,325,000	
	SUBDIT PESERTA DIDIK	1,298,283,646,000	
5627.001	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	1,193,154,909,000	
5627.001.001	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	1,193,154,909,000	
051	Penyusunan dan Penggandaan Bahan	406,000,000	
A	PENYUSUNAN JUKNIS	406,000,000	11 - 14 Feb & 1 - 4 Des
052	Verifikasi Calon Penerima Bantuan	1,275,600,000	Mar, April, Mei, Juni, Juli, Agust., Okt., Nov.
053	Bimtek Bantuan	7,246,543,000	
A	WORKSHOP KORDINASI PIP 2019	6,005,713,000	Maret & Oktober
B	PELAKSANAAN DESIMINASI PROGRAM PIP SMA TINGKAT PROPINSI	1,240,830,000	April, Mei, Juni, Juli, Agust. Sept.
054	Penyaluran Bantuan	1,174,988,500,000	Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Sept. Okt. Nov. Des.

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
055	Supervisi Penerima Bantuan	9,238,266,000	
A	PELAKSANAAN		Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agust. Sept. Okt. Nop. Des.
B	SUPERVISI PERCEPATAN PENCAIRAN DANA PIP	1,205,075,000	
D	ROADSHOW PENYERAHAN KIP YATIM PIATU	1,426,415,000	Maret, April, Juli
5627.014	Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	6,606,776,000	Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Sept. Okt. Nov. Des.
5627.014.001	Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	23,798,365,000	
051	Penyusunan Panduan	20,126,785,000	
A	PERSIAPAN BAHAN DAN KOORDINASI KKP	613,200,000	Maret
053	Bimbingan Teknis	613,200,000	
A	BIMBINGAN TEKNIS BANUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER	385,000,000	25 - 28 Maret
054	Pelaksanaan Kegiatan	385,000,000	
A	KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR (KKP)	15,878,585,000 2,742,500,000	8 - 13 April

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
B	PELAKSANAAN PRAMUKA TINGKAT NASIONAL	3,184,263,000	4 - 9 November
C	PRAMUKA TINGKAT PROVINSI	716,720,000	Mei, Juni, Juli, Agust, Sept. Oktober.
D	TOT TIM PEMBINA PRAMUKA PROPINSI	1,398,050,000	27 - 30 Maret
E	Seleksi Peserta dan LO Sislac	63,850,000	Agustus
F	PEMBINAAN DAN PEMBEKALAN SISLAC, YIC, SYC, AION, DAN SAKURA	1,521,603,000	September,
G	INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH KEGIATAN SISLAC	2,967,796,000	November
H	FINALISASI SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PESERTA DIDIK tahun 2019	837,950,000	23 - 27 Februari
I	DESIMINASI PROGRAM PEMBINAAN PESERTA DIDIK	2,445,853,000	Maret
055	Penyaluran Bantuan	3,250,000,000	
A	PEMBERIAN BLOCKGRANT PENDIDIKAN	3,250,000,000	April & Agustus
5627.014.002	<i>Penumbuhan Budi Pekerti dan Budaya Literasi</i>	3,671,580,000	
051	<i>Penyusunan Panduan</i>	327,780,000	
A	PERSIAPAN	46,280,000	Maret

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
B	SELEKSI NASKAH	281,500,000	19 - 23 Maret
054	- Pelaksanaan Kegiatan		
A	PELAKSANAAN	3,343,800,000	21 - 26 April
5627.015	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	3,343,800,000	
5627.015.051	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	10,928,040,000	
052	Verifikasi Calon Penerima	10,928,040,000	
A	PERSIAPAN	155,040,000	
054	Penyaluran Bantuan	155,040,000	
A	PEMBERIAN BEASISWA	10,773,000,000	Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November
5627.016	Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	47,999,539,000	
5627.016.001	Siswa Yang Mengikuti Olimpiade Sains Nasional	17,317,911,000	
052	Koordinasi Pelaksanaan	5,746,855,000	

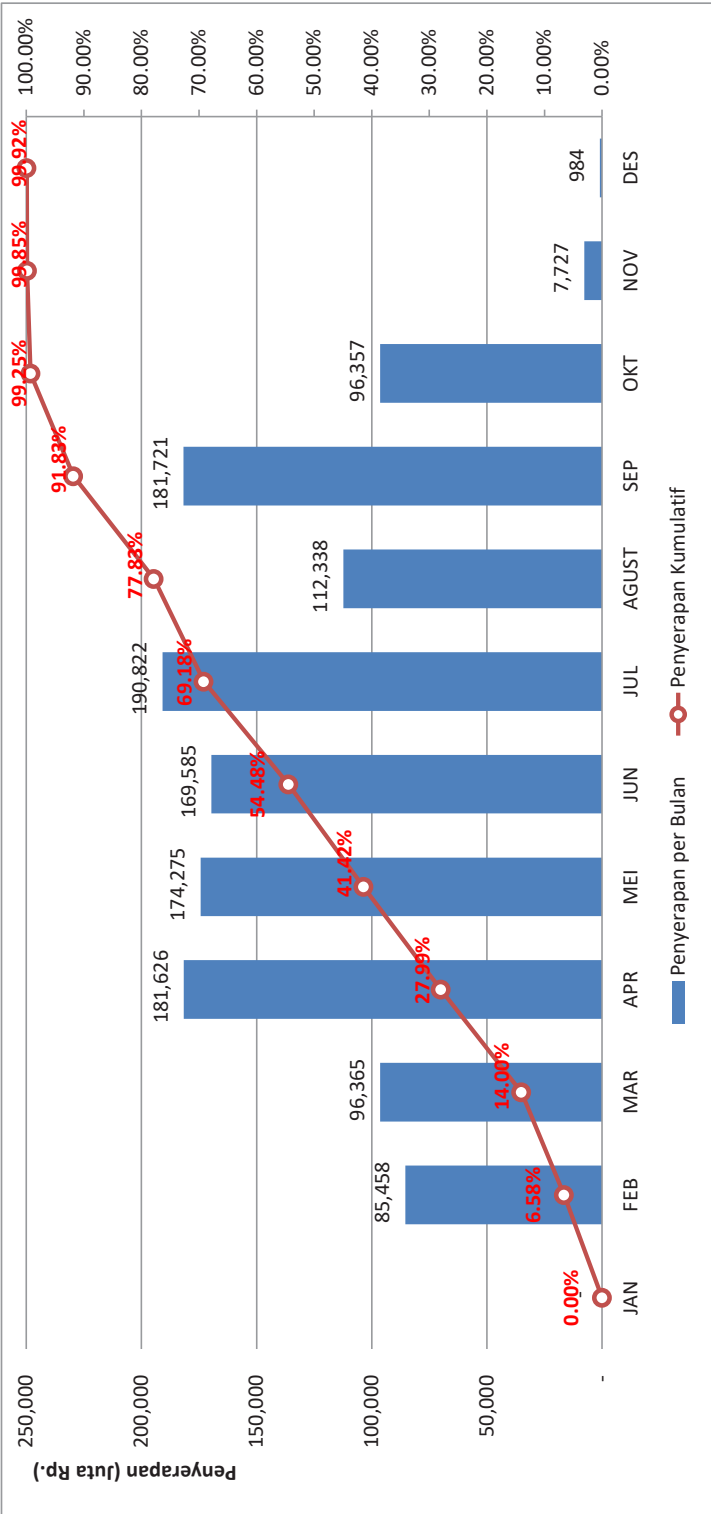
NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
A	PENYUSUNAN SOAL SELEKSI OLIMPIADE TINGKAT KAB/KOTA	793,627,000	12 - 15 November
B	PENYUSUNAN SOAL SELEKSI OLIMPIADE TINGKAT PROPINSI	847,940,000	6 - 9 Maret
C	OLIMPIADE SAINS TINGKAT PROPINSI	980,082,000	9 - 11 April
D	PENILAIAN SOAL OLIMPIADE SAINS TINGKAT PROPINSI	1,306,008,000	23 - 28 April
E	PERSIAPAN SARANA PENDUKUNG OLIMPIADE SAINS NASIONAL	1,819,198,000	Mei
054	Penyelenggaraan Lomba	11,571,056,000	
A	PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL (MANADO)	11,189,066,000	30 Juni - 6 Juli
B	KOORDINASI OSN	381,990,000	Maret, Mei, Juni
5627.016.002	Siswa Yang Mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	6,658,619,000	
052	Koordinasi Pelaksanaan	1,027,854,000	
B	PESIAPAN PENDUKUNG DAN KOORDINASI PELAKSANAAN FL2SN KE LAMPUNG	1,027,854,000	Maret, Juli, Agustus
054	Penyelenggaraan Lomba	5,630,765,000	
C	PELAKSANAAN FLS2N DI LAMPUNG	5,630,765,000	15 -21 September
5627.016.003	Siswa Yang Mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	10,191,305,000	

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
052	Koordinasi Pelaksanaan	1,691,221,000	
A	Persiapan		
B	KOORDINASI TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN O2SN	1,387,553,000	Maret, April, Juli
054	Penyelenggaraan Lomba	303,668,000	
A	PELAKSANAAN DI ACEH	8,500,084,000	25 - 31 Agustus
5627.016.004	Siswa Yang Mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia	8,500,084,000	
051	Penyusunan Materi	6,499,166,000	
A	PERSIAPAN DAN KOORDINASI TEMPAT KEGIATAN	82,080,000	Maret, Agustus, Oktober
054	Penyelenggaraan Lomba	82,080,000	
A	PELAKSANAAN PENILAIAN PROPOSAL NASKAH FINALIS	6,417,086,000	12 - 14 April
B	PENILAIAN NASKAH LAPORAN OPSI	419,350,000	5 - 9 Agustus
C	PELAKSANAAN WAWANCARA FINALIS OPSI	387,950,000	14 - 20 Oktober
5627.016.005	Siswa Yang Mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Tingkat Nasional	5,609,786,000	
051	Penyusunan Materi	7,332,538,000	
		2,092,000,000	

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
A	PENYUSUNAN BUKU KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK		Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agust. Sept. Okt. Nop. Des.
054	Penyelenggaraan Lomba	2,092,000,000	
A	PERSIAPAN	5,240,538,000	
B	PELAKSANAAN KALSEL	205,650,000	Maret, Juli
		5,034,888,000	10 - 17 Agustus
5627.017	Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler	22,402,793,000	
5627.017.001	Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler	22,402,793,000	
056	Pembinaan	22,402,793,000	
A	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM IMO KE TK. INTERNASIONAL		Maret, Juni, September, 11 - 22 Juli 2019
B	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM ICHO KE TK. INTERNASIONAL	2,104,905,000	
		2,329,720,000	Maret, Juni, September, 21 - 30 Juli 2019
C	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM IOI KE TK. INTERNASIONAL		Maret, Juli, September, 4 - 11 Agustus 2019
		2,536,353,000	

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
D	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM IESO KE TK. INTERNASIONAL	2,083,786,000	Maret, Juni, 26 Agustus - 3 September 2019
E	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM IBO KE TK. INTERNASIONAL	2,066,642,000	Maret, Juni, 4 - 11 Agustus 2019
F	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM IOAA /IAO KE TK. INTERNASIONAL	2,085,500,000	Maret, Juli, 2 - 10 Agustus 2019
G	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM IGEO KE TK. INTERNASIONAL	1,791,895,000	Maret, Juni, 30 Juli - 5 Agustus 2019
H	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM IPHO KE TK. INTERNASIONAL	1,958,886,000	Maret, Juni, September, 7 - 15 Juli 2019
I	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM IEO EKONOMI KE TK INTERNASIONAL		Maret, Juni, Juli
J	PEMBINAAN OLAH RAGA	1,731,409,000	
K	PEMBINAAN INTEL ISSEF	1,309,227,000	Oktober
L	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN TIM BAHASA INGGRIS DAN BAHASA INDONESIA	1,065,180,000	Maret, 12 - 19 Mei
		1,339,290,000	Maret, Mei, Juni, Juli - 2 Agustus 2019

Grafik Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Peserta Didik Tahun 2019



Tabel Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Peserta Didik Tahun 2019

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
Penyerapan per Bulan	-	85,458,489	96,365,420	181,626,241	174,274,650	169,584,571	190,821,628	112,338,218	181,720,874	96,356,615	7,726,871	984,185
Penyerapan Kumulatif	-	85,458,489	181,823,908	363,450,149	537,724,799	707,309,370	898,130,998	1,010,469,216	1,192,190,091	1,288,546,705	1,296,273,576	1,297,257,761
Persentase	0.00%	6.58%	14.00%	27.99%	41.42%	54.48%	69.18%	77.83%	91.83%	99.25%	99.85%	99.92%

Rencana Tindakan Kegiatan (Action Plan) unit kerja: Subbag Tata Usaha Tahun 2019

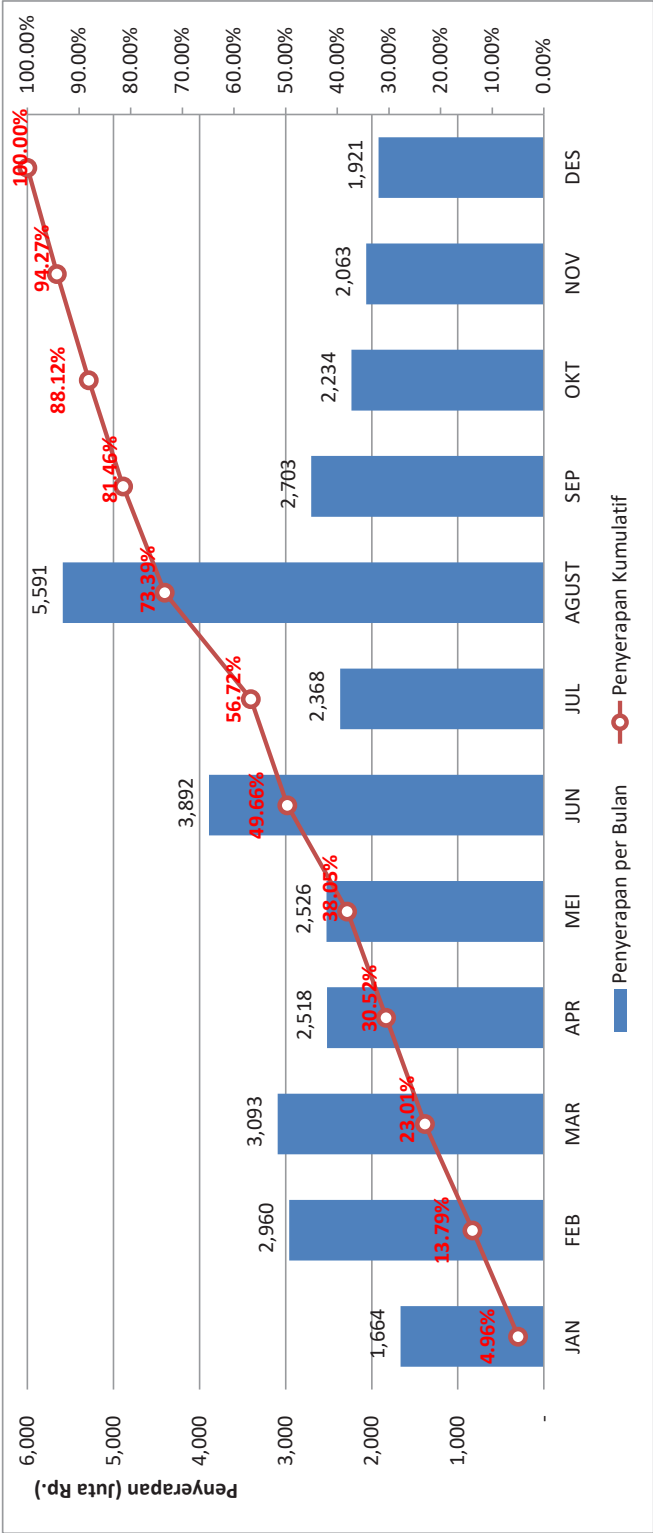
NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
5627	PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	2,076,949,325,000	
	SUBBAG TATA USAHA	33,534,983,000	
5627.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3,947,360,000	
5627.951.001	Layanan Internal (Over Head)	3,947,360,000	
996	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	2,563,935,000	
A	PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	2,563,935,000	April 1 - Agustus 5
997	PENGADAAN PERANGKAT DAN FASILITAS KANTOR		
A	PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	1,383,425,000	
5627.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,383,425,000	April 1 - September 5
5627.970.001	Layanan Dukungan Manajemen Program	7,350,964,000	
053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	7,350,964,000	
A	BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN	938,970,000	
B	PENYUSUNAN LAPORAN SATUAN KERJA	368,970,000	Maret 3 & April 1
		200,400,000	Juni 2 & Desember 2

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
C	PENYUSUNAN LAPORAN SIMAK BMN	169,200,000	Juli 2 & Desember 1
D	PENGOLAHAN DATA PERSEDIAAN DIREKTORAT	200,400,000	Juli 1 & Desember 1
054	Pengelolaan kepegawaian	265,570,000	
A	BIMBINGAN TEKNIK REFORMASI BIROKRASI INSTANSI I	265,570,000	Maret 4 & Maret 5
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6,146,424,000	
A	PAMERAN/VISUALISASI/PUBLIKASI	503,376,000	Januari 3, Mei 2 & November 2
B	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MOTIVASI PEGAWAI	1,207,401,000	Februari 2 & Februari 3
C	BIMBINGAN TEKNIK ADMINISTRASI PENGELOLAAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN	264,570,000	Agustus 1 & Agustus 2
E	BIMBINGAN TEKNIK ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	264,570,000	September 4 & September 5
F	BIMBINGAN TEKNIK PENYUSUNAN SKP	162,980,000	Februari 4
G	SINGKRONISASI DATA KEPEGAWAIAN	162,500,000	Mei 4 & Oktober 2
H	BIMBINGAN TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA	271,570,000	Maret 1 & Maret 2
I	PEMINDAHAN BARANG DIREKTORAT	224,357,000	Oktober 5 & November 2

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
L	BIMBINGAN TEKNIK PERPAJAKAN	241,570,000	Oktober 4 & Oktober 5
N	BIMBINGAN TEKNIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKAWAI	268,320,000	April 2 & April 3
O	BIMBINGAN TEKNIK PEMANFAATAN TIK	302,370,000	Juni 3 & Juni 4
Q	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1,938,120,000	Januari 1 - Desember 5
X	BIMBINGAN TEKNIK PENINGKATAN PUBLIK SPEAKING	334,720,000	Agustus 4 & September 1
5627.994	Layanan Perkantoran	22,236,659,000	
5627.994.001	Layanan Perkantoran	22,236,659,000	
001	Gaji dan Tunjangan	16,899,611,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	16,899,611,000	Januari 1 - Desember 5
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,337,048,000	
A	PERBAIKKAN PERALATAN KANTOR	398,300,000	Januari 1 - Desember 5
B	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	1,569,775,000	Maret 1 - November 5
C	JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	1,557,569,000	Februari 1 - Desember 5
D	DUKUNGAN LAYANAN OPERASIONAL PIMPINAN DAN PERKANTORAN	290,663,000	Januari 1 - Desember 5

NO	OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	ALOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
E	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN EMPAT	520,480,000	Januari 1 - Desember 5
F	LANGGANAN DAYA DAN JASA	180,960,000	Januari 1 - Desember 5
G	PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	28,700,000	Agustus 1 - Oktober 5
H	PENGADAAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI/SATPAM/PETUGAS	242,180,000	Maret 1 - Maret 5
I	KEBERSIHAN/PENGEMUDI PENGADAAN OBAT-OBATAN	387,221,000	Maret 3 - September 3
J	SOSIALISASI KEBIJAKAN DIREKTORAT	161,200,000	Mei 4 & Agustus 1

Grafik Rencana Penyerapan Anggaran Subbag Tata Usaha Tahun 2019



Tabel Rencana Penyerapan Anggaran Subbag Tata Usaha Tahun 2019

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
Penyerapan per Bulan	1.664,130	2.969.811	3.093.499	2.517.700	2.526.328	3.892.218	2.367.930	5.591.327	2.703.208	2.233.995	2.063.466	1.921.380
Penyerapan Kumulatif	1.664,130	4.623.941	7.717.440	10.235.139	12.761.467	16.653.685	19.021.615	24.612.942	27.316.150	29.550.145	31.613.602	33.534.981
Persentase	4,96%	13,79%	23,01%	30,52%	38,05%	49,66%	56,72%	73,39%	81,46%	88,12%	94,27%	100,00%



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019**

